ISSN 2620-6102

EcoPlan

Journal of Economics and Development Studies

| ECOPLAN | VOL.7 | NO. 1 | HAL. 1-107 | APRIL 2024 |

Investasi, Inflasi dan Konsumsi: Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan
(Ikhwan Saibana, Muhammad Noval, Siti Aminah, Haifa Nafila, Mila Rosadi) 1-14

Analisa Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
(Yusman Dodi, Retno Agustina Ekaputri, Izharudin Izharudin) 15-29

Pengaruh Kelayakan Hidup Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 10 Provinsi Termiskin Di Indonesia
(Eliza Clara Yeremia Sagala, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing) 30-39

Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Difabel Cerebral Palsy melalui Program Jombang Sehat: Studi pada BAZNAS Jombang
(Ayus Rahma Yundha, Luluk Hanifah) 40-50

Analisis Volume Usaha Koperasi dan Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pengangguran Melalui Produk Domestik Regional Bruto Se-Kalimantan Selatan
(Mutiara Khan, Saipudin Saipudin, Muzdalifah) 51-66

Inklusivitas Perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022: Pendekatan Model Miyazawa
(Ahmadi Murjani, Akhmad Rifani, Muhammad Febrian Rizky Ramadhan 67-80

The Impact of Indonesia Capital City's Relocation to East Kalimantan on the Agricultural Sector of South Kalimantan: IRIO Analysis
(Abdil Fadhil Ridho, Muhammad Handry Imansyah, Muzdalifah) 81-91

Pemodelan Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
(Hadi Sutrisno, Muhammad Rusmin Nuryadin) 92-107

Investasi, Inflasi dan Konsumsi: Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan

Ikhwan Saibana[1)], Muhammad Noval[2)*], Siti Aminah[2)], Haifa Nafila[3)], Mila Rosadi[4)]
[1)] Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia
[2)] Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia
[3)] Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia
[4)] Program Studi Perbankan Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia

[*] E-mail corresponding author: noval@uin-antasari.ac.id

Ecoplan

Submitted: Nov 27, 2023
Accepted: Apr 24, 2024
Published: Apr 29, 2024

Keywords: ***Economic Growth; Investment; Inflation; Consumption***

Abstract *- Economic growth is used as an important indicator in measuring the success or failure of economic development. A growing economy indicates economic development that each economic sector has achieved within a certain period. This research aims to determine the economic growth in South Kalimantan in terms of investment, inflation, and consumption. The research method used in this research is multiple linear regression analysis using hypothesis testing, namely the t-test and F-test, based on data obtained in time-series form with an observation period from 2006 to 2021. Secondary data from published data from the Agency The Statistics Center (BPS) of South Kalimantan Province forms investment performance values, inflation, and consumption as independent variables. Meanwhile, the dependent variable is economic growth. The research results prove that economic growth is partially influenced by inflation and consumption; high unstable inflation will hurt economic growth, and high consumption will encourage economic performance. Meanwhile, investment does not affect the economic growth of South Kalimantan because the amount of investment depends on the efficiency and accuracy of policy targets, the availability of adequate human resources and infrastructure, and a stable political situation. Investment, inflation, and consumption variables influence the simultaneous test of economic growth in South Kalimantan.*

Abstrak - Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator penting dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh menjadi indikasi pembangunan ekonomi yang berhasil diraih oleh masing-masing bidang ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi ditinjau dari aspek investasi, inflasi dan konsumsi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda menggunakan pengujian hipotesis yaitu uji t dan uji F, berdasarkan data yang didapat dalam bentuk time-series dengan masa pengamatan sejak tahun 2006 hingga tahun 2021. Data sekunder bersumber dari data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan berupa nilai kinerja Investasi, inflasi dan konsumsi sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inflasi dan konsumsi, inflasi yang tinggi tidak stabil akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dengan konsumsi yang tinggi akan mendorong pencapaian kinerja ekonomi. Sedangkan investasi tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi kalimantan selatan, karena besarnya investasi bergantung pada adanya efisiensi dan ketepatan sasaran kebijakan, ketersediaan SDM dan infrastruktur yang memadai, serta keadaan politik yang stabil. Adapun pengujian secara simultan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel investasi, inflasi dan konsumsi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Investasi; Inflasi; Konsumsi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu kualifikasi penting dalam mengukur keberhasilan atau pun kegagalan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berdampak pada gambaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi penting bagi perekonomian suatu negara karena mengukur pertumbuhan dan kinerja perekonomian negara tersebut (Mongan & Saputra, 2013). Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi Indonesia merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan nasional. Pendapatan yang lebih tinggi berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan manusia penting lainnya, dan mereka juga memiliki dampak tidak langsung pada pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai dengan proses yang senantiasa berkesinambungan menjadi pembentuk keadaan yang fundamental dalam kelangsungan pembangunan ekonomi (Tapparan, 2020).

Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan baik dari segi infrastruktur, sumber daya alam, tenaga kerja dan potensi pasar telah mengalami pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Banyak sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkembang pesat, di antaranya adalah sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan pariwisata. Sektor pertanian di daerah ini sangat potensial, terutama di bidang kelapa sawit dan karet, sehingga banyak perusahaan besar yang berinvestasi di sana. Selain itu, sektor perikanan dan perkebunan juga mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di daerah pesisir. Namun ketergantungan pada sektor tertentu pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, menjadi permasalahan pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan. Ketika harga komoditas global mengalami fluktuasi atau terjadi penurunan permintaan, perekonomian Kalimantan Selatan dapat terpengaruh secara signifikan. Pada akhir tahun saja menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kemajuan ekonomi di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,11% (Badan Pusat Statistik, 2023), hal tersebut berarti potensi ekonomi yang dimiliki oleh provinsi ini dapat berkembang dan akan terus dapat ditingkatkan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Secara statistik sejak 2006 ke 2021 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mengalami sedikit penurunan, akan tetapi efek adanya pandemi menyebabkan perlunya upaya ekstra dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke nilai yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Selatan tergambar pada gambar berikut:

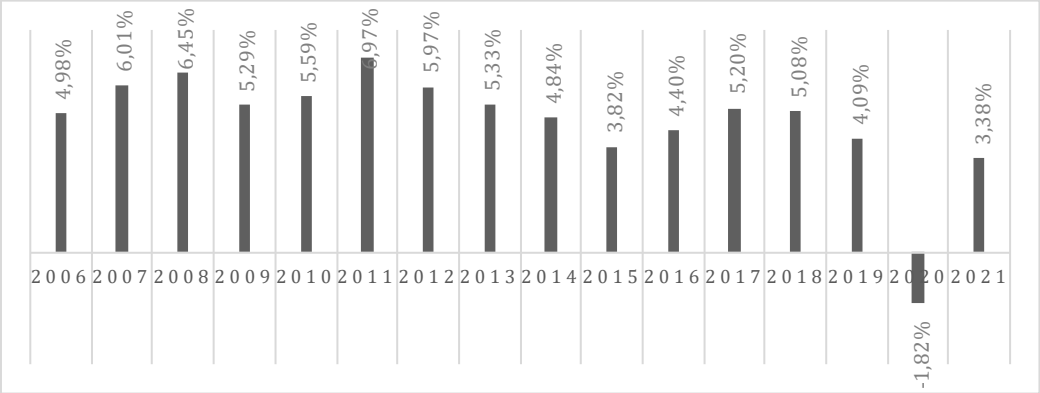

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Periode 2006-2021

Investasi menjadi sangat penting guna meningkatkan kemajuan suatu daerah, namun beberapa faktor dapat menjadi penentu ketertarikan investor terhadap suatu daerah atau negara, diantaranya stabilitas keamanan, kebijakan politik dan juga potensi investasi itu sendiri dalam memberikan imbal hasil. Berikut ini catatan investasi sejak tahun 2006 sampai dengan 2021:

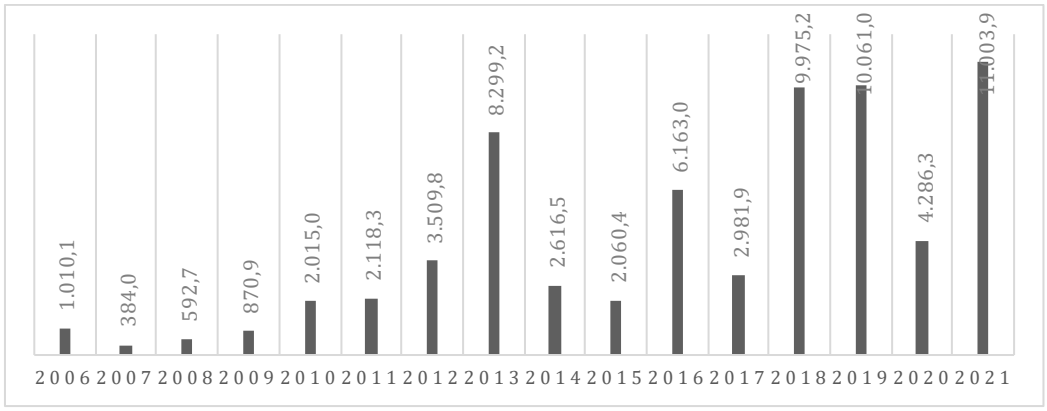

Gambar 2. Investasi Kalimantan Selatan Periode 2006-2021

Secara global perekonomian dunia dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan internal suatu negara untuk menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Salah satu faktor eksternal yaitu inflasi, inflasi dapat menyebabkan daya beli menurun dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Rekaman inflasi yang terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

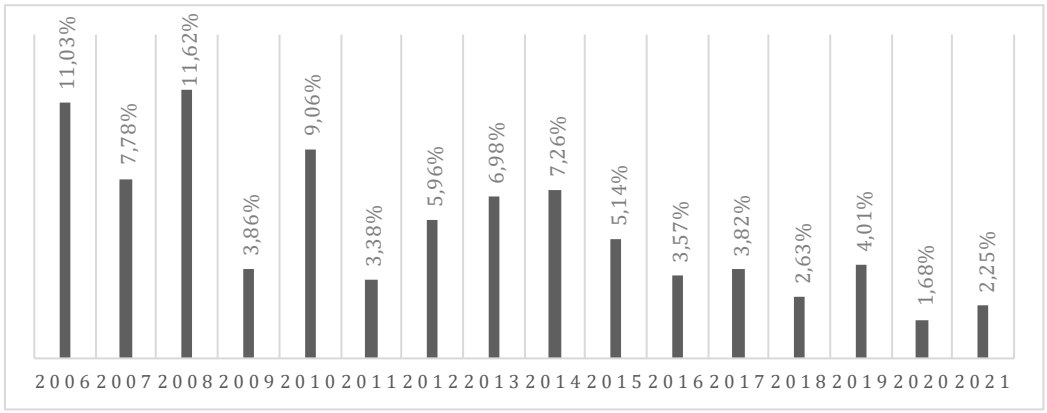

Gambar 3. Inflasi Periode 2006-2021

Tingkat konsumsi secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara mikro ataupun makro. Sehingga peningkatan nilai konsumsi dapat juga diasumsikan kemampuan dan daya beli yang meningkat, dengan itu diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian negara. Berikut ini perkembangan konsumsi sejak tahun 2006 sampai 2021:

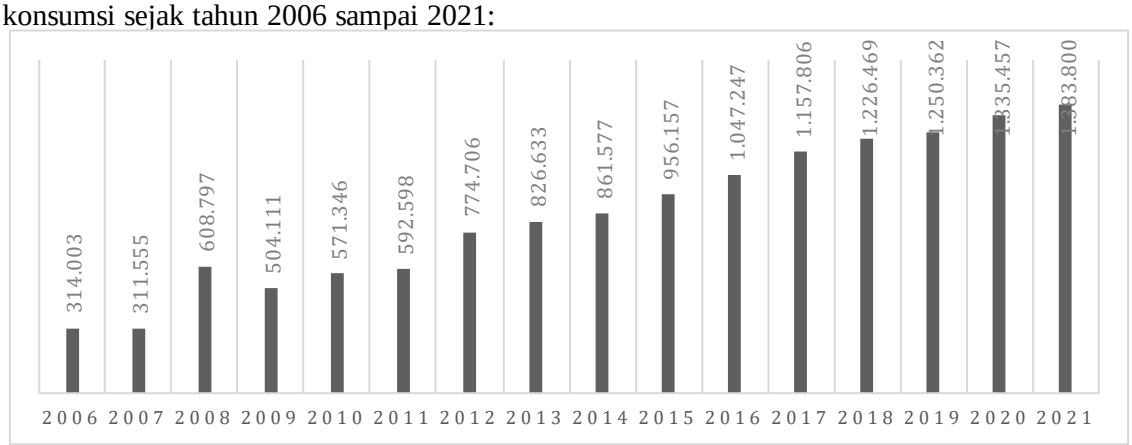

Gambar 4. Konsumsi Kalimantan Selatan Periode 2006-2021

Ditinjau dari diagram-diagram gambar 1 s.d 4 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhan 4,72% di setiap tahunnya. Sebagai salah satu daerah berkembang, pembangunan di Kalimantan Selatan juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti tingkat pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun terdapat banyak lapangan pekerjaan di Kalimantan Selatan, masih banyak penduduk yang menganggur karena kurangnya keterampilan dan *skill* yang cocok dengan tuntutan pasar. Masalah dan tantangan seperti yang ada harus segera diperbaiki. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan investasi, baik investasi domestik maupun asing.

Namun ada beberapa masalah yang dihadapi dalam sektor investasi di Kalimantan Selatan seperti keterbatasan infrastruktur yang layak, seperti akses jalan, bandara dan pelabuhan. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat aksesibilitas, distribusi barang, dan konektivitas dengan wilayah lain, sehingga mempengaruhi daya tarik investasi di Kalimantan Selatan. Selain itu proses perizinan dan regulasi yang kompleks dan lambat dapat menjadi hambatan bagi investor. Padahal salah satu faktor yang dapat menjadi syarat kemajuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menjamurnya investasi dalam segala bidang di suatu daerah Ma'ruf & Wihastuti (2008), Zakaria (2019) dan Sulistiawati (2012) menemukan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Hasil serupa juga ditemui di Singapura, yaitu Investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing juga terbukti memengaruhi perekonomian (Gandhi et al., 2022). Hal tersebut dibuktikan dari penelitian Alvaro (2021) dan Muryanto et al. (2022) terdahulu menyebut bahwa investasi berdampak baik terhadap ekonomi suatu daerah , namun bukti sebaliknya ditemukan oleh Barianto (2019) di Kota Batam Investasi tidak memiliki terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak adanya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga disampaikan oleh Hellen et al. (2018) dan Nadzir & Kenda (2023).

Sektor pertambangan, terutama batu bara, yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Selatan menjadikan fluktuasi perekonomian Kalimantan Selatan rentan terjadi, karena mengikuti turun naiknya harga komoditas. Tumbuhnya perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2024 perekonomian diperkirakan dalam kisaran 4,0-4,8 persen. Hal ini dikarenakan adanya tantangan perlambatan di sektor pertambangan, karena kebijakan maupun operasional, masih berlanjut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan hilirisasi produk pertambangan, pertanian ataupun sektor lainnya (Yulianus, 2024).

Inflasi adalah salah satu variabel penting yang bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi yaitu naiknya harga secara umum dan terus menerus. Kalimantan Selatan memiliki sektor-sektor ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, seperti pertambangan dan perkebunan. Fluktuasi harga komoditas global dapat mempengaruhi inflasi di wilayah tersebut. Jika harga komoditas turun, pendapatan sektor-sektor ini dapat terpengaruh dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat (daya beli) terutama bagi masyarakat dengan pendapatan tetap, yang berakhir pada pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terhambat. Laju inflasi harus dapat terkontrol agar tidak menyebabkan terjadinya persoalan makroekonomi di masa mendatang yang dapat berdampak pada terganggunya stabilitas dalam perekonomian. Hubungan erat dimiliki antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi/ Produk Domestik Bruto, karena pertumbuhan ekonomi sebuah negara bisa meningkat apabila inflasi yang terjadi dalam tingkat rendah dan stabil (Saefulloh & Fahlevi, 2023). Berdasarkan penelitian Agus & Herawati (2023) dan Sabyan et al., (2023) terdahulu inflasi memengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian, secara khusus perekonomian di Indonesia dengan indikator Produk Domestik Bruto dipengaruhi oleh tingkat inflasi dijelaskan dalam penelitian Salim, Fadilla, et al., (2021). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi ketika diukur berdasarkan penilaian inflasi ternyata tidak memiliki pengaruh (Hastin, 2022), ada pula penelitian lain yang bertolak belakang yang menunjukkan ketiadaan pengaruh inflasi terhadap perekonomian yaitu Putri et al., (2018) dan Hamzah et al., (2023).

Harga yang tinggi dapat menyebabkan turunnya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa dan meningkatnya jumlah serta persentase kemiskinan di Indonesia (Ningsih & Andiny,

2018). Secara umum di Indonesia Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo (2022) konsumsi merupakan penopang perekonomian (Hidayat, 2021). Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang penetapan suku bunga juga menjadi perhatian penting karena akan berdampak kepada konsumsi (Yudanto & Rochaida, 2020). Pola konsumsi yang tidak seimbang atau tidak berkelanjutan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat Kalimantan Selatan cenderung mengonsumsi barang-barang impor atau barang mewah yang tidak diproduksi secara lokal, hal ini dapat menyebabkan aliran uang keluar dari daerah dan mengurangi dampak multiplier dalam perekonomian. Pola konsumsi yang tidak seimbang juga dapat mengabaikan sektor-sektor ekonomi potensial dalam daerah. Konsumsi Rumah Tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Majalengka (Yusup & Istiqomah, 2022). Secara empiris bukti lain juga menunjukkan adanya pengaruh konsumsi terhadap perekonomian dijelaskan dalam penelitian Sudirman & Alhudhori (2018), Purnama et al. (2022) dan Koilam et al. (2023). Wadinati dan Yasin pada tahun 2022 membuktikan pengaruh yang berbeda dari konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2010-2019, hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh secara negatif antara konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi (Wadiniati & Yasin, 2022). Perbedaan hasil temuan lain juga ditemukan yang menunjukkan tidak adanya efek yang ditimbulkan dari konsumsi terhadap perekonomian (Padli et al., 2020).

Secara umum terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas investasi, inflasi dan konsumsi dalam hubungannya dengan pertumbuhan perekonomian baik secara masing-masing maupun bersama-sama. Namun, dari penelitian terdahulu tersebut terdapat hasil yang cukup beragam, hal tersebut dapat dikarenakan lingkup yang berbeda, masa penelitian yang tidak sama maupun metode penelitian yang variatif. Variasi penelitian terdahulu tersebut menyebabkan adanya relevansi untuk dilakukannya penelitian lanjutan dengan kombinasi variabel yang berbeda, waktu serta metode penelitian yang lain (Noval et al., 2020). Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang terjadi sebelumnya, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan penggunaan variabel independen berupa investasi, inflasi dan konsumsi serta variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi (Astuti, 2018). Kegiatan investasi memberikan peluang kepada individu/masyarakat agar terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu: *Pertama,* Kenaikan investasi dapat mengakibatkan peningkatan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; *Kedua,* Peningkatan investasi barang modal dapat menambah volume produksi; dan *Ketiga,* Investasi akan selaras dengan perkembangan teknologi.

Investasi memiliki dua jenis, yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, investasi ini biasanya tidak berorientasi pada keuntungan. Sedangkan investasi swasta merupakan investasi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan, investasi ini berasal dari sektor swasta nasional, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun luar negeri yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) (Nehemia & Prasetiya, 2023).

Pertama, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), PMDN dilakukan dengan modal dalam negeri untuk kegiatan penanaman modal terhadap kegiatan usaha di wilayah Indonesia. *Kedua,* Penanaman Modal Asing (PMA), PMA dilakukan sepenuhnya dengan modal asing maupun dengan berserikat dengan modal dalam negeri untuk kegiatan penanaman modal terhadap kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Inflasi

Pada dasarnya inflasi merupakan mencerminkan ketidakseimbangan yang terjadi antara penawaran dan permintaan perekonomian suatu negara. Inflasi berakibat pada penurunan daya beli mata uang sebuah negara, sehingga masyarakat dalam melakukan konsumsi barang atau jasa

masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang (Saefulloh & Fahlevi, 2023) Inflasi adalah keadaan dimana naiknya tingkat harga komoditas atau barang dan jasa pada periode tertentu (Christianingrum & Syafri, 2019).

Inflasi dapat berakibat negatif terhadap perekonomian masyarakat, pengusaha maupun pemerintah/perekonomian nasional. Khususnya untuk perekonomian nasional, dampak terjadinya inflasi yaitu penurunan investasi, meningkatkan suku bunga, mendorong penanaman modal secara spekulatif, gagalnya pelaksanaan pembangunan, ketidakpastian ekonomi di masa depan, berkurangnya daya saing produk lokal/nasional, menimbulkan defisit pembayaran, penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan angka pengangguran (Ardiansyah, 2017).

Pengukuran nilai/tingkat inflasi dapat dilakukan dengan tiga indikator, yaitu: *Pertama*, Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks berdasarkan rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. *Kedua*, Indeks Harga Produsen (IHP), yaitu indeks yang menjelaskan perubahan harga (kenaikan atau penurunan) di tingkat produsen. *Ketiga*, Deflator Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu pengukuran perubahan nilai ekonomi sebuah negara dari waktu ke waktu dengan perhitungan inflasi atau deflasi (Yudanto & Rochaida, 2020).

Konsumsi

Konsumsi bisa menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi (N et al., 2013). Konsumsi merupakan pembelanjaan yang dilakukan rumah tangga atas barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi akhir atau kebutuhan seseorang/masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan atas sebuah pekerjaan (Takahindangen et al., 2021) Konsumsi yang tinggi berarti pemenuhan kebutuhan sudah optimal, sebaliknya dengan tingkan konsumsi rendah dapat berarti kecilnya kemampuan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Konsumsi diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan sejumlah biaya konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan untuk anggota rumah tangga selama periode satu bulan, baik yang berupa pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. dalam konsumsi rumah tangga membedakan antara konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang, pengeluaran untuk keperluan kegiatan usaha maupun pemberian kepada pihak lain tidak menjadi bagian dalam perhitungan konsumsi ini (Sihite, 2022).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang berakibat adanya peningkatan produksi barang dan jasa oleh suatu masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut (Sukirno, 2016). salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah agar terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan serangkaian ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah atau negara. Indikator-indikator yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi antara lain: *Pertama*, Produk Domestik Bruto (PDB), yakni nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara selama periode tertentu. *Kedua*, Pendapatan per kapita, yakni pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara. *Ketiga*, Tingkat pengangguran, penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran.

Teori Keynes

Pandangan penting dalam teori ekonomi makro modern adalah yang dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes, sampai pada akhirnya terbit sebuah buku pada tahun 1936 yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan menjadi landasan teori ekonomi makro yang sering disebut teori Keynes. Argumen yang tertera pada buku tersebut yaitu pengeluaran agregat (belanja dari masyarakat untuk barang dan jasa) merupakan faktor terpenting dalam penentuan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Selain menjabarkan faktor-faktor yang menjadi

penentu tingkat transaksi ekonomi sebuah negara dan situasi yang dapat menyebabkan timbulnya masalah, analisis makro ekonomi dalam teori Keynes juga menjabarkan upaya-upaya yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi tersebut. Kemudian yang menjadi puncak dalam keilmuan analisis makro ekonomi adalah analisis tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sebuah negara (Sukirno, 2016).

Teori tersebut menunjukkan tentang penawaran dan pengeluaran agregat yang akan menentukan tingkat aktivitas dalam perekonomian dan jumlah pendapatan nasional atau produk nasional yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Dalam ekonomi modern, komponen pengeluaran total dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: *Pertama,* Pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga. *Kedua,* Investasi perusahaan-perusahaan. *Ketiga,* Pengeluaran untuk konsumsi dan investasi pemerintah. *Keempat,* Pelaksanaan ekspor (Hasanah, 2013).

Teori Monitarisme

Teori ini, yang dikembangkan oleh Milton Friedman (1987), yang berpendapat bahwa tingginya inflasi dan ketidakstabilan inflasi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, golongan monetarisme berpendapat bahwa harga mendapat pengaruh dari tingkat pertumbuhan uang, dan tidak memiliki pengaruh nyata pada pertumbuhan dalam jangka panjang. Inflasi akan berpengaruh apabila pertumbuhan jumlah uang beredar lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Simanungkalit, 2020).

METODE PENELITIAN/METHOD

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari analisis statistik deskriptif kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji regresi linier berganda dengan uji t dan uji F serta koefisien determinasi (R^2) menggunakan *eviews.* Adapun model penelitiannya adalah:

$$\mathbf{Y = -\beta 0 + \beta 1.X1 + \beta 2.X2 + \beta 3.X3 + e}$$

Dimana:
Y = variabel bebas/dependen
X = variabel terikat/independen
β = koefisien estimate
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
e = *Error term*

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melakukan analisis data secara statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian, hasil pengujian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memperoleh hasil penelitian. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini dibantu dengan program *Eviews.*

Data dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder terkait variabel penelitian berupa nilai investasi, tingkat inflasi, nilai konsumsi dan besaran nilai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan sesuai dengan periode pengamatan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data publikasi yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman websitenya.

Analisis Data

Analisis data penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis statistik deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan objek dan variabel yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk dapat mengetahui terpenuhinya asumsi klasik terhadap keseluruhan data agar dapat dilanjutkan pada pengujian akhir yaitu pengujian hipotesis dengan uji regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F.

Pertama, Uji t (uji parsial). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (masing-masing). Pengaruh secara parsial

terjadi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel. Apabila t-hitung lebih besar daripada t-tabel artinya terdapat pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Sebaliknya, apabila t-hitung lebih kecil daripada t-tabel artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen.

Kedua, Uji F (Uji Simultan). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Pengaruh secara simultan terjadi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan F-hitung dan F-tabel. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel artinya terdapat pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Sebaliknya, apabila F-hitung lebih kecil daripada F-tabel artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data nilai investasi dengan indikator PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), tingkat inflasi, nilai konsumsi per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode pengamatan yaitu sejak tahun 2006 sampai tahun 2021.

Statistik deskriptif adalah pengujian untuk menemukan gambaran umum atas data-data dari seluruh variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Jarque-Bera, hasil yang ditunjukkan pada pengujian ini harus menggambarkan distribusi normal berdasarkan data yang ditunjukkan dari nilai probabilitasnya. Diakui normal apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%, sedangkan apabila kurang dari nilai tersebut maka artinya data adalah tidak normal. Adapun hasil dari pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Investasi	**Inflasi**	**Konsumsi**
Mean	4246,763	0,056831	857665,9
Median	2799,200	0,045750	844105,0
Maximum	11003,90	0,116200	1383800
Minimum	384,0000	0,016800	311555,0
Std. Dev.	3666,175	0,030144	353257,6
Probability	0,345093	0,487583	0,603458
Observations	16	16	16

Sumber: Olah Data (2023)

Pertama, Nilai Investasi yang ditunjukkan pada tabel di atas memiliki nilai Probabilitas sebesar 0,345093, yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan data pada variabel inflasi telah berdistribusi normal. Nilai mean (rata-rata) dari data menunjukkan nilai sebesar 4246,763, nilai minimum 384,0000 dan nilai maksimum yaitu 11003,90 serta nilai standar deviasi berjumlah 2,02E+08 dalam jumlah tahun pengamatan selama 16 tahun.

Kedua, Nilai probabilitas dari variabel Inflasi yaitu 0,487583, yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 5% atau dengan kata lain data telah berdistribusi normal. Nilai mean (rata-rata) dari data menunjukkan nilai sebesar 0,056831, nilai minimum 0,016800 dan nilai maksimum yaitu 0,116200 serta nilai standar deviasi berjumlah 0,030144 dalam jumlah tahun pengamatan selama 16 tahun.

Ketiga, Variabel terakhir yaitu Konsumsi menunjukkan nilai Probabilitas adalah sebesar 0,603458 yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 5% atau dengan kata lain data telah berdistribusi normal. Nilai mean (rata-rata) dari data menunjukkan nilai sebesar 857665,9, nilai minimum 311555,0 dan nilai maksimum yaitu 1383800 serta nilai standar deviasi berjumlah 1,87E+12 dalam jumlah tahun pengamatan selama 16 tahun.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan bukti ada atau tidak adanya pengaruh variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen yaitu investasi (X_1), inflasi (X_2) dan konsumsi (X_3) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Pada penelitian ini, hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program Eviews 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengujian Regresi Linier Berganda

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	60156213	5327349	11,29196	0,0000
Investasi	477,3479	364,0122	1,311352	0,2143
Inflasi	-97588540	42444067	-2,299227	0,0403
Konsumsi	54,43586	4,682620	11,62509	0,0000

Sumber: Olah Data (2023)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat hasil persamaan regresi linier berganda yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Y = 60156213 + 477.3479 X1 - 97588540 X2 + 54.43586 X3 + e

Pertama, β (konstanta) yaitu pada saat semua variabel independen yaitu investasi, inflasi dan konsumsi dianggap sama dengan nol atau konstan maka kenaikan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 60156213. *Kedua,* X_1 (investasi), yaitu setiap penambahan 1 persen investasi maka dapat meningkatkan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 477,3479 dengan premis bahwa variabel lain berada dalam situasi konstan (tetap). *Ketiga,* X_2 (inflasi), yaitu setiap kenaikan 1 persen inflasi maka dapat menurunkan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar -97588540 dengan premis bahwa variabel lain berada dalam situasi konstan (tetap). *Keempat,* X_3 (konsumsi) setiap kenaikan 1 persen konsumsi maka dapat meningkatkan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 54,43586 dengan premis bahwa variabel lain berada dalam situasi konstan (tetap).

Uji Hipotesis Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian parsial atau uji t memiliki tujuan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh yang dimiliki oleh variabel independen secara individu dalam mempengaruhi variabel dependen yang sedang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Dalam hal ini, jika nilai t-hitung > t-tabel atau probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka H_0 (hipotesis nol) ditolak sedangkan H_a (hipotesis alternatif) diterima, hal tersebut artinya variabel independen yang sedang diuji memengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t-hitung < t-tabel atau probabilitas > 5% atau 0,05, maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak, yang berarti variabel independen yang sedang diuji tidak memengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

Tabel 3. Pengujian Parsial (Uji t)

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	60156213	5327349	11,29196	0,0000
Investasi	477,3479	364,0122	1,311352	0,2143
Inflasi	-97588540	42444067	-2,299227	0,0403
Konsumsi	54,43586	4,682620	11,62509	0,0000

Sumber: Olah Data (2023)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas maka dapat dilihat hasil yang menunjukkan bahwa: *Pertama,* Variabel Investasi (X_1), terlihat dari hasil yang ditunjukkan melalui nilai Probabilitas yaitu sebesar 0.2143 yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 5% maka dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti investasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, Variabel Inflasi (X_2), terlihat dari hasil yang ditunjukkan melalui nilai Probabilitas yaitu sebesar 0,0403 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan nilai dari

Coefficient sebesar -97588540 maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Hal ini berarti inflasi memiliki pengaruh negatif atau pengaruh terbalik dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketiga, Variabel Konsumsi (X_3), terlihat dari hasil yang ditunjukkan melalui nilai Probabilitas yaitu sebesar 0.0000 yang hal ini berarti nilainya lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan nilai dari *Coefficient* sebesar 54,43586 maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Hasil tersebut berarti konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Uji Hipotesis Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini disebut pula pengujian simultan atau uji F, pada tahap pengujian ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel, serta dapat pula dilihat berdasarkan nilai Prob(F-statistic). Jika F-hitung > F-tabel atau Prob (F-statistik) kurang dari (<) 0,05 atau 5%, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, apabila F-hitung < F-tabel atau Prob (F-statistic) > 5% atau 0,05, maka artinya H_0 diterima sedangkan H_a ditolak. Hal ini menandakan bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Pengujian Simultan (Uji F)

R-squared	0,983268	*Mean dependent var*	1,03E+08
Adjusted R-squared	0,979085	*S.D. dependent var*	23047325
S.E. of regression	3333075	*Akaike info criterion*	33,08901
Sum squared resid	1,33E+14	*Schwarz criterion*	33,28215
Log likelihood	-260,7121	*Hannan-Quinn criter.*	33,09890
F-statistic	235,0677	*Durbin-Watson stat*	1,830775
Prob (F-statistic)	0,000000		

Sumber: Olah Data (2023)

Dari tabel 4 di atas memberikan bukti dari hasil pengujian secara simultan yaitu bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, kesimpulan itu diperoleh berdasarkan hasil yang ditunjukkan dari nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian berarti semua variabel independen dalam penelitian ini (yaitu Investasi, Inflasi dan Konsumsi) secara bersama-sama atau simultan memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembahasan

Pertama, Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pengujian parsial atau uji t yang telah ditunjukkan pada tabel 3, yaitu bahwa variabel Investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2006-2021. Hal tersebut berarti berapa pun nilai investasi yang ditanamkan, maka hal tersebut tidak berdampak pada turun atau naiknya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB jika investasi dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terampil, kestabilan politik, serta memiliki infrastruktur yang memadai (Kurniawan, 2020). Investasi tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi investasi bisa menjadi bagian dalam menumbuhkan dan membangun ekonomi di Indonesia untuk lebih berkembang dan lebih baik.(Ain', 2021)

Ketergantungan investasi yang cukup tinggi pada instrumen investasi pertambangan di Kalimantan Selatan menyebabkan naik turunnya nilai investasi secara keseluruhan sangat

terpengaruh pada kinerja ekonomi sektor pertambangan. Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan variabel investasi tidak dapat menjadi variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Hasil ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Rendy Alvaro yang menyebutkan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan juga Penanaman Modal Asing (PMA) dibuktikan tidak memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Alvaro, 2021). Sedikit perbedaan hasil penelitian tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi ditemukan dari penelitian yang dilakukan di Jawa Timur yang menyebut bahwa walaupun investasi dalam bentuk PMA juga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun investasi dalam bentuk PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (Muryanto et al., 2022)

*Kedua***,** Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau uji t yang telah ditunjukkan pada tabel 3, yaitu bahwa variabel Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2006-2021. Inflasi yang menjadi indikator penurunan nilai uang adalah hal menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi yang tinggi bisa menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, begitu pun sebaliknya dengan nilai inflasi yang rendah daya beli masyarakat dapat meningkat dan sejalan dengan itu dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hasil yang didapat ini searah dengan teori monitarisme yang dikembangkan oleh Milton Friedman (1987) yang menyatakan bahwa tingginya nilai inflasi dan inflasi tidak stabil akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan berimbas kepada beberapa efek buruk pada laju pembangunan ekonomi, diantaranya investasi akan berkurang, gagalnya pelaksanaan pembangunan, dan menimbulkan defisit neraca perdagangan serta menyebabkan pengangguran meningkat yang semuanya akan berdampak pada penurunan jumlah produksi barang dan jasa (Ardiansyah, 2017)

Hasil yang sama menyebut bahwa inflasi secara meyakinkan menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (Salim et al., 2021). Inflasi yang rendah menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat dan secara tegak lurus mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dengan persentase yang dominan secara signifikan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Agus & Herawati, 2023) dan (Ronaldo, 2019).

*Ketiga***,** Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pengujian parsial atau uji t yang telah ditunjukkan pada tabel 3, yaitu bahwa variabel konsumsi memberikan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2006-2021. Hasil penelitian dari variabel ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Keynes yang berpendapat bahwa pengeluaran agregat (belanja masyarakat ke atas barang dan jasa) merupakan faktor penting yang menentukan capaian tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Pendapatan rumah tangga yang tinggi secara sederhana dapat menjadikan terjadinya peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan suatu daerah. Konsumsi rumah tangga disebut memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah karena terdapat hubungan positif pula antara peningkatan pendapatan yang diterima dengan perubahan pola konsumsi yang lebih meningkat dibanding sebelumnya. Perubahan pola konsumsi tersebut berujung pada peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga akan berpengaruh positif pada permintaan agregat yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Purnama et al., 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian pada tahun 2023 yaitu di Kota Manado Pengeluaran Konsumsi secara signifikan memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Koilam et al., 2023). Pada tahun 2013 di Sumatera Barat juga terdapat penelitian yang menyatakan adanya pengaruh dari konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh ini karena dengan konsumsi yang tinggi, terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang berefek positif terhadap perputaran roda ekonomi (N et al., 2013).

Keempat, Investasi, Inflasi dan Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau uji F yang telah dilakukan dan ditunjukkan pada tabel 4, hasil menunjukkan bahwa variabel Investasi, Inflasi dan Konsumsi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan kepada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2006-2021.

Investasi, Inflasi dan Konsumsi merupakan faktor-faktor penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam penilaian dan pendongkrak perekonomian suatu daerah atau negara. Investasi yang rendah dapat menjadi indikator tidak menariknya perputaran roda ekonomi di suatu daerah yang menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi pada suatu daerah. Inflasi yang tinggi juga dapat mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat yang bisa menghambat berputarnya roda perekonomian, hal demikian juga terjadi apabila tingkat konsumsi yang rendah pada suatu daerah. Dengan peningkatan investasi, stabilnya tingkat inflasi dan kuatnya daya beli (konsumsi) masyarakat hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan atau pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Hal ini juga disampaikan oleh Andi Yusuf dan Istiqomah bahwa variabel Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi secara simultan ditemukan memberikan efek positif signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Yusup & Istiqomah, 2022). Demikian pula penelitian lain dengan variabel investasi, konsumsi dan tenaga kerja memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi secara positif dan signifikan (Dewi et al., 2019).

KESIMPULAN

Pertama, Variabel investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti secara empiris. *Kedua,* Variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian terbukti secara empiris. *Ketiga,* Variabel konsumsi memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian terbukti secara empiris. *Keempat,* Secara simultan variabel investasi, inflasi dan konsumsi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu dapat artinya bahwa hipotesis terakhir pada penelitian ini terbukti secara empiris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan menggunakan objek pada provinsi Kalimantan selatan saja menjadikan penelitian ini belum memberikan gambaran yang bisa dijadikan acuan pada daerah-daerah lain di Indonesia. Penggunaan tiga variabel bebas di samping banyaknya variabel-variabel lain yang dapat dijadikan alat ukur pertumbuhan ekonomi juga menjadi keterbatasan yang nampak dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan daerah-daerah lain atau bahkan di negara lain guna mendapat gambaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Penggunaan variabel lain untuk mengukur pertumbuhan ekonomi juga sangat layak untuk dipertimbangkan, misalnya terkait jumlah hutang negara, angkatan kerja, kebijakan moneter dan fiskal serta lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, I., & Herawati, M. (2023). Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Di Negara Asean Tahun 2000-2019. *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, 217–223. https://doi.org/10.30998/kibar.27-10-2022.6316

Ain', N. N. (2021). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Al-Tsaman*, *1*(1), 162–169.

Alvaro, R. (2021). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Budget*, *6*(1).

Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *5*(1).

Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.* https://kalsel.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1757/pertumbuhan-ekonomi-kalimantan-selatan-triwulan-iv-2022.html

Christianingrum, R., & Syafri, R. A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inflasi Inti di Indonesia. *Jurnal Budget*, *4*(2), 18–39.

Dewi, S. S., Erfit, E., & Aminah, S. (2019). Analisis pengaruh konsumsi, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, *8*(2), 108–120. https://doi.org/10.22437/jels.v8i2.11987

Gandhi, E. A., Pasaribu, E., Ekaputri, R. A., & Febriani, R. E. (2022). Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Empiris Indonesia dan Singapura. *Ecoplan*, *5*(2), 159–170. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.563

Hamzah, S., Prestianawati, S. A., & Kusmawan, I. M. H. (2023). Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, *2*(1), 41–55.

Hasanah, U. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *47*(1), 239–268.

Hastin, M. (2022). Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Al-Dzahab*, *3*(1), 61–78. https://doi.org/10.32939/dhb.v3i1.1122

Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *INOVASI*, *13*(1), 28. https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490

Hidayat, A. A. N. (2021). *Perry Warjiyo Yakin Ekonomi RI 2022 Membaik karena Konsumsi Meningkat—Bisnis Tempo.co*. https://bisnis.tempo.co/read/1542863/perry-warjiyo-yakin-ekonomi-ri-2022-membaik-karena-konsumsi-meningkat

Koilam, C. T. C., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. I. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(5), 25–36.

Kurniawan, Y. (2020). Determinan PDRB dan Investasi di Indonesia: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, *1*(1).

Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *9*(1).

Mongan, J. J. S., & Saputra, P. M. A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di ASEAN 5. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, *1*(2).

Muryanto, T. D., Farida, Y., Ulinnuha, N., Khaulasari, H., & Yuliati, D. (2022). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Matematika Integratif*, *18*(2), 157. https://doi.org/10.24198/jmi.v18.n2.40732.157-166

N, N., Sentosa, S. U., & Idris, I. (2013). Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *2*(3), 110–122.

Nadzir, M., & Kenda, A. S. (2023). Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri: Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *14*(1), 317–328.

Nehemia, S. D., & Prasetiya, F. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Journal Of Development Economic and Social Studies*, *2*(1).

Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *2*(1), 53–61.

Noval, M., Raharjanti, R., & Ali, M. A. M. (2020). Ownership on Islamic Economic Perspective and Director Ownership on Sharia Companies with Moderation Roles of Independent Commissioners. *IKONOMIKA*, *5*(1), 17–42. https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.6309

Padli, P., Hailuddin, H., & Wahyunadi, W. (2020). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, *17*(2), 121–130.

Purnama, H. R., Pramukti, A., & Rahman, Z. (2022). Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, *5*(3), 36–43.

Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *13*(2), 95–104. https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625

Ronaldo, R. (2019). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Borobudur*, *21*(2), 137–153.

Sabyan, M., Herlin, F., & Wiarta, I. (2023). *Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi*. *12*(02).

Saefulloh, M. H. M., & Fahlevi, M. R. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 17–26.

Salim, A., Fadilla, & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *7*(1), 17–28.

Sihite, R. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. *Growth*, *2*(2), 125–136.

Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management*, *13*(3), 327–340.

Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, *2*(1), 81. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.33

Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, *3*(1), 29–50.

Takahindangen, W. C., Rotinsulu, D. C., & Tumilaar, R. L. H. (2021). Analisis Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pengemudi Ojek Online Grab sebelum dan Sesudah Menjadi Pengemudi Ojek Online di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(01), 37–46.

Tapparan, S. R. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tana Toraja. *Journal Ekonomika Lidikti*, *4*(2), 12–18.

Wadiniati, A., & Yasin, M. (2022). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2019. *Journal of Economics and Business UBS*, *11*, 1–7. https://doi.org/10.52644/joeb.v11i1.74

Yudanto, D., & Rochaida, E. (2020). Pengaruh pendapatan perkapita dan inflasi serta suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. *K I N E R J A*, *17*(2), 287–297.

Yulianus, J. (2024, February 13). *"Greenovation" Buka Peluang Transformasi Ekonomi Kalsel*. kompas.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/13/greenovation-buka-peluang-transformasi-ekonomi-kalsel

Yusup, A., & Istiqomah, I. (2022). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2018. *HUMANTECH Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, *2*(2), 358–369.

Zakaria, J. (2019). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Gaung Persada.

Analisa Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Yusman Dodi [1)], Retno Agustina Ekaputri [2)*], Izharudin [3)]
[1), 2), 3)] Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

[*] E-mail corresponding author: retnoae@unib.ac.id

Ecoplan

Submitted: Dec 03, 2023
Accepted: Apr 01, 2024
Published: Apr 29, 2024

Keywords:
Effectiveness; Program Rastra; the Welfare of Society

Abstract - *This study aims to analyze the effectiveness of the Rastra program in Batu Lungun Village, Nasal District. This study uses a descriptive qualitative approach. Data was collected by distributing questionnaires to 3 respondents from village officials, three from the Village Consultative Council, eight from Rastra entrepreneurs, and 30 from PPM Rastra. Data were collected through questionnaires distributed technique to 3 respondents from village officials, three respondents from the Village Consultative Body, eight from business Rastra, and 30 others from the Domestic Beneficiaries Rastra. Data was also collected through interview techniques from 1 respondent from village officials, one respondent from the Village Consultative Body, two respondents from Tim business Rastra, and three respondents from poor households. Data were analyzed using percentage analysis using a Likert scale and analysis of the interview results. The results showed that the effectiveness of the rice program for poor families (Rastra) has not been optimally achieved. Of 6 indicators of program success, Rastra, 3 of which have yet to reach both criteria. The indicator was on target, the right price and the right quality. Rastra channeled still not right given to Households that did meet the criteria for poor households, rice they received was also in poor condition, and redeemed at a price higher than the price determination Rastra general guidelines.*

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Rastra di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik kuesioner yang disebarkan kepada 44 responden dengan rincian 3 responden dari Aparat Desa, 3 responden dari Badan Permusyawaratan Desa, 8 responden dari Pengelola Rastra, serta 30 orang lainnya dari Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Rastra. Data juga dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada 7 responden dengan rincian 1 responden dari Aparat Desa, 1 responden dari Badan Permusyawaratan Desa, 2 responden dari Tim Pengelola Rastra, dan 3 orang dari Rumah Tangga Miskin. Selain itu data juga dihimpun melalui observasi dan dokumen-dokumen. Data dianalisis dengan teknik analisis persentase menggunakan skala likert, dan analisis hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Beras Sejahtera untuk keluarga miskin (Rastra) belum secara optimal dicapai. Dari 6 indikator keberhasilan program Rastra, 3 diantaranya masih belum mencapai kriteria baik. Indikator tersebut adalah tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas. Rastra yang disalurkan masih belum tepat diberikan kepada Rumah Tangga yang memang memenuhi kriteria sebagai Rumah Tangga Miskin, beras yang mereka terima juga dalam kondisi yang kurang baik seperti berhama dan bau, serta harga tebus yang lebih tinggi dari Rp.1600. Namun 3 indikator lainnya memenuhi kriteria, yaitu Rastra tepat diberikan sebesar 15 kg/perbulan dan diberikan selama 12 bulan, serta RTM membeli Rastra dengan cara tunai dari uang pribadi sendiri. Pelaksanaan program Rastra di daerah penelitian pada tahun 2018 telah memberikan bantuan Rastra yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjadi kelompok targetnya (kelompok RTM).

Kata Kunci: Efektivitas; Program Rastra; Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami banyak orang. Itu adalah sesuatu yang selalu ada, dan bisa sangat sulit untuk diatasi masyarakat, terutama di negara berkembang. Berbagai kalangan selalu berusaha mencari cara untuk mengatasinya, dan teori serta konsep baru tentang masalah kemiskinan terus dikembangkan. Di Indonesia, masalah kemiskinan juga menjadi sesuatu yang relevan guna ditinjau, karena sudah lama ada dan gejalanya semakin parah bahkan cenderung meningkat akibat krisis aspek ekonomi, sosial, budaya, politik yang dialami (Olakojo, Onanuga dan Onanuga, 2021).

Krisis ekonomi dimulai di Asia Tenggara dan sejak itu berkembang menjadi lebih rumit. Pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki masalah tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi yang semuanya ditujukan untuk memperbaiki keadaan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu masalah sentral yang dihadapi Indonesia ialah kemiskinan. Kemiskinan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan menyebabkan masyarakat tidak sejahtera (Purnomo dan Istiqomah, 2019).

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Pemerintah Indonesia memiliki sistem yang disebut negara kesejahteraan. Sistem ini berarti bahwa pemerintah membantu membuat negara menjadi lebih baik, dengan melakukan hal-hal seperti memajukan kesejahteraan umum dan menjamin perlindungan sosial masyarakat. Salah satu peran pemerintah yaitu membantu masyarakat dengan memberikan mereka bantuan, misalnya subsidi pangan. Pemerintah Indonesia memiliki dua program yang membantu masyarakat dalam situasi sangat miskin dan miskin. Yang pertama program Rastra, dan yang kedua program BPNT merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk pada kategori sangat miskin (Rachman, Agustian dan Wahyudi, 2018).

Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra – sebelumnya disebut Raskin). Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sementara Rastra merupakan subsidi pangan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi mereka (Kemenkeu, 2017). Di sisi lain, kesuksesan program-program ini merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kinerja pemerintah di tingkat daerah (Pasaribu, 2021) dan mengentaskan kemiskinan (Septriani *et al.*, 2020).

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan program pemerintah yang membantu keluarga miskin mendapatkan pangan. Hal itu dilakukan dengan menekan biaya pangan keluarga miskin, sekaligus memastikan semua keluarga memiliki akses pangan yang terjangkau (Pedoman Umum Bansos Rastra, 2018). Kemiskinan yaitu sebuah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup uang dalam memenuhi keperluan dasarnya. Hal ini dapat akibatkan oleh bermacam alasan, yaitu bencana alam, masalah ekonomi, atau kondisi sosial yang dibentuk oleh sejarah (Sawit, 2002; Tabor dan Sawit, 2006) (Departemen Dalam Negeri dan Bulog, 2006). Pada tahun 1998, pemerintah memulai program untuk membantu orang miskin dengan biaya makan mereka. Hal ini sebagai respons terhadap krisis keuangan yang berdampak luas pada perekonomian regional. Operasi Pasar Khusus (OPK) memungkinkan masyarakat untuk membeli berbagai makanan pokok, termasuk beras.

Pemerintah mulai membagikan beras bersubsidi ke pasar melalui OPK (Operasi Beras) beberapa tahun lalu. OPK mengalokasikan 10 kg beras untuk setiap keluarga, dengan harga tebus

1.000 rupiah per kilogram. Pemerintah menggunakan data dari survei untuk menentukan keluarga mana yang berhak menerima manfaat. Ada dua kelompok keluarga yang berhak mendapatkan manfaat OPK. Kelompok pertama adalah keluarga pra sejahtera, yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Anggota keluarga hanya makan dua kali sehari dan 2. mereka mempunyai pakaian berbeda yang hanya dipakai di rumah. 3. Lantai rumah maksimum terbuat dari plester. Kelompok kedua adalah keluarga sejahtera, yang mempunyai kriteria seperti berikut: (1) anggota keluarga hanya makan daging atau telur seminggu sekali, (2) tiap anggota keluarga hanya dapat membeli baju baru setahun sekali, dan (3) Luas lantai rumah per penghuni hanya 8 meter persegi.

Program Bansos Rastra dirancang dengan pendekatan *top-down*, dimana pembuat kebijakan pemerintah menetapkan kebijakan publik untuk membantu mengentaskan kemiskinan (Rachman, Agustian dan Wahyudi, 2018). Program ini mempengaruhi perilaku penerima yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga (Coulibaly, Li dan Wang, 2020). Kebijakan tersebut antara lain pembentukan lembaga perumus kebijakan bantuan sosial, penunjukan agen penyalur beras, dan pemanfaatan informasi statistik untuk memperkirakan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pemerintah mengasumsikan bahwa rata-rata jumlah orang dalam satu keluarga yaitu empat orang. Tahun 2005, pemerintah telah membuat program untuk mengurangi kemiskinan. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pemerintah telah membentuk tim untuk membantu mewujudkan tujuan ini. Tim ini disebut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Penelitian mengambil lokasi di Desa Serdang Indah karena Desa Serdang Indah adalah salah satu desa yang sangat membutuhkan bantuan Rastra. Dari 12 Desa di kecamatan Luas, Serdang Indah adalah desa termiskin dan mendapat alokasi Rastra paling banyak.

Tabel 1. Tabel Jumlah Rumah Tangga Sasaran, Penerima Manfaat (RTS-PM) Kecamatan Luas dan Kuantumnya

No	Kelurahan/Desa/Kecamatan	Jumlah RTSPM	Kuantum/Program
1	Benua Ratu	114	1710
2	Kepayang	98	1470
3	Pulau Panggung	46	690
4	Tuguk	61	915
5	Ganda Suli	100	1500
6	Tanjung Beringin	103	1545
7	Durian Besar	42	630
8	Padang Jati	34	510
9	Pasar Baru	39	585
10	Cahaya Negeri	115	1725
11	Bangun Jiwa	66	990
12	Serdang Indah	117	1755
Jumlah		**935**	**14025**

Sumber: Laporan Kecamatan Luas (2023)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Desa Serdang Indah adalah Desa paling Miskin dari 12 Desa yang di Kecamatan Luas sehingga jumlah penyaluran Rastra di Desa Serdang Indah terbanyak yaitu 117 RTM dengan pagu sebesar 1755. Jumlah penduduk di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Tahun 2018 sebanyak penduduk 1.663 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 939 jiwa, perempuan: 724 orang dan 489 KK. Dari hasil survey di Desa Serdang Indah terdapat 10 hektar Sawah dan keseluruhannya adalah sawah non irigasi/ sawah tadah hujan. Dalam rangka mempertahankan

keberlangsungan kehidupan mereka, warga masih mengandalkan sektor pertanian/perkebunan yang hanya memanfaatkan lahan kosong bertani padi darat/padi ladang. Akan tetapi bertani padi ladang tersebut tidak secara rutin dilakukan setiap tahun, dikarenakan hanya selingan di antara tanaman tahunan seperti tanaman karet, kopi dan kelapa sawit agar terlepas dari musuh seperti babi hutan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Penerima Rastra di Desa Serdang Indah

No	Tahun	Pagu (Kg)	RTS-PM
1	2016	2,63	175
2	2017	2,63	175
3	2018	1.88	125
4	2019	1,76	117
5	2020	1,76	117

Sumber: Laporan Kecamatan Luas (2023)

Dari tabel 2 terlihat bahwa adanya penurunan Pagu Rastra terhadap Penerima manfaat dimana Pada tahun 2018 Kabupaten Kaur mendapat alokasi penduduk miskin sebesar 8,680 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan pagu mencapai 1.562.400 ton. Dan Kecamatan Luas mendapat alokasi 1.401 RTS. Rumah Tangga Sasaran, Penerima Manfaat yang tercatat di Desa Serdang Indah Kecamatan Nasal sebanyak 175 RTS dengan pagu 2625 kg/Bulan sampai dengan Desember 2016. Pada Tahun 2017 terdapat penurunan sebanyak 125 RTS atau dengan pagu 1875 kg/Bulan hingga di Tahun 2018 dan 2019 terdapat penurun rastra yang diberikan pada RTS-PM sebanyak atau setara dengan 1755 Kg/bulan. Dengan jumlah RTS-PM 117 pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan berkurangnya penduduk miskin. Berdasarkan data dari Kantor Camat Luas Desa Serdang Indah mendapat alokasi rastra untuk didistribusikan kepada RTS-PM mengalami penurunan RTS-PM.

Untuk Program Rastra Di Desa Serdang Indah, masih ada beberapa rumah tangga yang tidak terdaftar pada pemerintah, atau tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Secara keseluruhan, sistem ini bekerja dengan belum baik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Program Rastra di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis seberapa baik implementasi program bantuan Rastra di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran rumah tangga/penerima, jumlah bantuan yang diberikan, harga bantuan, ketepatan waktu bantuan, kualitas bantuan, dan ketepatan administrasi program.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Dasar Manusia

Dewasa ini, Pemerintah Indonesia berusaha membantu orang-orang miskin dengan memastikan mereka memiliki cukup uang untuk membeli makanan, pakaian, dan hal-hal lain yang mereka butuhkan. Mereka menyebutnya "menyetarakan pendapatan orang". Artinya pemerintah membantu orang miskin dengan memberi mereka uang agar mereka bisa membeli barang yang mereka butuhkan.

Kebutuhan dasar menurut Gardner Murpy dalam Buchori (2008) di gambarkan atas empat kategori, yang pertama, kita perlu makan, minum, dan mendapatkan air yang cukup untuk tetap sehat. Kedua, aktivitas penting untuk menjaga kesehatan kita. Itu membantu kita tetap aktif dan bersemangat, dan itu membuat kita merasa baik. Ketiga, kebutuhan *Sensory* adalah hal-hal seperti kebutuhan akan warna, suara, dan ritme. Keempat, kita terkadang harus menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti rasa sakit, senjata, dan ketakutan. Ini karena mereka bisa berbahaya atau membuat kita merasa tidak nyaman.

Menurut Henry Murray dalam Buchori (2008) kebutuhan diklasifikasikan menjadi *Primary needs* dan *Secondary needs*. *Primary needs* adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Ini termasuk hal-hal seperti makanan, air, udara, dan seks. *Secondary needs* adalah oang membutuhkan hal yang berbeda untuk merasa bahagia, puas, dan aman. Hal-hal yang didasarkan

pada perasaan orang di lingkungan tempat tinggalnya, seperti rasa percaya diri, dihormati, dan dicintai. Beberapa kebutuhan mungkin khusus untuk kepribadian atau temperamen seseorang, seperti kebutuhan untuk merasa memegang kendali atau kebutuhan untuk mengeksplorasi dan belajar. Terakhir, beberapa orang mungkin memerlukan bantuan dari orang lain agar merasa bahagia, terpenuhi, dan aman, seperti memiliki teman, menerima persetujuan dari orang lain, atau diperhatikan.

Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, yakni yang pertama, penyakit. Ketika suatu penyakit hadir dalam tubuh, maka dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik. Ini dapat memiliki efek fisik dan psikologis. Misalnya, beberapa organ tubuh mungkin memerlukan lebih banyak makanan, air, atau oksigen agar dapat berfungsi dengan baik. Kedua, Hubungan Keluarga. Keluarga yang rukun dapat membantu orang merasa lebih puas dengan kehidupan mereka karena mereka saling percaya, menikmati kebersamaan satu sama lain, dan tidak saling curiga. Ketiga, Konsep Diri. Konsep diri seseorang banyak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Konsep diri yang sehat membuat orang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, yang membuatnya lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Keempat, Tahap Perkembangan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan mereka berubah. Ketika orang tumbuh dan berkembang, mereka membutuhkan hal yang berbeda, seperti kebutuhan psikologis, biologis, sosial, dan spiritual. Beberapa dari kebutuhan ini dapat berubah seiring pertumbuhan orang, berdasarkan apa yang mereka lakukan dan berapa usia mereka (Nurlina *et al.*, 2019).

Kemiskinan dan Kesejahteraan

Peristiwa kemiskinan telah sering ditemukan pada kehidupan sebagian masyarakat, bahkan hingga saat ini dan masalah ini sering muncul di wilayah terpencil (Desmawan *et al.*, 2021). Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki cukup uang atau harta benda untuk hidup nyaman (Prasetyo, 2010; Morris, Santos dan Neumeyer, 2020; Pham, 2022). Ini dapat memiliki dimensi yang berbeda, seperti kekurangan uang, ketidakberdayaan, kerentanan terhadap keadaan darurat, dan ketergantungan pada orang lain. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan lokasi (secara geografis dan sosial), dan dapat menjadi banyak hal berbeda bagi orang yang berbeda. Menurut Yulianto (2005), kemiskinan yakni kekurangan barang serta jasa yang diperlukan guna memenuhi sebuah taraf hidup yang baik.

Berdasarkan Perpres No 7 Tahun 2005 mengenai RPJMN, kemiskinan adalah Ketika seseorang atau sesuatu tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan, mereka tidak dapat melakukannya dengan baik untuk hidup nyaman (Faharuddin dan Endrawati, 2022). Hal ini bisa disebabkan oleh mereka tidak memiliki cukup uang atau beberapa orang memiliki lebih banyak kesempatan daripada yang lain, dan hal ini berarti tidak mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain (Ridlo, 2001). Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah jika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang yang mereka butuhkan, mereka mungkin berada dalam situasi keuangan (Nugroho dan Dahuri, 2004). Dari segi sosial, kemiskinan berarti seseorang tidak mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Ekonom politik mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat kemandirian masyarakat yang rendah (Pasaribu, Anitasari dan Gunawan, 2020).

Kemiskinan juga disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan keterampilan, yang berarti bahwa sebagian orang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Artinya, orang miskin tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dilakukan orang lain, sehingga sulit bagi mereka untuk menghasilkan uang. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya uang, pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan. Orang miskin sendiri mengatakan alasan utamanya adalah karena terlalu sedikit sumber daya (seperti uang) dan tidak cukup pekerjaan yang baik (Indika dan Marliza, 2019). Kuncoro (2004) mendapati pemicu kemiskinan dilihat dari perspektif ekonomi. Pertama, pola kepemilikan sumber daya yang tidak setara menyebabkan perputaran pemasukan yang tidak merata. Kedua, divergensi mutu sumber daya manusia terkait dengan rendahnya produktivitas dan upah. Ketiga, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap modal.

Menurut Suryawati (2005) ada empat bentuk pada pembagian kemiskinan, yang pertama, kemiskinan absolut, keadaan dimana seseorang mempunyai pemasukan di bawah garis kemiskinan. Ini berarti mereka tidak memiliki cukup uang guna mencukupi keperluan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kemiskinan relatif, ketika seseorang memiliki lebih sedikit uang daripada orang lain. Terkadang ini bisa terjadi karena hal-hal di luar kendali mereka, seperti ekonomi. Dalam beberapa kasus, orang mungkin menjadi miskin karena hal-hal yang telah mereka lakukan, seperti kurang bekerja keras. Kemiskinan merupakan masalah yang mempengaruhi semua orang di dunia, tidak peduli seberapa kaya atau miskinnya mereka. Ketiga, kemiskinan kultural, berarti bahwa orang atau masyarakat memiliki sikap negatif terhadap peningkatan kehidupan mereka, karena latar belakang budaya mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh hal seperti tidak mau mencoba hal baru, malas dan boros, dan tidak kreatif padahal ada hal yang bisa dilakukan untuk membantu. Keempat, kemiskinan struktural, adalah masalah yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya, yang sering kali menyebabkan orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah masalah yang tidak hanya terbatas pada satu bagian dunia, tetapi terlihat di masyarakat yang berbeda.

Dalam mengukur pemahaman pembangunan terdapat tiga aspek yang menjadi komponen yakni kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) serta kebebasan *(freedom*). Tiga maksud utama tersebut yang perlu dituju oleh setiap orang serta masyarakat adalah meningkatkan kesehatan, pendapatan, dan tingkat pendidikan penduduk; memperbaiki lingkungan dan perumahan masyarakat; dan memelihara kondisi sosial dan budaya (Sugiharti *et al.*, 2022).

Efektivitas Program Rastra

Orang yang berbeda melihat keefektifan dengan cara yang berbeda. Ini dapat bergantung pada sudut pandang dan minat mereka. Efektif berarti memiliki dampak yang dapat menghasilkan hasil. Sementara itu, efektivitas yang didefinisikan oleh bahasa adalah memiliki hasil yang dapat digunakan yang mendukung tujuan. Efektivitas adalah ukuran seberapa baik kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas adalah ukuran seberapa baik kita mencapai tujuan kita. Efektivitas diukur dari seberapa besar kita mencapai indikator kita (yang telah ditetapkan). Bisa dikatakan efektif jika Jumlah minimum yang dapat Anda hasilkan adalah 1%, dan jumlah maksimum yang dapat Anda peroleh adalah 100% (Sugiyono, 2012).

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) memberikan bantuan sembako berupa beras yang akan disalurkan setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kristianto, 2018). Program Subsidi Beras membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan beras yang cukup untuk makan. Program ini terdiri dari berbagai bagian dari berbagai instansi pemerintah, namun semuanya bekerja sama untuk membantu mewujudkannya. Pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program ini seefektif mungkin.

Program subsidi beras membantu keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan makanan yang lebih terjangkau. Program tersebut telah diganti namanya, tetapi tujuannya tetap sama - untuk membantu keluarga miskin. Ketua Edhy Prabowo dari Komisi IV mengatakan, nama itu diubah menjadi lebih santun, namun program tersebut tetap membantu keluarga miskin.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Rastra dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai hasil Musyawarah desa/Kelurahan dan disahkan oleh camat sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) (Pedum, 2013).

Program Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras, sedangkan sasaran Program Rastra, adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600 per Kg netto ditingkat distribusi. Implementasi program Rastra di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan efektivitas Program Rastra, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, baik ditingkat Pusat dan Daerah, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas program Rastra.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bungkaes et al., (2013) dengan hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada hubungan antara efektivitas pengeluaran Program rastra dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pitapurwati (2014) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yakni kekurangan serta kelemahan yang mengakibatkan tidak berhasilnya indikator 6 yang benar pada penerapan distribusi Rastra, kurangnya support dari pemerintah kabupaten, terdapat data yang tidak benar dari RTS-PM Rastra, kurangnya diskusi desa/kelurahan, minimnya kualitas pengetahuan para pelaksana, rendahnya kontrol serta keterbukaan penyelenggara serta pemeroleh program, dan kecilnya mentalitas serta moral para penerima. Pratiwi (2016) juga melakukan penelitian dengan hasil bahwa Program Rastra tidak terlaksana dengan baik, hanya mencakup dua indikator, yakni harga serta tata kelola yang baik. Pelaksanaan program Rastra tidak menunjukan kesejahteraan rakyat

METODE PENELITIAN/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menghimpun data tentang perilaku masyarakat. Data ini digunakan untuk memahami bagaimana perilaku masyarakat. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yang berasal dari responden melalui teknik wawancara dan angket, serta data sekunder yang merupakan data yang diambil dari catatan, dokumentasi yang dikumpulkan melalui teknik survei dan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi yang tidak dipilih secara acak. Teknik ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengumpulan data dari orang atau benda yang tidak dipilih secara acak dimungkinkan jika orang atau benda yang dipilih untuk dijadikan sampel kebetulan memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. (Sugiyono, 2009). Mengacu pada konsep di atas maka populasi dan sampel dalam penelitian adalah sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3. Jumlah Populasi dan Sampel Untuk Mengisi Kuesioner dan Wawancara

No	Pekerjaan	Jumlah Populasi	Sampel Kuisioner	Sampel Wawancara
1	Perangkat Desa	5 orang	3 Orang	1 Orang
2	Badan Permusyawaratan Desa	5 orang	3 Orang	1 Orang
3	Tim Rastra	8 orang	8 Orang	2 Orang
4	Penerima Rastra	117 orang	30 Orang	3 Orang
Jumlah		**135 orang**	**44 orang**	**7 Orang**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa dan pengurus serta anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang di dalamnya termasuk Tim Rastra tingkat desa, yang sesuai hasil survei berjumlah lebih-kurang 18 orang, sedangkan jumlah keluarga miskin penerima manfaat program Rastra sebanyak 117 RTM.

Teknik sampling akan digunakan karena besarnya objek penelitian dan adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan suatu penelitian terhadap keseluruhan objek penelitian. Teknik yang digunakan penulis adalah nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel dengan cara incidental sampling yaitu pengambilan sampel secara non random atau tidak secara acak. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2012).

Teknik ini penulis gunakan dengan pertimbangan bahwa penerima Rastra tersebar di beberapa dusun, hingga penulis hanya mengambil sampel yang berada di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas saja. Susahnya bertemu dengan para penerima Rastra karena mereka ditinggal

di sawah atau kebun yang sulit dijangkau juga menjadi pertimbangan untuk mengambil sampel yang kebetulan bertemu penulis saja.

Untuk pengumpulan data melalui kuesioner sampel dari unsur aparat atau perangkat desa sebanyak 3 dari 5 orang, dari Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 3 dari 5 orang, dari tim pengelola Rastra sebanyak 8 dari 8 orang dan unsur masyarakat penerima manfaat program Rastra sebanyak 30 dari 117 RTM. Dengan demikian besar sampel keseluruhan sebanyak 44 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Dari unsur Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa diambil sampel, mengingat peran mereka tidak terlalu signifikan dalam pelaksanaan distribusi Rastra, sedangkan dari unsur Tim Rastra diambil seluruh populasi karena mereka yang mengurus pengelolaan program Rastra. Dan Penerima Rastra diambil sampel sebesar 25 % karena jumlah populasi lebih dari 100.

Sedangkan untuk pengumpulan data melalui wawancara, sampel yang di ambil dari unsur aparat atau perangkat desa sebanyak 1 orang, dari unsur Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 orang, dari tim pengelola sebanyak 2 orang dan dari unsur Rumah Tangga Miskin sebanyak 3 orang. Dengan demikian besar sampel keseluruhan yang dijadikan responden adalah 7 orang. Hal ini mengingat keterbatasan waktu penulis dalam mewawancarai seluruh unsur terkait.

Dalam penelitian ini, evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dapat diukur dari indikator yakni Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Setiap rumah tangga menerima 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi. Kemudian Evaluasi pelaksanaan program Beras Sejahtera dapat dilihat dari beberapa indikator yang pertama, Tepat Sasaran Penerima Manfaat yakni rastra harus diberikan kepada RTS-PM. Rastra hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1. Kedua, Tepat Jumlah yakni jumlah beras Rastra yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional 15 Kg. Ketiga, Tepat Harga yakni Harga Tebus Rastra adalah sebesar Rp 1.600/Kg netto di TD. Keempat, Tepat Waktu yakni Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Rastra sesuai dengan rencana distribusi. Kelima, Tepat Administrasi yakni terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Keenam, Tepat Kualitas yakni terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan tandar kualitas beras Bulog.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas program Rastra digunakan teknik analisis persentase dari jawaban angket responden menggunakan skala likert dan analisis hasil wawancara. Skala Likert merupakan skala yang digunakan pada kuesioner yang biasa digunakan pada survei. Ini adalah skala yang paling banyak dimanfaatkan pada penelitian survei. Skala ini biasa digunakan pada jenis penelitian survei deskriptif (Gambaran). Sebagian orang menganggap pernyataan itu benar, dan sebagian lagi menganggap pernyataan itu tidak benar. Tahap-tahap metode deskriptif persentase dengan skala likert yang pertama, disediakan lima pilihan skala pernyataan dengan format Skor 1 = Sangat Tidak Tepat, Skor 2 = Tidak Tepat, Skor 3 = Kurang Tepat, Skor 4 = Tepat, dan Skor 5 = Sangat Tepat. Dengan Rumus : Jumlah responden yang memilih x Pilihan angka likert. Kedua, memasukkan hasil Skor ke dalam rumus :

$$\text{Range} = \frac{\text{Nilai Tertinggi-Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

Tabel 4. Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Angka	Keterangan
1-1,8	Sangat Tidak Efektif
1,81 – 2,6	Kurang Efektif
2,61 – 3,4	Cukup Efektif
3,41 – 4,2	Efektif
4,21 –5	Sangat Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis data, setiap pertanyaan diubah menjadi tabel, yang merupakan cara menghitung berapa banyak orang yang menjawab pertanyaan itu. Tabel 5 menunjukkan hasil.

Tabel 5. Indikator Tepat Sasaran

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	**Tepat Sasaran**							
1	Mempunyai Tempat Tinggal kurang dari 8m2 per orang?			10	30	4	2,1	Kurang Efektif
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester?			11	33		2,3	Kurang Efektif
3	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester?			10	34		2,2	Kurang Efektif
4	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain?			31	13		2,7	Cukup Efektif
5	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik?				40	4	1,9	Kurang Efektif
6	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai?	5	7	32			3,4	Cukup Efektif
7	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah?			8	25	11	1,9	Kurang Efektif
8	Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu?		30	10	4		3,6	Efektif
9	Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun?			25	15	4	2,5	Kurang Efektif
10	Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari?			30	14		2,7	Cukup Efektif
11	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik?		10	18	16		2,9	Cukup Efektif

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
12	Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 per bulan?			5	35	4	2,0	Kurang Efektif
13	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD dan hanya SD?		10	28	6		3,1	Cukup Efektif
14	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti: sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal laninya?		15	15	14		3,0	Cukup Efektif
		5	72	233	279	27	2,6	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 kriteria Tepat Sasaran 7 kriteria masih di bawah skor rata-rata 2,6 sedangkan 7 kriteria lainnya mencapai skor di atas 2,61 atau di bawah angka 3,4. Ini menggambarkan bahwa efektivitas program Rastra dari ketepatan sasaran masih belum tepat sasaran, Rastra yang diberikan hendaknya ditujukan kepada Keluarga Miskin yang mempunyai Sebuah rumah kecil tidak memiliki banyak ruang lantai. Namun sebagian besar responden yakni sebanyak 30 responden menjawab tidak tepat dengan skorrata-rata 2,1.

Kriteria luas lantai bangunan harusnya berlantaikan Tanah/Rumbia/kayu yang berkualitas rendah namun lebih dari ½ Responden menjawab tidak tepat yaitu sebanyak 33 responden. Dari segi dinding tempat tinggal, mereka yang menerima Rastra harusnya mempunyai tempat tinggal yang terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah namun 34 responden menjawab tidak tepat, tempat tinggal juga harusnya tidak memiliki fasilitas Buang air, 31 responden menjawab kurang tepat.

Sumber penerangan tempat tinggal pun harusnya harusnya tidak menggunakan listrik, namun hampir seluruh responden menjawab tidak tepat yakni sebanyak 40 responden. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari hanyalah kayu bakar namun tidak ada responden yang menjawab tepat, sebagian responden menjawab tidak tepat dengan 25 responden bahkan 11 responden menjawab tidak tepat.

Harusnya keluarga penerima Rastra hanya membeli 1 stel pakaian dalam setahun dan hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali sehari, namun lebih dari ½ responden yang menjawab kurang tepat yaitu 25 responden dan Mereka yang menerima Rastra harusnya berpenghasilan di bawah Rp600.000/bulan, namun sebagian besar responden menjawab tidak tepat yakni sebanyak 35 responden.

Tabel 6. Indikator Tepat Jumlah

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	RTM menerima Rastra sebanyak 15 Kg/bulan?	14	30				4,3	Sangat Efektif
		14	30				4,3	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pada tabel 6 salah satu indikator efektivitasnya Program Rastra bahwa Rastra yang diberikan kepada RTM berjumlah 15 kg/bulan, 14 responden menjawab Jumlah Rastra yang diberikan sangat tepat jumlah dan 30 responden menjawab tepat dan tidak ada responden menjawab kurang tepat atau tidak tepat. Ini menunjukkan bahwa program Rastra dari segi jumlah sudah tepat diberikan sesuai dengan rata-rata skor yang diperoleh dari jawaban responden adalah sebanyak 4,3.

Tabel 7. Indikator Tepat Harga

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	RTM membeli Rastra seharga Rp. 1600/Kg?			10	30	4	2,1	Kurang Efektif
				10	30	4	2,1	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Dapat dilihat dari tabel 7 tentang efektivitas program Rastra dari aspek ketepatan harga, bahwa sebagian besar responden menjawab tidak tepat yaitu 30 responden, sebagian kecil responden menjawab kurang tepat yaitu 10 responden dan sedikit sekali yang menjawab sangat tidak tepat yaitu hanya 4 responden, atas jawaban dari responden tersebut menggambarkan bahwa harga Rastra yang harus di tebus oleh RTM adalah tidak tepat harga atau harga tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang tertuang dalam Pedum Rastra yakni Rp1600/kg.

Tabel 8. Indikator Tepat Waktu

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	RTM menerima Rastra selama 12 kali dalam setahun?	9	32	2	1		4,9	Sangat Efektif
		9	32	2	1		4,9	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pada tabel 8 diperoleh gambaran mengenai efektivitas program Rastra dari aspek ketepatan waktu adalah tepat yakni selama 12 x dalam setahun dengan waktu pendistribusian 3 bulan sekali,

sesuai dengan hasil perhitungan dari jawaban responden bahwa rata- rata skor yang diperoleh yakni 4,9 ini menunjukkan bahwa dari jawaban responden Rastra didistribusikan sudah tepat waktu terlihat dari 32 responden menjawab tepat, sedikit responden menjawab sangat tepat yaitu 9 responden, sedikit sekali responden menjawab kurang tepat yaitu 2 responden dan sedikit sekali yang menjawab tidak tepat yaitu hanya 1 responden.

Tabel 9. Indikator Tepat Kualitas

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	RTM menerima Rastra kualitas medium			26	14	4	2,5	Kurang Efektif
2	RTM menerima Rastra tidak berbau			30	14		2,7	Cukup Efektif
3	RTM menerima Rastra tak berhama			18	22	4	2,3	Kurang Efektif
				74	50	8	7,5	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa efektivitas program Rastra dari aspek kualitas sesuai dengan jawaban responden adalah belum tepat, hal ini terlihat dari peroleh skor rata-rata dari 3 kriteria tepat kualitas yakni 2,5, ini menggambarkan bahwa kualitas Beras yang disalurkan kepada Masyarakat Miskin adalah Beras berkualitas Rendah, ini terlihat dari jawaban responden Pada aspek beras dengan kualitas medium, 26 responden menjawab kurang tepat atau dengan perolehan skor rata- rata 2.5, pada aspek beras tak berbau lebih dari setengah responden menjawab kurang tepat yaitu 30 responden atau dengan skor rata – rata 2.7 dan setengah dari responden menjawab tidak tepat pada aspek beras tidak berhama yaitu 22 Responden dengan perolehan skor rata – rata 2.3.

Tabel 10. Indikator Tepat Administrasi

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Rata-Rata	Ket.
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	Sangat Tidak Tepat		
		5	4	3	2	1		
1	RM membeli Rastra secara tunai menggunakan uang pribadi?	8	32	2	2		4,9	Sangat Efektif
		8	32	2	2		4,9	

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Pada tabel 10 dari aspek ketepatan administrasi diperoleh skor rata-rata 4,9 di mana sebagian besar responden menjawab tepat yaitu sebanyak 32 responden, sebagian kecil responden menjawab sangat tepat yakni sebanyak 8 responden, sedikit sekali yang menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 2 responden dan sedikit sekali responden yang menjawab tidak tepat yaitu 2 responden.

Hasil penelitian menemukan bahwa program pengelolaan Rastra di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur secara umum tidak efektif dalam mencapai targetnya. Dari 44 responden yang mengisi kuesioner, rata-rata skor untuk aspek tepat sasaran adalah 2,6, skor rata-rata untuk aspek jumlah yang tepat adalah 4,3, skor rata-rata untuk aspek harga yang tepat adalah 2,1, skor rata-rata untuk ketepatan waktu. aspek kualitas yang tepat adalah 4,9, dan skor rata-rata

untuk aspek kualitas yang tepat adalah 2,5. Namun program pengelolaan Rastra sangat efektif dalam mencapai target aspek administrasi yang tepat dengan skor 4,9.

Namun data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan program Rastra di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas belum sepenuhnya efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sengkey, *et.al.*, 2018), Penelitian ini di indikasikan terjadinya penurunan Pagu rastra kepada Penerima Manfaat bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Desa Serdang Indah namun pada hasil penelitian di gambarkan bahwa Tidak tepatnya sasaran dikarenakan adanya ketidaktepatan harga yang tidak sesuai dengan Pedum rastra yakni Rp. 2.000 – 2.500/kg sehingga menyusahkan RTM untuk menebus Beras tersebut dan mengakibatkan kualitas beras menjadi lebih buruk dikarenakan lamanya penyimpanan beras yang belum juga ditebus oleh RTM sehingga Tim Rastra mengalihkan kepada mereka yang mampu untuk menebus Beras tersebut meskipun tidak termasuk dalam kriteria Penerima Manfaat Rastra sehingga mengakibatkan perubahan Nama daftar penerima manfaat hingga terjadi penurunan Pagu Rastra seperti yang telah terjadi pada Tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 – 2020 seperti terlihat dalam tabel 2.

Program Rastra belum mampu memastikan pemahaman dan kesadaran yang baik tentang sifat program. Jumlah rumah tangga yang akan menerima distribusi beras dari pemerintah dibatasi. Penanggung jawab distribusi beras tidak terafiliasi dengan lembaga, sehingga tidak jelas apa peran, tanggung jawab dan evaluasi kinerjanya. Pemerintah hanya menghitung rumah tangga terverifikasi sebagai bagian dari batas, tetapi mereka tidak memantau atau mengevaluasi proses distribusi dengan sangat serius. Pemerintah juga seharusnya membagikan hasil pemantauan kepada pihak lain, seperti masyarakat umum.

Sedangkan analisis hasil wawancara penulis dengan 3 responden dari penerima manfaat Rastra dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan keefektifan dari enam indikator yang diteliti. Indikator yang belum sepenuhnya efektif yaitu tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas. Kurang tepatnya sasaran penyaluran Rastra kepada Rumah Tangga yang memang miskin menyebabkan harga beras untuk keluarga miskin juga tidak sesuai dengan pedoman Rastra. Jika RTM dipaksakan, harga rastra akan lebih tinggi bagi rumah tangga miskin, tetapi mereka tetap akan membelinya karena harganya di bawah harga pasar. Namun, untuk rumah tangga yang lebih miskin, perbedaan harga antara rastra dan harga pasar bisa jauh lebih tinggi, sehingga mereka masih dapat membeli 100kg meskipun harganya lebih mahal.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara menurut 3 responden dari Rumah Tangga penerima manfaat, tiga indikator keberhasilan Rastra dikategorikan baik. Rastra sudah diberikan tepat waktu selama 12 kali dalam setahun meskipun terkadang pendistribusiannya tidak pada waktu yang sama setiap bulan. Rastra juga sudah diberikan tepat jumlah yaitu 15 Kg/bulan, tidak ada penerima manfaat Rastra yang menerima lebih atau kurang dari 15 kg. Dan Rastra sudah diberikan tepat administrasi yaitu ditebus tunai dengan menggunakan uang pribadi oleh penerima manfaat Rastra.

Menurut hasil wawancara dengan perangkat desa dan badan musyawarah desa, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan desa/kabupaten belum bisa membantu Program dukungan membantu untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan sukses. Rastra yang merupakan bagian mengaktifkan kegiatan anti ketidakmampuan. Program Rastra dirancang untuk memberikan beras kepada orang yang paling membutuhkan, tetapi beberapa orang mengeluhkan bahwa beras terlalu sering diberikan kepada orang yang lebih mampu. Pejabat sedang mencoba untuk memperbaikinya dengan membuat target lebih spesifik, tetapi ini terbukti sulit karena kelompok yang berbeda tampaknya tidak bekerja sama dengan baik.

Harga Rastra yang tidak sesuai juga menyebabkan lamanya Rastra ditebus oleh rumah tangga penerima manfaat, hingga Rastra terletak begitu lama di tempat yang tidak baik dan menyebabkan Rastra menjadi berkutu, bau dan berwarna kuning. Kualitas beras buruk yang diterima seperti berkutu, bau dan berwarna kuning tidak sesuai dengan kualitas beras Bulog. Meski beras tersebut masih layak dikonsumsi, tapi seharusnya beras yang sampai ke tangan RTSPM dalam keadaan baik, hingga dapat bermanfaat dalam mengatasi gizi buruk di daerah tersebut. Rastra yang diberikan sebanyak 12 kali dengan pagu 15 kg/bulan, harus ditebus tunai oleh Rumah Tangga penerima manfaat Rastra.

KESIMPULAN

Sebaran skor variabel efektivitas pengelolaan program Rastra pada tiap indikator berbeda, berdasarkan perolehan skor rata-rata pada aspek tepat sasaran berada pada kategori kurang Efektiv dengan skor rata-rata 2,6, aspek tepat jumlah berada pada kategori sangat Efektiv dengan skor rata-rata 4,3, aspek tepat harga berada pada kategori kurang Efektiv dengan skor rata-rata 2,1 atau, aspek tepat waktu berada pada kategori Efektiv dengan skor rata-rata 4,9, aspek tepat kualitas berada pada kategori kurang Efektiv dengan skor rata-rata 2,5 dan aspek tepat administrasi berada pada kategori sangat Efektiv dengan skor 4,9.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Beras Sejahtera untuk keluarga miskin (Rastra) belum secara optimal dicapai. Dari 6 indikator keberhasilan program Rastra, 3 diantaranya masih belum mencapai kriteria baik. Indikator tersebut adalah tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas. Rastra yang disalurkan masih belum tepat diberikan kepada Rumah Tangga yang memang memenuhi kriteria sebagai Rumah Tangga Miskin, beras yang mereka terima juga dalam kondisi yang kurang baik seperti berhama dan bau, serta harga tebus yang lebih tinggi dari Rp.1600. Namun 3 indikator lainnya memenuhi kriteria, yaitu Rastra tepat diberikan sebesar 15 kg/perbulan dan diberikan selama 12 bulan, serta RTM membeli beras untuk keluarga miskin dengan cara tunai dari uang pribadi sendiri. Pelaksanaan program Rastra di daerah penelitian pada tahun 2018 telah memberikan bantuan Rastra yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang menjadi kelompok targetnya (kelompok RTM).

DAFTAR PUSTAKA

Buchori, M. (2008) *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Bulog (2006) *Prosiding Lokakarya Peningkatan Efektivitas Raskin Untuk Memenuhi Hak Pangan Rumah Tangga Miskin*. Jakarta.

Bungkaes, H. R., Posumah, J. H. and Kiyai Burhanuddin (2013) 'Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud', *Journal Acta Diurna*, (April), 1–23.

Coulibaly, B., Li, S. and Wang, Z. (2020) 'Rice Farmer's Poverty And Its Determinants: Evidence From Dogofiri Village Of Office Du Niger Zone In Mali', *Ciencia Rural*, 50(2).

Departemen Dalam Negeri & Bulog. (2013) *No Titlepedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013*. Jakarta.

Desmawan, D. *et al.* (2021) 'Determinant Factors Poverty Of Relativity In Banten Province: A Panel Data Analysis', *Ecoplan*, 4(2), 131–141.

Faharuddin, F. And Endrawati, D. (2022) 'Determinants Of Working Poverty In Indonesia', *Journal Of Economics And Development*, 24(3).

Indika, M. and Marliza, Y. (2019) 'Upaya Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas', *Jurnal Mbia*, 18(3), Pp. 49–66. Doi: 10.33557/Mbia.V18i3.598.

Kristianto Hondro, R. (2018) 'MABAC: Pemilihan Penerima Bantuan Rastra Menggunakan Metode Multiattributive Border Approximation Area Comparison', *Jurnal Mahajana Informasi*, 3(1), 41–52.

Kuncoro, M. (2004) *Otonomi Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Morris, M. H., Santos, S. C. and Neumeyer, X. (2020) 'Entrepreneurship As A Solution To Poverty In Developed Economies', *Business Horizons*, 63(3).

Nugroho, I. and Dahuri, R. (2004) *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Nurlina *et al.* (2019) 'Analysis Of Structural Poverty Trend Among Rice Farmers In East Aceh Regency, Indonesia', *Global Business And Finance Review*, 24(1).

Olakojo, S. A., Onanuga, A. T. and Onanuga, O. T. (2021) 'Cyclical Fluctuations Of Economic Growth And Monetary Policy In Nigeria: Does Fiscal Policy Also Matter?', *Journal Of*

Contemporary African Studies, 39(1).
Pasaribu, E. (2021) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal', *Akuntabilitas*. Doi: 10.29259/Ja.V15i1.12054.
Pasaribu, E., Anitasari, M. and Gunawan, R. (2020) 'A Shift Share Analysis On Regional Competitiveness – A Case Of Bengkulu Province ', *International Journal Of Social Science Research*, 2(1), 99–108.
Pham, T. H. H. (2022) 'Shadow Economy And Poverty: What Causes What?', *Journal Of Economic Inequality*, 20(4).
Pitapurwati, W. (2014) *Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanuddin.
Prasetyo, A. A. (2010) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Universitas Diponegoro.
Pratiwi, R. (2016) *Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkankesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Purnomo, S. D. And Istiqomah, I. (2019) 'Economic Growth And Poverty: The Mediating Effect Of Employment', *Jejak*, 12(1).
Rachman, B., Agustian, A. and Wahyudi (2018) 'Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt)', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18.
Ridlo, M. A. (2001) *Kemiskinan Di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
Sawit, H. (2002) *Raskin : Sebuah Program Perlindungan Sosial, Majalah Pangan*.
Sengkey, N., Sendouw, R. H. And Mantiri, J. (2018) 'Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Civic Education*, 2(1), 15–24.
Septriani *et al.* (2020) 'Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu', *Akuntabilitas*, 14(1), 33–56.
Sugiharti, L. *et al.* (2022) 'Poverty Dynamics In Indonesia: The Prevalence And Causes Of Chronic Poverty', *Journal Of Population And Social Studies*, 30.
Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2012) *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Suryawati, C. (2005) *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
Tabor, S. R. And Sawit, M. H. (2006) *Program Bantuan Natura Raskin Dan Opk: Penilaian Makro*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perum Bulog.
Yulianto, T. (2005) *Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Klaten*. Universitas Diponegoro.

Ecoplan Vol. 7 No. 1, April 2024, p. 30-39
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Pengaruh Kelayakan Hidup Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 10 Provinsi Termiskin Di Indonesia

Eliza Clara Yeremia Sagala [1)*], Masruri Muchtar[2)], Pardomuan Robinson Sihombing[3)]
[1)2)] Prodi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
[3)] Badan Pusat Statistik, Indonesia

[*] E-mail corresponding author: eliza.sagala@kemenkeu.go.id

Ecoplan

Submitted: Jan 25, 2024
Accepted: Apr 01, 2024
Published: Apr 29, 2024

Keywords: ***Human Development Index; Gross Regional Domestic Product; Poorest Province; Poverty Rate; Provincial Minimum Wage***

Abstract *- To get out of the Middle-Income Trap, Indonesian economic growth must be consistently above 6% annually. In addition, the reduction in poverty rates is also an important indicator that Indonesia will emerge from this trap. The study aims to determine the impact of Provincial Minimum Wage (UMP), Gross Regional Domestic Product (PDRB), and Human Development Index (IPM) on Poverty Rate in the ten poorest provinces in Indonesia. Using data from the Badan Pusat Statistik for 2012-2022, this research adopts linear regression of multiple data panels. The results show that all variables simultaneously affect the poverty rate significantly. Partially, UMP positively and significantly impacts the poverty rate, while IPM has a negative effect. PDRB has no significant influence on the poverty rate. It implies that the government should review the increase in UMP to stay at the point of balance. Economic growth must consider the level of well-being of all segments of society.*

Abstrak - Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus konsisten di atas 6% per tahun untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap*. Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan juga indikator yang penting bagi Indonesia untuk keluar dari *trap* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendapatan Daerah Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan terhadap Tingkat Kemiskinan di 10 Provinsi termiskin di Indonesia. Menggunakan data dari Badan Pusat Statistik periode 2012-2022 dan metode penelitian asosiatif kuantitatif dengan regresi linier berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel berpengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sementara IPM berpengaruh negatif. PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menunjukkan bahwa pemerintah harus meninjau kenaikan UMP agar tetap pada titik keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan tingkat kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Domestik Regional Bruto; Provinsi Termiskin; Tingkat Kemiskinan; Upah Minimum Provinsi

PENDAHULUAN

Indonesia menargetkan untuk keluar dari *middle income trap* (MIT) pada tahun 2036, yang mana hal ini merupakan tantangan yang berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus konsisten di atas 6 persen per tahun (Puspita et al., 2022). Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan juga indikator yang penting bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap.* Berdasarkan jurnal (Maryanti et al., 2023), Indonesia bisa keluar dari MIT dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7%. Dinyatakan dalam penelitian Agus Triono & Sangaji (2023), tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,5%. Adapun 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel 1. Penulis menggunakan data pada tahun 2022 agar sesuai dengan kondisi terkini. Untuk itu diperlukan upaya yang optimal oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1. Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi pada Tahun 2022

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)
Papua	26,68
Papua Barat	21,38
Nusa Tenggara Timur	20,14
Maluku	16,1
Gorontalo	15,465
Aceh	14,695
Bengkulu	14,48
Nusa Tenggara Barat	13,75
Sulawesi Tengah	12,315
Sumatera Selatan	11,925

Sumber: BPS (2023)

Prayoga (2021) menyatakan kemiskinan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti upah minimum yang tidak layak serta taraf hidup masyarakat yang rendah. Soal upah minimum, dalam penelitian yang dilakukan oleh Paramita Rastri (2021) menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan pekerja sehingga diharapkan tingkat kemiskinan dapat berkurang. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan variabel UMP untuk mengetahui langkah yang tepat bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yakni dengan menaikkan atau menurunkan UMP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Suman (2017) kenaikan upah minimum mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan. Serupa dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2016) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum menyebabkan tingkat kemiskinan bertambah. Hal ini dijelaskan oleh Pamungkas & Suman (2017) bahwa kenaikan UMP menyebabkan pengangguran meningkat sehingga tingkat kemiskinan semakin bertambah.

Taraf hidup masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Suryani et al. (2023), menyatakan hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Madan (2014) dan Prasetyoningrum (2018) menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan variabel IPM untuk mengetahui langkah yang tepat bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain kedua aspek di atas, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam pemahaman pertumbuhan ekonomi tradisional, terdapat argumen yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat akan berdampak buruk bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan terkadang pertumbuhan yang ada akan menyebabkan masyarakat miskin terlupakan dan dianggap tidak penting *(marginalized)* dalam perubahan struktural pertumbuhan modern (Todaro & Smith, 2012).

Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2016) menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Suryani et al., (2023) di Sumatera Utara bahwa peningkatan PDRB mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2012). Variabel PDRB menjadi sangat penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menaikkan tingkat kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu cenderung menyampaikan kenaikan upah minimum mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan, kenaikan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Walaupun terdapat kecenderungan penelitian namun beberapa penelitian yang disampaikan di atas masih ditemukan hasil yang beragam dan berbeda. Untuk itu pembahasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Pendapatan Domestik dan Regional Bruto, perlu dilakukan. Todaro & Smith (2012) menyatakan kaum marginal akan semakin tertinggal jika pertumbuhan ekonomi tumbuh begitu pesat. Banyak penelitian yang membahas mengenai variabel-variabel di atas namun masih terbatas yang fokus pada 10 provinsi termiskin di Indonesia sehingga penelitian ini berfokus pada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi gap penelitian yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kebutuhan dari sisi ekonomi seperti makanan dan bukan makanan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Isu kemiskinan sering menjadi topik utama dalam permasalahan suatu negara (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Penelitian ini menjadikan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependen dimana variabel independen yang akan diteliti adalah Upah Minimum Provinsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Upah Minimum melalui Kementerian Tenaga Kerja. Pada tahun 2012 hingga 2022, UMP seluruh di Indonesia cenderung naik kecuali pada tahun 2020 dikarenakan dampak Covid-19. Upah Minimum disesuaikan dengan tujuan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak namun tetap memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Utomo, 2022). Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan oleh pelaku usaha atau industri untuk memberikan upah kepada pegawai di tempat usahanya. Upah yang diberikan biasanya dalam bentuk uang sebagai balasan atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan (Setiawan, 2014). Terdapat hubungan positif signifikan antara Upah Minimum dan tingkat kemiskinan (Campos-Vazquez & Esquivel, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia, menunjukkan kenaikan upah minimum juga mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan (Pamungkas & Suman, 2017).

Hubungan upah minimum dan tingkat kemiskinan juga dijelaskan dalam beberapa teori ekonomi. Salah satunya dalam teori *neoclassical*, respon perusahaan terhadap kenaikan upah adalah melakukan pemberhentian kerja atau mensubtitusi tenaga kerja dengan kemampuan yang lebih rendah sehingga dapat memberikan upah yang lebih rendah. Karena adanya pemberhentian kerja membuat tingkat pengangguran meningkat sehingga dampaknya kemiskinan pun juga meningkat (Giuliano, 2009). Argumen ini juga didukung oleh Todaro (2012) yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum di sektor formal akan menyebabkan jumlah pegawai yang diperkerjakan menjadi lebih sedikit, dampaknya mereka mencari pekerjaan ke sektor informal. Karena *supply* tenaga kerja di sektor informal bertambah akibatnya tingkat upah di sektor informal juga mengalami penurunan.

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan nilai tambah jasa atau barang dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Romhadhoni

et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Malaysia (Škare & Pržiklas Družeta, 2016) pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Sementara, yang dilakukan di Jawa Timur tahun 2008-2013 menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan (Aprilia, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian dalam dimensi utama pembangunan manusia seperti umur yang panjang, kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Pengukuran IPM salah satunya menggunakan pendekatan *Human Development* yang merupakan pendekatan yang berfokus pada manusia dan kemampuan mereka dalam menangkap peluang. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan membuat semua orang merasakan dampak dari pertumbuhan. Sehingga ketika *Human Development Index* seseorang rendah itu berarti sulit untuk merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Panjawa et al., (2023) dan Mukhtar et al., (2019) menyatakan bahwa IPM mempunyai hubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Serupa dengan penelitian oleh Prasetyoningrum (2018) menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis dalam penelituan ini yaitu kenaikan upah minimum dan PDRB mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan sementara kenaikan IPM mengakibatkan berkurangnya tingkat kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode asosiatif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan antar suatu variabel dependen dengan variabel independen. Sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan kurun waktu selama 11 tahun pada 2012-2022 di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Variabel Tingkat Kemiskinan Provinsi merupakan Persentase Penduduk Miskin. Menggunakan alat analisis berupa Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel dependen dan independen yang digunakan dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Dependen	**Satuan**	**Skala Data**	**Transformasi Data**
Tingkat Kemiskinan Provinsi	Persen	Rasio	-
Variabel Independen	**Satuan**	**Skala Data**	**Transformasi Data**
Upah Minimum Provinsi	Poin	Rasio	Logaritma Natural
Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	Rasio	-
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	Poin	Rasio	-

Sumber: Data diolah (2024)

Data diolah menggunakan aplikasi *Stata 18* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y_{it} = \alpha + \beta_1 LnUMP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Y_{it} = Tingkat Kemiskinan Provinsi
α = Konstanta
β_1 = Koefisien Upah Minimum Provinsi
β_2 = Koefisien Laju Pertumbuhan PDRB
β_3 = Koefisien Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
$LnUMP_{it}$ = Upah Minimum Provinsi (poin)
$PDRB_{it}$ = Laju Pertumbuhan PDRB (persen)
IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (poin)
ε_{it} = Residual

Sebelum melakukan pemilihan model dan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan apakah parameter model bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) (Sihombing, 2021). Uji yang dimaksud berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi dengan detil pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	H0	H1
Skewness and Kurtosis Tests	Data terdistribusi normal	Data tidak terdistribusi normal
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	Varian data Homoskedastis	Varian data Heteroskedastis
Woolridge test	Model tidak autokorelasi	Model autokorelasi
Variance Inflation Factor (VIF)	<10	≥10
	Data tidak multikolinear	Data bermasalah multikolinear

Sumber: Data diolah (2024)

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dalam penelitian data panel perlu dilakukan pemilihan model terlebih dahulu. Umumnya terdapat tiga pendekatan model yang di antaranya adalah *Common Effects atau Pooled Effects (PE), Fixed Effects (FE), dan Random Effects (RE)* (Sihombing, 2021). Terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan untuk menentukan model yang akan digunakan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Model Regresi Data Panel

Metode Pengujian	Perbandingan Model	H0	H1
Chow Test	PE dan FE	PE	FE
Lagrange Multiplier (LM) Test	PE dan RE	PE	FE
Hausman Test	FE dan RE	RE	FE

Sumber: Data diolah (2024)

Setelah dilakukan pemilihan model, perlu dilakukan tes *Goodness of Fit (GOF)* guna menilai seberapa cocok model tersebut dengan serangkaian observasi(Narimawati & Sarwono, 2022). Detil uji GOF yang dimaksud dijelaskan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Goodness of Fit

Uji GOF	H0	H1
Uji Parsial	Variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh	Variabel Independen secara parsial berpengaruh
Uji Simultan	Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh	Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh

Sumber: Data diolah (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran informasi secara ringkas, pembahasan diawali dengan analisis deskriptif atas setiap variabel dalam penelitian sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tabel Deskripsi Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kemiskinan	11,93	31,33	18,38	4,73
Upah Minimum Provinsi	837.500	3.516.700	2.031.122	660.474,1
Laju Pertumbuhan PDRB	-15,74	21,76	5,00	4,37
Indeks Pembangunan Manusia	55,55	72,80	66,37	3,84

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan terendah di antara 10 Provinsi tersebut sebesar 11,93% yaitu provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dan tertinggi sebesar 31,33% yaitu provinsi Papua pada tahun 2013. Tingkat Kemiskinan secara keseluruhan tiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan suatu perbaikan. Perbaikan juga terjadi pada kenaikan IPM setiap tahunnya, IPM terendah yaitu Provinsi Papua dengan 55,55 pada tahun 2012 dan tertinggi yaitu provinsi Aceh sebesar 72,8 pada tahun 2022.

Upah Minimum Provinsi terendah sebesar Rp 837.500 pada provinsi Gorontalo tahun 2012 dan tertinggi sebesar Rp 3.516.700 pada provinsi Papua tahun 2021. UMP selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 di mana UMP tetap jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 (Tridiani & Tanur, 2022). Sementara Laju Pertumbuhan PDRB kerap fluktuatif namun cenderung naik. Pertumbuhan terendah yaitu sebesar -15,74% pada provinsi Papua tahun 2019 karena adanya penurunan produksi tambang di Freeport (Putri, 2020) dan tertinggi sebesar 21,76% pada provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 dimana merupakan yang terbaik di kancah nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor luar negeri yang tumbuh hingga 289 persen (Databoks, 2016).

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik bahwa model lolos uji heterokedastisitas dan uji multikolienar namun tidak lolos uji normalitas dan uji autokorelasi sebagaimana pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	**Prob > chi^2**	**Interpretasi**
Skewness and Kurtosis Tests	0,0000	Tidak Terdistribusi Normal
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	0,0531	Homoskedastis
Woolridge test	0,0001	Autokorelasi
	VIF	Interpretasi
Variance Inflation Factor (VIF)	1,09	Tidak Multikolienar

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil pengujian model regresi data panel yang terbaik yaitu menggunakan model Random Effect atau RE dapat terlihat pada tabel 8.

Tabel 8. Pengujian Model Regresi Data Panel

Metode Pengujian	**Perbandingan Model**	**Prob**	**Model Terpilih**
Chow Test	Pooled Effect dan Fixed Effect	0,0000	Fixed Effect
Lagrange Multiplier (LM) Test	Pooled Effect dan Random Effect	0,0000	Random Effect
Hausman Test	Fixed Effect dan Random Effect	0,2693	Random Effect

Sumber: Data diolah (2024)

Namun berdasarkan uji asumsi klasik, model tidak memenuhi uji normalitas dan uji autokorelasi. Maka untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan model Generalizes Estimating Equation (GEE) (Sihombing, 2021). Hasil regresi dari model GEE tersaji sebagaimana pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Regresi

Variabel	**Coefficient**	**Prob**
Cons	50,10	0,000
Upah Minimum Provinsi	2,48	0,000
Laju Pertumbuhan PDRB	0,01	0,469
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	-1,02	0,000
Prob > chi2		0,000

Sumber: Data diolah (2024)

Adapun hasil regresi pada tabel 7 memiliki bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 50.1 + 2.48LnUMP_{it} + 1.02PDRB_{it}$$

Hasil regresi sebagaimana pada tabel 7 menunjukkan Prob > chi2 berada di bawah nilai alpha yakni sebesar 0,000. Yang berarti secara simultan, Upah Minimum Provinsi, Laju Perumbuhan PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi mempengaruhi secara signifikan Tingkat Kemiskinan di 10 Provinsi tersebut. Uji secara parsial menunjukkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi berpengaruh signifikan sementara secara parsial Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Uji parsial yang dilakukan pada Upah Minimum Provinsi menunjukkan hasil bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang berarti kenaikan UMP akan membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dimana kenaikan UMP sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 2,48%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Campos-Vazquez & Esquivel (2023) dan Pamungkas & Suman (2017). Dalam penelitian tersebut, kenaikan upah minimum mengakibatkan tingkat pengangguran yang bertambah sehingga tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pengangguran tersebut diakibatkan oleh kenaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tidak dapat mengatasi penambahan biaya operasional dampak dari kenaikan UMP (Pratama, 2022).

Hasil penelitian serupa dengan teori *neoclassical*, yang menyatakan respon perusahaan terhadap kenaikan upah adalah melakukan pemberhentian kerja atau mengganti tenaga kerja yang lebih murah (Giuliano, 2009). Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum menjadi beban bagi pelaku usaha. Biaya produksi yang dikeluarkan menjadi lebih besar sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi termasuk dalam hal tenaga kerja.

Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil bahwa Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiny (2018) dan Astuti (2018). Temuan World Bank (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Todaro menyatakan hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mempertimbangkan ketimpangan pendapatan (Todaro & Smith, 2012).

Badan Pusat Statistik Papua (2018) menyebut faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua walaupun pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat adalah karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. Fenomena ini semakin memperkuat teori bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan upaya perbaikan kesejahteraan sebaiknya dilakukan sistematis serta melihat detil permasalahan secara rinci, sinergi lintas sektor sangat diperlukan dalam hal ini.

Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Sementara uji parsial pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di 10 provinsi tersebut. Di mana kenaikan IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,02%. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Panjawa et al., (2023), dan Prasetyoningrum (2018). Penurunan tingkat kemiskinan karena kenaikan IPM mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan produktivitas maka pendapatan juga turut meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang layak (Panjawa et al., 2023). Penelitian terkait IPM dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Papua menunjukkan hasil yang sejalan. Angka Harapan Hidup (AHH) di Papua mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 64,31% menjadi 65,79% pada tahun 2020. AHH merupakan salah satu parameter dalam penghitungan IPM di bidang kesehatan selain tingkat ketercukupan nutrisi, tingkat fertilitas, dan tingkat mortalitas anak di bawah umur lima tahun (Florencia & Karmini, 2021).

Hasil ini sesuai dengan pendekatan *Human Development*, yang mana semakin baik kualitas hidup manusia maka akan semakin mampu untuk dapat menerima manfaat dalam pertumbuhan ekonomi. Alhasil, memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di Papua sebagai provinsi termiskin. Indikator terkait kualitas hidup manusia di Papua masih rendah walaupun PDB per kapitanya tinggi. Dikutip dari Bappenas (2015), Provinsi Papua memiliki peringkat terendah dalam hal rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi kasar. Bahkan dalam bidang kesehatan, indeks persentase balita yang proses kelahirannya ditolong tenaga kesehatan sangat rendah sementara perngkat gizi buruk di Papua tertinggi.

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan, Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *neoclassical* yakni karena adanya pemberhentian kerja membuat tingkat pengangguran meningkat sehingga dampaknya kemiskinan pun juga meningkat (Giuliano, 2009). Dalam penelitian ini kenaikan PDRB menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan sebagaimana telah disampaikan teori bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat akan berdampak buruk bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan terkadang pertumbuhan yang ada akan menyebabkan masyarakat miskin terlupakan dan dianggap tidak penting *(marginalized)* dalam perubahan struktural pertumbuhan modern (Todaro & Smith, 2012).

Upah Minimum yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja namun memiliki dampak naiknya tingkat kemiskinan. Pemerintah harus meninjau kembali kenaikan UMP pada sepuluh provinsi tersebut agar tetap berada pada titik keseimbangan sehingga kenaikan UMP tidak mengakibatkan naiknya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini PDRB, juga harus memperhatikan ketimpangan yang ada sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Bidang-bidang yang menjadi komponen penghitungan dalam IPM (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Terbukti kenaikan IPM dapat menurunkan kemiskinan.

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat keterbatasan data pada tahun 2023 dan penggunaan variabel yang masih terbatas, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berkaitan dengan capaian pembangunan manusia yang berdasar pada komponen dasar kualitas hidup. Seperti tingkat Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pengeluaran sehingga dapat melihat komponen yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga pemerintah dapat mengadakan program berkaitan yang tepat sasaran. Kesepuluh provinsi termiskin di Indonesia layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan jika pemerintah sungguh-sungguh untuk keluar dari *Middle Income Trap* pada tahun 2036.

DAFTAR PUSTAKA

Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*.

Aprilia, R. D. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2008-2013.*

Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, *1*(3). https://doi.org/10.32493/JJSDM.v1i3.1286

Bappenas. (2015). *Soal Ketimpangan Pembangunan, Papua Perlu Perhatian Khusus*. https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/soal-ketimpangan-pembangunan-papua-perlu-perhatian-khusus

Campos-Vazquez, R. M., & Esquivel, G. (2023). The Effect of the Minimum Wage on Poverty: Evidence from a Quasi-Experiment in Mexico. *The Journal of Development Studies*, *59*(3), 360–380. https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2130056

Databoks. (2016). *Ekonomi Nusa Tenggara Barat Menjadi yang Terbaik di Indonesia*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/01/ekonomi-nusa-tenggara-barat-menjadi-yang-terbaik-di-indonesia

Florencia, E., & Karmini, N. L. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua . *E-Jumal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* .

Giuliano, L. (2009). *Minimum wage effects on employment, substitution, and the teenage labor supply: Evidence from personnel data* .

Madan, S. (2014). Human Development and Poverty – a Perspective Across Indian States. *Statitiska*.

Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan : Journal Of Economics And Development Studies*, *2*(2), 77–89. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20

Narimawati, U., & Sarwono, J. (2022). *Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis Partial Least Square Dalam Pls Sem*.

Pamungkas, P. A., & Suman, A. (2017). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016*.

Panjawa, J. L., Sugiharti, R., Kurniawan, M. A., & Jalunggono, G. (2023). *Is there any relation between human development and poverty in Eastern Indonesia?* 020025. https://doi.org/10.1063/5.0154798

Paramita Rastri. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget*.

Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Sukmawati, U. Sulia* .

Pratama, W. P. (2022). *UMP 2023 Naik 10 Persen, Bakal Banyak Perusahaan PHK Karyawan?*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/9/1601247/ump-2023-naik-10-persen-bakal-banyak-perusahaan-phk-karyawan

Prayoga, L. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*.

Putri, C. P. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Papua 2019 Minus 15,72%, Gegara Freeport*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200205142934-4-135483/pertumbuhan-ekonomi-papua-2019-minus-1572-gegara-freeport

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, *14*(2). https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.113-120

Setiawan, H. (2014). *Analisis Pengaruh Upah MInimum Provinsi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta*.

Sihombing, P. R. (2021). *Corat Coret Catatan Statistisi Pemula*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Škare, M., & Pržiklas Družeta, R. (2016). Poverty And Economic Growth: A Review. *Technological and Economic Development of Economy*, *22*(1), 156–175. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965

Suryani, Sholiha, S. F., Sendi, M., & Silalahi, P. R. (2023). Pengaruh Ipm Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Ekonomi Tingkat Rendah (Miskin) Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3*(1).

Todaro, M. P. , & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. Addison-Wesley.

Tridiani, C., & Tanur, E. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Transisi Tenaga Kerja Sektor Formal. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan,* .

Utomo, G. P. (2022). *Penetapan Upah Minimum Provinsi Yang Berkeadilan Bagi Pekerja Dan Pengusaha*.

Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhikemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahunterakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)* .

Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Difabel *Cerebral Palsy* melalui Program Jombang Sehat: Studi pada BAZNAS Jombang

Ayus Rahma Yundha[1)*], Luluk Hanifah [2)]
[1)] Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
[2)] Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

[*]E-mail Coresponding Author: 200721100020@student.trunojoyo.ac.id

Ecoplan

Submitted: Feb 15, 2024
Accepted: Apr 01, 2024
Published: Apr 27, 2024

Abstract *- Cerebral palsy is a child with special needs where cerebral paralysis occurs, which causes disturbances in the development and growth processes both physically and emotionally. People with cerebral palsy require special attention and regular care, which requires assistance. So, based on this problem, researchers want to examine how much ZIS funds are utilized for people with cerebral palsy, specifically in the Jombang Regency area. The type of research used is a descriptive qualitative approach. Descriptive qualitative research is a type of research in which a researcher investigates events and phenomena in the lives of individuals and asks a person or group of individuals to talk about their lives. The information obtained by the researcher is retold. by researchers in descriptive chronology. In this research, the data used is qualitative data sourced from primary data and secondary data. Primary data is collected through interviews and documents, and secondary data is analyzed through financial reports and annual magazines at BAZNAS Jombang Regency. This research shows that the distribution of Zakat, Infaq, and Alms at BAZNAS Jombang Regency has a role in improving the welfare of mustahiks who suffer from cerebral palsy. This role includes providing milk or nutritional assistance, vitamins, snacks, leg support, routine therapy every week, and helping the mustahik's daily economy.*

Keywords: ***Role of BAZNAS;ZIS;Well-being;Cerebral palsy***

Abstrak – *Cerebral palsy* merupakan anak berkebutuhan khusus dimana terjadi kelumpuhan otak yang menyebabkan gangguan proses perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik maupun emosional. Penyandang *cerebral palsy* membutuhkan perhatian khusus dan perawatan secara rutin yang membutuhkan adanya bantuan. Sehingga dari permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengkaji seberapa besar pemanfaatan dana ZIS untuk penyandang *cerebral palsy* khusus wilayah Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian dimana di dalamnya seorang peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka kemudian informasi yang didapat oleh peneliti diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan data primer melalui wawancara, dokumen dan data sekunder melalui menganalisis laporan keuangan, buku majalah tahunan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki peran untuk mensejahterakan mustahik yang menderita penyakit *cerebral palsy*. Diamana peran tersebut meliputi pemberian susu atau bantuan gizi, vitamin, jajan, alat penyangga kaki lalu pemberian terapi rutin setiap minggunya, serta membantu perekonomian mustahik dalam sehari-harinya.

Kata Kunci: Peran BAZNAS; ZIS; Kesejahteraan; *Cerebral palsy*

PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah penyandang difabel pada tahun 2023 mencapai 22,9 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia, dengan jumlah terbanyak adalah lansia (Supanji, 2023). penyandang difabel juga mengalami berbagai resiko social ekonomi berupa keterbatasan akses terhadap informasi, akses terhadap kesempatan pekerjaan, akses terhadapan Pendidikan, dan akses terhadap kondisi Kesehatan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur, bahwa Kabupaten Jombang pada tahun 2018 penyandang difabel mencapai angka 256 jiwa (Timur, 2018). Dari tingginya jumlah penyandang difabel salah satu penyebabnya dikarenakan minimnya sarpras bagi penyandang difabel yang membuat mereka sulit untuk mengembangkan ketrampilan atau kemampuan serta minimnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan, sehingga membuat mereka susah untuk mewujudkan kesejahteraannya (Ambarwati & Fatah, 2022).

Oleh karena itu dibutuhkan penuh dan efektif Lembaga yang bisa membantu meringankan baik biaya maupun bantuan lainnya, maka BAZNAS bisa dijadikan Solusi untuk permasalahan tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menhimpun dana dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada Tingkat nasional (RI, 2023). Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang ini, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Junaidi, 2023). Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat, adalah setiap orang yang dalam jangka waktu lama mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak dan mentalitas. Sebagian penyandang difabel di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dan hak-hak penyandang difabel dikurangi atau dihilangkan. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan berguna untuk mewujudkan persamaan dan kesempatan untuk penyandang difabel agar menjamin kehidupan mereka lebih sejahtera dan mandiri tanpa diskriminasi (Widjaja dkk., 2020).

Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam mempunyai ajaran untuk tolong menolong orang-orang yang tidak berdaya yang normanya tersebar luas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dan pemanfaatan ZIS merupakan cara Islam dalam membantu masyarakat yang tak berdaya. Menunaikan ZIS merupakan kewajiban umat muslim, karena menurut ajaran Islam sudah jelas bahwa penggunaan harta untuk pembayaran ZIS tidak sedikitpun berkurang justru ia akan jauh berlipat-lipat ganda banyaknya didunia dan diakhirat. Wanita yang menafkahkan hartanya dijalan Allah ibarat benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Dimana pada setiap tangkainya terdapat seratus biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang di kehendaki-Nya dan Allah maha luas karunia dan maha mengetahui (Zabir dkk, 2017). Zakat ialah alat terpenting bagi Islam, yang dimana merupakan salah satu rukun Islam. Fungsi zakat sendiri dapat menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi umat Islam. Zakat sebagai bagian kekayaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah untuk dibagikan kepada orang-orang yang dikategorikan layak yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, 2022). Kesejahteraan dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer seperti sandang, pangan dan papan yang dalam suatu negara dapat berperan secara tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pokok manusia, kecuali jika individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat ini sering disebut dalam Al-Qur'an dalam sejumlah penyebutan shalat Allah memerintahkan mengeluarkan zakat sama dengan perintah menunaikan sholat. Zakat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan keadilan sosial, mendorong pembangunan ekonomi di negara ini, salah satunya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan (Muzwir Luntajo Institut Agama Islam Negeri Manado dkk., 2023).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang atau sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten Jombang turut berperan hadir dalam membantu mensejahterakan penyandang difabel yang membutuhkan bantuan didalam bidang kesehatan jenis bantuan ini yaitu merupakan bantuan Program Bidang Kesehatan atau sering disebut dengan Program Jombang Sehat, untuk itu BAZNAS

Kabupaten Jombang ikut serta dalam membantu anak-anak penyandang *cerebral palsy* dengan penyalurkan bantuan gizi, bantuan fisioterapi, bantuan obat meskipun tidak bisa sembuh dengan obat tetapi bisa dengan fisioterapi. Jadi dengan cara mendatangkan atau kerjasama dengan terapinya yang setiap bulan dua atau sampai lima kali untuk penggunaan dananya itu dengan dana ZIS, dengan dana tersebut mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraan.

Maka dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut akan peran zakat, infaq dan sedekah dalam mensejahterakan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat. Dengan adanya program Jombang Sehat penyaluran ZIS berupa bantuan gizi, bantuan fisioterapi, bantuan biaya operasional pengobatan dan bantuan pengadaan alat bantu kesehatan seperti penyangga kaki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati & Fatah (2022) yang berjudul "Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel *Creative Center* Daarut Tauhid Peduli Jakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari mustahik meskipun tidak terlalu signifikan. Selain itu pada penelitian ini diperoleh temuan yang mana program ini mengalami kegagalan dikarenakan para mustahik kurang memahami pembukuan serta uang hasil usaha dipergunakan untuk kebutuhan lainnya (Ambarwati & Fatah, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2022) yang berjudul "Analisis Peranan Zakat Produktif melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik". Dalam program Lapak Berkah memberikan andil besar bagi mustahik penyandang disabilitas fasilitas dan bantuan modal usaha untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan usaha dan pembukaan usaha baru (Sholikhah et al., 2022). Penelitian lain dilakukan oleh Yaumul Haeriyah (2022) yang berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Parepare". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaatnya antara lain yaitu bebas dari hutang konsumtif, memiliki tabungan dan mempunyai percaya diri dalam berbisnis atau berusaha yang mana dana ZIS yang diberikan dapat dikelola secara produktif agar kemudian memberikan hasil yang lebih banyak dan bersifat berkelanjutan. Dan apabila kegiatan produktif tersebut terus saja berkembang menjadi lebih baik maka akan perdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi mustahik, yang mana hal tersebut bisa merubah posisi penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Yaumul Haeriyah, 2022).

Dimana terdapat persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tentang pendistribusian dan ZIS dimana pendistribusian tersebut memiliki tujuan untuk kegiatan yang produktif seperti memberikan bantuan usaha bagi para mustahik penyandang difabel. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah difokuskan pada pendistribusian yang sifatnya hanya bantuan dan objek penelitian kali ini berada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada pendistribusian dana ZIS bertujuan untuk mensejahterakan penyandang difabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat merupakan rukun Islam ke 4 yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mana mereka harus membelanjakan Sebagian hartanya dan menyalurkan kepada 8 ASNAF (Syamsuri et al., 2023). Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Zakat juga dapat diartikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban terhadap sesame manusia. Jika dilihat dari segi kebahasaan, asal kata zakat adalah *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Al-Arab, arti dasar kata zakat ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, berkembangkan atau tumbuh, berkah dan terpuji dimana semua itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat juga berarti salah satu filantropi Islam yang mempunyai potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik dan profesional, zakat tentunya akan membantu masyarakat mengatasi permasalahan ekonomi seperti konsumsi, biaya perjalanan mudik, dan mengentaskan kemiskinan (Qadariyah, 2022). Dilihat dari sudut pandang ekonomi, zakat adalah sebuah pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonominya berkurang, namun logika ini terbantahkan oleh Allah SWT, melalui kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, itu nantinya akan tergantikan (M

Muallifurrahmi A, 2019). Dimana zakat juga dapat disimpulkan dengan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan sosial dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat atau hukum Islam. Sebagai upaya menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap setiap individu muslim yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan zakat, kekayaan tidak akan menumpuk pada orang-orang tertentu. Namun disalurkan secara adil ke seluruh tingkatan masyarakat terutama masyarakat miskin (Hammam & Choiri, 2021).

Infaq dapat diartikan induk dari ketiga istilah ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu intinya infaq adalah membayar dengan harta, mengelurkan harta dan membelanjakan harta tujuannya bisa untuk kbaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keingan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq, perbedaan zakat dengan infaq terletak pada nishabnya, dimana pada zakat terdapat nishab sedangkan infaq tidak memiliki batas nishab (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Sedekah adalah pemberian harta kepada fakir atau miskin, orang yang membutuhkan ataupun pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan apapun (Zulkifli, 2020).

Cerebral palsy

Cerebral palsy (CP) merupakan akibat dari kerusakan otak atau cacat otak yang paling sering terjadi pada saat seseorang masih dalam kandungan atau saat dilahirkan, meskipun ada beberapa kasus penderita *cerebral palsy* bukan merupakan kelainan bawaan, yang menyebabkan rusaknya jaringan pada otak yaitu jaringan motorik atau jaringan penghubung, terjadi dimasa prenatal, ketika persalinan atau ketika proses pembentukan sistem saraf pusat yang mengakibatkan kelumpuhan dan kelainan fungsi motorik. Anak penderita *cerebral palsy* akan mengalami kendala atau gangguan pada pergerakannya (Anindita et al., 2019). *Cerebral palsy* merupakan jenis kecacatan yang berkaitan dengan gangguan sistem motorik yang diakibatkan oleh kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan sistem motorik. Anak penyandang *cerebral palsy* mengalami ketergantungan pada orang lain, terlebih orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Faisyahril et al., 2023).

Faktor penyebab penderita *cerebral palsy* diantaranya adalah faktor prenatal, faktor kelahiran, dan faktor postnatal atau setelah lahir, tanda yang dialami penderita *cerebral palsy* ialah dimana penderita mengalami keterlambatan perkembangan pada usia kurang dari dua tahun (Sulistyawati & Mansur, 2019).

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu rahmatan lil ‘alamin yang diajarkan Islam salah satunya dalam bidang ekonomi. Akan tetapi kesejahteraan yang terkandung dalam Al-Qur’an merupakan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah SWT supaya manusia bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya (Suardi, 2021).

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi bahwa kesejahteraan adalah hak setiap warga negara atau kesejahteraan setiap orang. Berdasarkan filosofi tersebut, masyarakat miskin adalah warga negara Indonesia pada umumnya, mereka mempunyai hak untuk hidup sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, dan sosial untuk dapat mengembangkan diri dan hidup layak, serta mampu menjalankan kapasitas sosialnya. Pada kenyataannya, kesejahteraan seseorang mempunyai banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering berubahan seiring berjalannya waktu (Sukmasari, 2020). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan sebagai landasan mencapai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, diperlukan suatu indikator. Indikator kesejahteraan masyarakat bersifat cukup luas atau multidimensi sekaligus kompleks sehingga suatu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat di evaluasi melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari indikator ketenagakerjaan, indikator pendidikan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Bustamam et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian di mana didalamnya seorang peneliti menyelidiki kejadian, fenomena dalam kehidupan seseorang dan meminta seseorang atau sekelompok orang

untuk menceritakan tentang kehidupannya, kemudian informasi yang diperoleh peneliti diceritakan kembali oleh peneliti secara deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lalu dikumpulkan dari studi kasus terdahulu atau publikasi ilmiah lainnya baik dokumentasi ataupun arsip resmi. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh seseorang atau organisasi langsung dari objek yang diteliti dan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan berupa interview atau wawancara, observasi (Situmorang & Lufti, 2014). Dimana dalam penelitian data sekunder diperoleh dari pihak laporan keuangan, buku, majalah tahunan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan data primer diperoleh dari metode wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti kepada Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang yaitu Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, antara lain: *Pertama*, wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara lisan oleh peneliti yang didalamnya memiliki tiga bentuk atau cara yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Suyitno, 2018). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan untuk nantinya ditanyakan kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu apt. Lilies Purwanto S.Si (Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang).

Kedua, dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang berupa kegiatan peneliti selama penelitian, arsip BAZNAS Kabupaten Jombang dan laporan kegiatan maupun keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang yang dibutuhkan untuk meneliti terkait untuk peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* pada program Jombang Sehat.

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Hubberman, teknik analisis penelitian kualitatif ada 4 yaitu sebagai berikut:

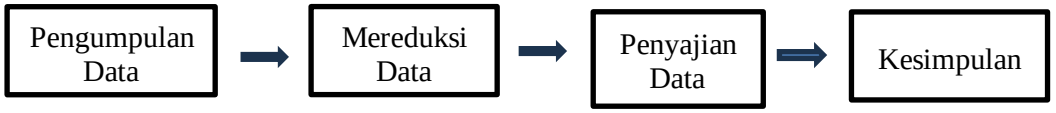

Bagan 1. Teknik Analisis Data

Pertama pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara dan dapat juga melalui kegiatan dokumentasi yang bersumber dari kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan juga dari arsip, laporan keuangan dan dokumen lain yang diperlukan untuk penelitian. *Kedua*, mereduksi data yang berarti merangkum, memilih sesuatu, kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah terangkum akan memberikan kejelasan sehingga memudahkan peneliti untuk terus mengumpulkan data selanjutnya. *Ketiga*, penyajian data ini merupakan hasil informasi yang diperoleh dari wawancara kepada Kepala Divisi Kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang, penyajian data sendiri iala kumpulan hasil yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari hasil wawancara dilapangan. *Keempat* adalah melakukan penarikan kesimpulan, tahap akhir berupa deskripsi data peneliti yang digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* melalui program Jombang Sehat dan hasil penelitian tersebut akan memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jombang Sehat di BAZNAS Kabupaten Jombang

Kesejahteraan adalah dimana keadaan kehidupan sesoerang menjadi aman dan makmur terlapas dari adanya gangguan dalam hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sama dengan perawatan dan bantuan khusus tersendiri agar menimbulkan ketenangan atau ketentraman dalam diri penyandang *cerebral palsy*. Program Jombang Sehat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten

Jombang merupakan program yang focus pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Jombang dari segi Kesehatan. BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai organisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah memiliki fungsi sebagai perantara penyaluran atau pemberdayaan kesejahteraan. Program BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program Jombang Sehat adalah sebagai berikut:

Pertama, perencanaan, peraturan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam program Jombang Sehat diawali dengan perencanaan yang matang dan cermat agar hasil yang dicapai tepat sasaran yang telah ditentukan dan mampu membantu para mustahik. Adapun langkah-langkah awal pembentukan program Jombang Sehat diantaranya sosialisasi ke beberapa Desa, meminta persetujuan Kepala Desa, menentukan target sasaran yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian mengirimkan berkas-berkas, setelah itu survei kerumah yang bersangkutan, selanjutnya hasil survei akan dibahas dalam rapat besar untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya pengajuan.

Kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki kriteria khusus untuk penerima menjadi mustahik BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam hal ini pengorganisasiannya, setiap pelaksanaan program Kesehatan dipimpin oleh Kepala Divisi Kesehatan yaitu Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si beliau menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan program Jombang Sehat di BAZNAS Kabupaten Jombang.

Ketiga, pengawasan, untuk pengawasan program Jombang Sehat Kepala Divisi Kesehatan dibantu oleh tenaga ahli, seperti dalam program penanganan pasien *cerebral palsy* dibantu oleh fisioterapi profesional yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang.

Mekanisme Pelaksanaan Program Jombang Sehat

Mekanisme dasarnya adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Mechane*" yang berarti sebuah perangkat, instrumen, peralatan dan bahan. Kata "*Merchos*" mengandung arti metode, sarana dan teknis untuk melaksanakan suatu fungsi. Mekanisme menurut Islam adalah berupa suatu pegangan penerapan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lembaga dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum Islam (Guarango, 2022). Islam membangun mekanisme dukungan sosial untuk mengatasi kemiskinan, khususnya dengan memperdayakan setiap umat Islam untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Begitu pula dengan muzaki yang telah menyalurkan atau mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) kepada lembaga zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Jombang yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu umat Islam yang membutuhkan melalui perantara BAZNAS Kabupaten Jombang. Peran BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai perantara untuk menyalurkan kembali dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat Jombang yang berhak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menurut wawancara terhadap Kepala Divisi program Jombang Sehat oleh Ibu apt. Lilies Purwanto, S.Si menyatakan:

> "*Program Jombang Sehat BAZNAS Kabupaten Jombang yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang dari segi kesehatan. Program ini diperuntungkan bagi masyarakat Jombang dari golongan fakir, miskin dan dhuafa yang memiliki keluhan kesehatan. Dalam program Jombang Sehat mempunyai prosedur yang harus ditempuh oleh calon penerima bantuan program Jombang Sehat. Setelah calon pasien mengirimkan kelengkapan berkas tersebut diatas, tim kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang akan melakukan survei lapangan (verifikasi faktual) ke Kantor Desa yang bersangkutan, rumah dan rumah sakit yang menangani pasien. Selanjutnya hasil survei akan dibahas dalam rapat besar untuk menentukan keputusan diterima atau tidaknya pengajuan. Apabila hasilnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) petugas akan menghubungi pihak pasien. Apabila pengajuan Memenuhi Syarat (MS) maka tim kesehatan akan menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi tidak selalu sesuai dengan pengajuan pasien".*

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Jombang Sehat dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel *cerebral palsy* antara lain yaitu faktor pendukung dimana faktor pendukung ini ada faktor internal meliputi, *pertama*, kondisi pasien sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi dimana penderita *cerebral palsy* kebanyakan tidak melihat mendengar tulang lemas tidak bisa menyangga tubuhnya. Penderita *cerebral palsy* juga mengalami kesulitan dalam menelan sehingga kadang kala asupan gizi yang duperlukan tubuhnya sangat minim,

padahal gizi ini sangat penting sebagai penunjang dalam terapi, jadi respon dari indranya yang diberikan juga sangat berpengaruh. *Kedua*, mood pasien penderita *cerebral palsy* cenderung moodnya tidak bagus. *Ketiga*, keluarga pasien merupakan orang yang paling dekat dan intens dengan pasien, sehingga dukungan dari orang tua atau keluarga sekitar merupakan salah satu faktor besar dalam pelaksanaan setiap Program Kesehatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, seperti program terapi, BAZNAS Kabupaten Jombang hanya bekerja sama dengan fisioterapis profesional untuk datang ke rumah pasien dua kali dalam satu minggu, sedangkan untuk proses maksimalisasi manfaat terapi, pasien harus terapi setiap hari. Jadi, membantu pasien melakukan terapi mandiri setiap harinya (saat terapis BAZNAS Kabupaten Jombang tidak ada jadwal kunjungan). Dan yang ke empat ialah Fisioterapi, dari segi kompetensi dan skillnya harus benar-benar profesional, karena tidak semua fisioterapi mampu menangani penderita *cerebral palsy*.

Adapun faktor eksternal meliputi, *pertama*. kualiatas tenaga pelaksana, dalam hal ini kualitas tenaga pelaksana yang dimaksud adalah kepekaan terhadap situasi kesehatan pasien. Tenaga pelaksanaan merupakan penghubung antara mustahik yang dalam hal ini adalah pasien program kesehatan, dengan pimpinan selaku penentu keputusan. Sehingga diperlukan sikap cekatan dan pengetahuan dasar kesehatan yang cukup. Salah satu contohnya adalah koordinator program kesehatan BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan seorang apoteker. Setidaknya, seorang apoteker memiliki pengetahuan dasar mengenai dunia kesehatan. *Kedua*, kebijakan pimpinan dalam merespon kasus program kesehatan, seperti pada lembaga ataupun organisasi pada umumnya, setiap program yang dilaksankan wajib dengan keputusan dari pimpinan. Di BAZNAS Kabupaten Jombang sendiri, setiap program tidak hanya memperhatikan satu sisi saja untuk memutuskan. Seperti halnya dalam pelaksanaan Program Kesehatan. Saat pengajuan masuk, berkas nantinya akan direkap oleh sekertaris dan mendapatkan disposisi dari Ketua. Selanjutnya ketua akan menunjuk pelaksanaan tugas untuk melakukan survei ke lokasi atau verifikasi faktual, tidak hanya pasien yang bersangkutan, pelaksanaan tugas juga melakukan verifikasi kepada keluarga, dan rumah sakit yang menangani pasien. Selanjutnya berkas akan dikembalikan kepada ketua untuk dirapatkan. Pengambilan keputusan para pimpinan tidak terlepas dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan. *Ketiga*, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang sesuai, sebagai Lembaga Amil Zakat, merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan. Sehingga pengeluaran untuk setiap program harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ke empat yaitu Link atau jaringan yang sesuai, satu contohnya adalah tenaga medis yang menangani pasien. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jombang perlu berkolaborasi dengan rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya bahkan tenaga medis perorangan sekalipun. Karena dalam dunia kesehatan, tidak dapat bertindak dengan asal-asalan untuk melakukan sebuah tindakan medis. Dukungan dari Pemerintah Jombang, dukungan dari Pemerintah Jombang merupakan hal yang seharusnya dipastikan ada untuk setiap program BAZNAS Kabupaten Jombang. Termasuk untuk program kesehatan di BAZNAS Kabupaten Jombang adalah untuk mendukung Pemerintah Jombang dalam mensejahterakan masyarakat Jombang.

Faktor penghambat dimana dalam setiap pelaksanaan program Jombang Sehat khususnya dalam program perorangan, hal utama yang wajib dijadikan perhatian adalah adanya dukungan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah keluarga pasien yang terlalu pasrah kepada BAZNAS Kabupaten Jombang tanpa ada *support* usaha lainnya yang membantu. Contoh sederhana adalah pasien *cerebral palsy* atas nama A telah mendapatkan bantuan gizi setiap bulan dan terapi dua kali dalam satu minggu bersama terapis profesional. Si A akan ada perkembangan lebih signifikan apabila keluarganya mendukung, dengan membantunya melakukan terapi mandiri saat terapis tidak ada jadwal berkunjung serta memberikan pelayanan atau pengasuhan sesuai arahan tim kesehatan dari BAZNAS Kabupaten Jombang tanpa ada tindakan lainnya. Pasien A akan lebih lambat, bahkan cenderung stagnan dalam proses perbaikan kesehatannya.

Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Difabel *Cerebral palsy* Melalui Program Jombang Sehat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)

Kesejahteraan merupakan keadaan dimana kehidupan seseorang menjadi aman dan makmur terlepas dari adanya tekanan dalam kehidupan. Sama halnya pada penderita *cerebral palsy* yang membutuhkan bantuan khusus dan perwatan tersendiri agar menimbulkan ketenangan dalam diri penyandang. Program Jombang Sehat yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan program BAZNAS yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang dari segi kesehatan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Jombang dari golongan fakir atau dhuafa

yang memiliki keluhan kesehatan.

Sasaran dalam program Jombang Sehat ini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tujuan dari program Jombang Sehat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus mampu meningkatkan kemandirian serta juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program Jombang Sehat dapat dilihat dari program Jombang Sehat yang telah terlaksana dibeberapa Desa yaitu Wonosalam, Plandaan, Losari Ploso, Megaluh, dan Ngusikan. Dari sini dapat diketahui sejauh mana peran BAZNAS Kabupaten Jombang bagi penyandang difabel *cerebral palsy* dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui manfaat yang diperoleh seperti:

Pertama, mendapatkan gizi, vitamin dan obat secara rutin setiap bulannya. Dalam penerpannya bantuan ini sangat bermanfaat bagi penyandang *cerebral palsy*, sebagaimana hasil wawancara dari mustahik penerima manfaat dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Salah satu responden yaitu responden A menyatakan:

> "*Nggih niku dapat susu, jajan, roti terus obat atau vitamin itu ya gizi-gizi gitu mba, terus juga terapi juga*". (Iya dapat susu, jajan, roti dan obat-obatan atau vitamin serta juga terapi)

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut manfaat yang didapatkan itu sudah sesuai yaitu seperti mendapatkan susu, vitamin atau obat secara rutin setiap bulannya dan juga terapi secara rutin setiap minggunya. *Kedua* mendapatkan bantuan terapis secara rutin beserta biaya akomodasi pasien yang bersangkutan sehingga diharapkan dengan terapi ini mampu membantu penyandang *cerebral palsy* perlahan membaik meskipun tidak sepenuhnya bisa dikatakan sembuh. Salah satu responden yaitu responden B menyatakan:

> *"Yang dulu saat belum mendapatkan bantuan ini itu masih belum bisa ngapa-ngapin mbak anaknya hanya tidur saja, terus sekarang Alhamdulillah bisa duduk tapi yo gitu mbak kalau disuruh duduk kalau moodnya bagus ya langsung mau duduk terus berbicara ya meskipun bicaranya satu kata dua kata misal kayak (contohnya yo, emoh, gak mau, terus nyebut nama yang orang yang dia kenal) gitu gitu mba setidaknya ada kemajuan. Dulu itu tak gendong terus mbak terus juga kalau gak gitu tak tidurkan tak leyeh-leyehkan anaknya jadi saya sambil menjaga disampingnya gitu mbak. Kalau saya mau bersih-bersih rumah terus membuat gerabah kalau ada pesenan gerabah saya taruh anakku ke bak atau ember gitu mba tak masukkan anakku biar nanti anakku gak bergerak kemana-mana gitu mbak, nanti kalau saya biarkan dikasur atau saya leyeh-leyehkan bisa-bisa saya gak bisa nyambi pekerjaan mbak. Wes pokoknya dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini Alhamdulillah lah mbak ada kemajuan".* (dulu sebelum mendapatkan bantuan, masih belum bisa apa-apa anaknya hanya tidur saja, tetapi sekarang Alhamdulillah bisa duduk tetapi ya gitu kalau disuruh kalau moodnya baik ya mau, terus kalau disuruh bicara juga mau meskipun bicaranya satu kata misalnya kayak ya, tidak mau, biasanya juga manggil nama orang yang dikenal, setidaknya ada kemajuan. Dulu itu ditimang terkadang juga di baringkan anaknya jadi sambil dijaga disampingnya, jadi kalau mau ditinggal bersih-bersih rumah terus juga membuat gerabah kalau ada pesanan, anaknya diatruh di bak atau ember dimasukkan disitu biar nanti tidak bergerak kemana-mana, soalnya kalau dibiarkan dikasur tidak bisa ditinggal untuk bekerja. Intinya dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini Alhamdulillah ada kemajuan).

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut mampu membantu penyandang *cerebral palsy* bisa membuat kondisi lebih membaik meskipun tidak secara keseluruhan. *Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga pasien, salah satu responden C menyatakan

> *"Manfaatnya ya bisa membantu dalam kebutuhan sehari-hari mbak, ya juga mendapatkan susu, jajan, obat beserta penyangga kaki dan juga terapi setiap minggunya, kalau untuk kursi roda itu dapatnya dari pemerintah".* (manfaatnya bisa membantu kebutuhan sehari-hari, dan juga mendapatkan susu, obat beserta penyangga kaki serta terapi setiap minggunya, kalau kursi roda itu dapatnya dari pemerintah)

Berdasarkan pernyataan dari responden tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga dalam sehari-harinya. Berdasarkan ketiga pernyataan responden tersebut dapat

disimpulkan bahwa dengan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah memiliki peran dalam mensejahterakan penyandang difabel *cerebral palsy*, terutama di Kabupaten Jombang.

Tabel 1. Laporan Dana ZIS

Keterangan	Rupiah
Zakat Maal Lembaga	Rp1.654.410.669
Zakat Maal Individu	Rp89.443.061
Zakat Fitrah	Rp134.513.500
Infaq/Shodaqoh	Rp1.867.058.754
Total	**Rp3.745.425.984**

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabuapten Jombang (2022)

Berdasarkan tabel 1 dimana dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp3.745.425.984 dimana perinciannya adalah zakat maal lembaga sebesar Rp1.654.410.669, zakat maal individu sebesar Rp89.443.061, zakat fitrah sebesar Rp134.513.500, dan infaq/sedekah sebesar Rp1.867.058.754.

Adapun program Jombang sehat dilaksanakan dibeberapa tempat Desa seperti di Desa Tondowulan, Kedungbogo, Kedungrejo, Losari, Bawangan, Morosumbinga, Betek, Klaci, Bangsari, Balongsari berjumlah 2 anak, Plabuhan, Peterongan, Sambirejo, Dempok, Keboan, Gambang, Perum Sambong Blok B16, Tembelang dan Wonomerto. Program Jombang Sehat ini jumlah penerima sebanyak 20 mustahik dan untuk penerima penyandang difabel *cerebral palsy* sebanyak 6 mustahik.

Tabel 2. Laporan Program Kesehatan (*Cerebral palsy*)

Nama	Gizi	Fisioterapi
Mustahik 1	Rp2.099.698	Rp8.540.000
Mustahi 2	Rp2.099.698	Rp8.600.000
Mustahik 3	Rp2.099.698	Rp4.800.000
Mustahik 4	Rp2.099.698	Rp7.900.000
Mustahik 5	Rp2.099.698	Rp4.000.000
Mustahik 6	Rp2.099.698	Rp483.500
Total	**Rp12.598.188**	**Rp34.323.500**

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang (2022)

Berdasarkan tabel 2 untuk penerimaan program bantuan gizi pada tahun 2022 sebesar Rp12.598.188 dengan masing-masing menerima sebesar Rp2.099.698 pertahun. Dan untuk fisioterapi setiap anak berbeda-beda untuk menerimanya dikarenakan tergantung dari pihak fisioterapi datangnya berapa kali dalam satu minggu (waktunya berbeda bahkan ada yang sekali dalam seminggu, ada yang dua kali dalam seminggu dan ada juga sekali dalam dua minggu) karena setiap anak kondisinya berbeda dimana dipengaruhi oleh mood anak, kondisi anak, kerepotan keluarga. Jadi tidak semua di dananya di buat sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan penyaluran atau pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang menderita penyakit *cerebral palsy*. Adapun bentuk dari upaya mensejahterakan mustahik tersebut ada tiga yaitu: *pertama*, dengan adanya pemberian bantuan berupa makanan, gizi dan vitamin. *Kedua*, terapi dimana dilakukan setiap minggunya secara rutin dan yang *ketiga* membantu ekonomi keluarga mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan akan ada prospek yang produktif seperti dengan adanaya bantuan usaha, mendorong ketrampilan pada anak seperti pelatihan-pelatihan. Dan juga peneliti mengharapkan lebih banyak jurnal-jurnal yang membahas kesejahteraan difabel agar pembaca juga mendapatkan banyak informasi mengenai kesejahteraan difabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, R. Y., & Fatah, D. A. (2022). *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta)*.

Anindita, A. R., Studi, P., Sosial, K., & Unpad, F. (2019). *Pelaksanaan Support Group Pada Orangtua Anak Dengan Cerebral palsy Nurliana Cipta Apsari*. *2*(2), 208–218.

Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, *32*(1), 85–92. https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat

Faisyahril, R., Tri Raharjo, S., & Wibowo, H. (2023). Penerimaan Orangtua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas *Cerebral palsy* Di Sekolah Luar Biasa Bagian D Yayasan Pembinaan Anak Cacat Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *4*(4), 480–496. https://doi.org/10.59141/jist.v4i4.611

Guarango, P. M. (2022). *Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Issue 8.5.2017).

Hammam, & Choiri, M. (2021). Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura. *Seminar Nasional Sosiologi*, *2*, 135–144.

Junaidi, T. (2023). *BAZNAS Hadir Konsultasi Sikn dan Jikn di Pusat Sistem dan Jikn Anri.* https://www.anri.go.id/publikasi/berita/baznas-hadir-konsultasi-sikn-dan-jikn-di-pusat-sistem-dan-jikn-anri

M Muallifurrahmi A, A. Y. (2019). *Baznas Assistance Program Role for Enhancing the Economic*. *2*(1), 45–60.

Muzwir Luntajo Institut Agama Islam Negeri Manado, M. R., Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, J. S., Malendeng, K., Paal Dua, K., Manado, K., Utara, S., & Hasan Institut Agama Islam Negeri Manado, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 3, Issue 1). http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI

Nor Paizin Pusat Pungutan Zakat, M. (2022). Decentralization in Malaysia's Zakat Organizations: A Comparison of Zakat Collection Achievements. *International Journal of Zakat*, *7*(1), 33–46.

Qadariyah, L. (2022). The Accountability Of Zakat Al-Fitr Management By Religious Figures As Âmil Al-Zakât. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 119–136. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15507

RI, B. (2023). *Pengertian BAZNAS*. https://donasi.baznas.go.id/

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *2*(1), 48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18

Sholikhah, atus, Dinah Fauziah, N., & Toha, M. (2022). *Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.* https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-naik

Situmorang, syafrizal H., & Lufti, M. (2014). *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)* (Edisi 3). USU Press. http://usupress.usu.ac.id

Suardi, D. (2021). ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 ⎪321 Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *6*(2). https://doi.org/10.36908/isbank

Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15

Sulistyawati, N., & Mansur, A. R. (2019). Indentification of causative factors and signs and symptoms of children with *cerebral palsy*. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, *7*(1), 77–89.

Supanji, T. H. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.* https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia

Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka* (Edisi Pert). Akademia Pustaka.

Syamsuri, S., Lesmana, M., & Mardianto, W. A. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Ecoplan*, *6*(1), 46–55. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.647

Timur, B. J. (2018). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat*. https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html

Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, *6*(1), 60–76. https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, *17*(1), 197. https://doi.org/10.31078/jk1719

Yaumul Haeriyah. (2022). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4135/

Zabir, M., Pascasarjana, A., Ar-Raniry, U., & Aceh, B. (2017). *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh* (Vol. 1, Issue 1).

Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Pajak* (Sleman Yog). Kalimedia.

Ecoplan Vol. 7 No. 1, April 2024, p. 51-66
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Analisis Volume Usaha Koperasi dan Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pengangguran Melalui Produk Domestik Regional Bruto Se-Kalimantan Selatan

Mutiara Khan[1)*], Saipudin[2)], Muzdalifah[3)]
[1) 2) 3)] Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

[*]E-mail Corresponding Author: mutiarakhan.pp@gmail.com

Ecoplan

Submitted: Feb 26, 2024
Accepted: Mar 20, 2024
Published: Apr 29, 2024

***Keywords*: Cooperative; MSME; Unemployment., GRDP; South Kalimantan**

Abstract *- The general condition of the Open Unemployment Rate in South Kalimantan during 2018-2022 shows relatively increasing findings, especially during the COVID-19 pandemic. The volume of cooperative business and MSME turnover is one of the means that can be used to reduce it through GRDP as a forum that reflects regional economic conditions. This paper aims to make a deeper identification related to the direct and indirect relationship of cooperative business volume and MSME turnover to the open unemployment rate through GRDP in South Kalimantan Province Districts / Cities in 2018-2022. The data used in this study are secondary data collected through documentation methods and processed using quantitative methods with regression panel data to determine the direct influence between variables both simultaneously and partially and with path analysis using the Sobel test to determine the indirect influence between independent variables, namely the volume of cooperative businesses and MSME turnover on the dependent variable, namely the unemployment rate open through the intervening variable is. GRDP. The results of this study show a direct influence of the volume of cooperative businesses, MSME turnover, and GRDP on the open unemployment rate simultaneously. Only partially does MSME turnover significantly affect the open unemployment rate. Meanwhile, the volume of cooperative businesses and MSME turnover directly and partially affect GRDP. There is no indirect influence (through GRDP) on the volume of cooperative businesses or MSME turnover and the open unemployment rate in South Kalimantan Province.*

Abstrak - Kondisi umum Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2018-2022 menunjukkan penemuan yang relatif meningkat apalagi saat terjadi pandemi COVID-19. Volume usaha Koperasi dan omzet UMKM sebagai salah satu sarana yang bisa dijadikan sebagai jalan untuk menguranginya melalui PDRB sebagai wadah yang mencerminkan kondisi perekonomian daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi yang lebih mendalam terkait hubungan langsung maupun tidak langsung dari volume usaha koperasi dan omzet UMKM terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam masa periode 2018-2022. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan diolah menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel untuk mengetahu pengaruh langsung antar variabel baik secara simultan maupun parsial dan dengan analisis *path* menggunakan uji Sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antar variabel bebas yaitu volume usaha koperasi dan omzet UMKM terhadap variabel variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka melalui variabel intervening yaitu PDRB. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat adanya pengaruh langsung pada volume usaha koperasi, omzet UMKM, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka secara simultan. Namun, secara parsial hanya omzet UMKM yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan, volume usaha

koperasi, omzet UMKM berpengaruh langsung terhadap PDRB baik secara simultan maupun parsial, tidak adanya pengaruh secara tidak langsung (melalui PDRB) pada volume usaha koperasi ataupun omzet UMKM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Koperasi; UMKM; Pengangguran; PDRB; Kalimantan Selatan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang masih dalam tahap pembangunan dan umumnya mengalami beberapa tantangan, seperti tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau masalah yang terkait dengan tenaga kerja. Dalam konteks negara berkembang, masalah pengangguran semakin kompleks dan mendesak. Hal ini khususnya terjadi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi belum berhasil menciptakan cukup banyak kesempatan kerja bagi populasi yang terus bertambah setiap tahunnya.

Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pertambahan jumlah tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan banyak individu yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Situasi ini bisa membuat mereka menganggur secara paruh waktu atau bahkan sepenuhnya. Faktor-faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi lapangan kerja, dan stagnasi pertumbuhan perusahaan juga dapat menyebabkan pengangguran terbuka. Permasalahan ini menjadi serius karena berkaitan dengan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB/PDRB, aktivitas usaha koperasi, dan UMKM. Pengangguran terbuka merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menganggur.

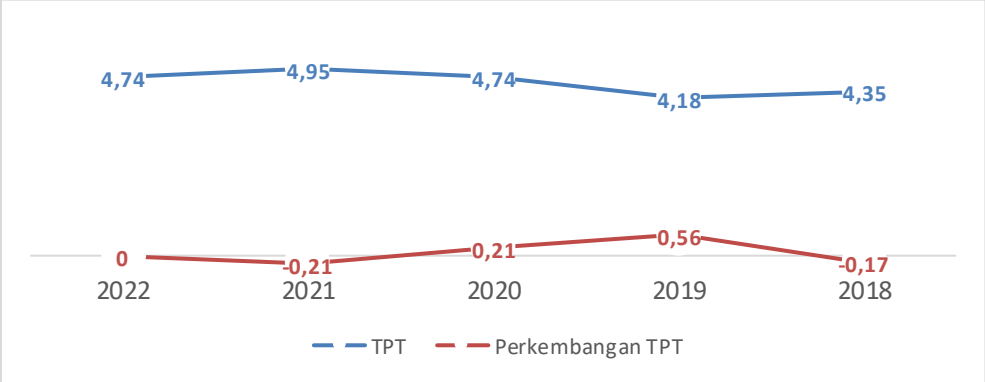

Sumber: Badan Pusat Stastistik,2022 (diolah)

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut gambar 1 tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan antara tahun 2018 dan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang signifikan mencapai 4,95%, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait adaptasi ke *new*-normal pasca pandemi COVID-19. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat pada tahun 2018 sebesar 4,35% karena peningkatan jumlah angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja ke dunia kerja. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis mencapai 4,74% dari tahun sebelumnya, akibat dampak pandemi COVID-19 yang meluas di Indonesia, menyebabkan penurunan jumlah pekerja di berbagai sektor di Kalimantan Selatan.

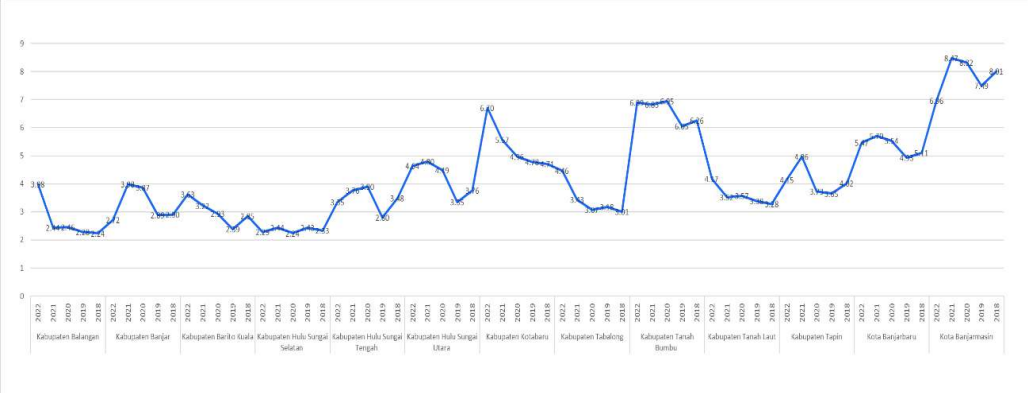

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2022))

Gambar 2. Perkembangan TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022

Dari sisi lainnya, pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan pada gambar 2 tersebut, dapat ditarik info terkait TPT yang ada di beberapa daerah terkait mengalami perkembangan fluktuatif di setiap daerah maupun tahunnya memberikan gambaran tentang bagaimana pasar tenaga kerja berubah di wilayah tersebut. Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa kabupaten/kota seperti Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah mengalami fluktuasi dalam tingkat pengangguran terbuka, dengan kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Kenaikan ini bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasional, perubahan kebijakan pemerintah, serta dampak pemulihan dari situasi pandemi.

Kabupaten Tanah Bumbu mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yang mungkin melibatkan faktor-faktor ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Sedangkan, pada tingkat kota, Banjarmasin mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi di antara kota-kota yang ada pada tahun 2022 akibat dari perubahan ekonomi lokal akibat pandemi. Secara keseluruhan, TPT Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan yang relatif kecil dari tahun 2018-2022 yaitu mencapai 4,74% pada tahun terakhir. Kenaikan yang relatif kecil ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan ekonomi, inisiatif pengembangan sumber daya manusia, atau perkembangan sektor-sektor tertentu diwilayah ini.

Walaupun begitu, perbaikan ekonomi yang berkelanjutan dalam kondisi ekonomi masih sangat diperlukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi TPT adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pendapatan per kapita suatu wilayah melalui PDRB. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi, menurut Perwira & Laila (2020). Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi PDB/PDRB dan mengurangi tingkat pengangguran.

Sumber: Badan Pusat Stastistik,2022 (diolah)

Gambar 3. Perkembangan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022

Gambar 3 tersebut menjelaskan bahwa data menunjukkan dalam rentang waktu 2018-2022 secara garis besar bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan mengalami

peningkatan PDRB. Kota Banjarmasin menunjukkan PDRB tertinggi, dengan pertumbuhan kontribusi signifikan pada rentang tahun waktu tersebut. Beberapa daerah lain seperti Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Faktor penyebab pertumbuhan PDRB dapat melibatkan sejumlah faktor, termasuk pengembangan sektor ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Contohnya, Upaya pemerintah dalam mendukung sektor UMKM dan Koperasi sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan PDRB atas pertumbuhan ekonomi daerah.

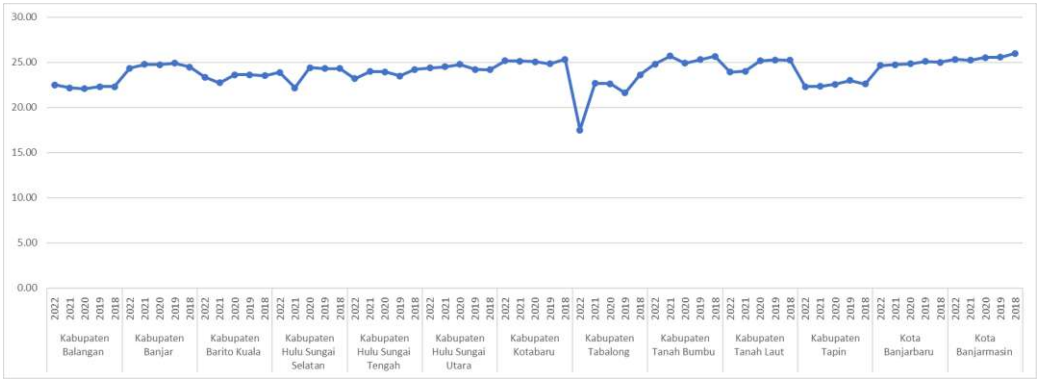

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan,2022 (diolah)

Gambar 4. Perkembangan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022

Berdasarkan data dari gambar 4 tersebut, dapat diketahui bahwa bagaimana ekonomi koperasi berkembang di berbagai daerah. Pada Hulu Sungai Selatan dan Banjarmasin yang mengalami fluktuasi signifikan dengan penurunan tajam pada tahun 2020 akibat dari krisis ekonomi global yang berakibat pada situasi lokal yaitu pandemi COVID-19. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi penurunan sejak tahun 2018, ini dapat dari akibat faktor internal koperasi dan kondisi daerah tersebut. Disisi lainnya, seperti Banjarbaru mencatat peningkatan pada tahun 2022 terkait dengan program pemerintah atas bisnis lokal terkait.

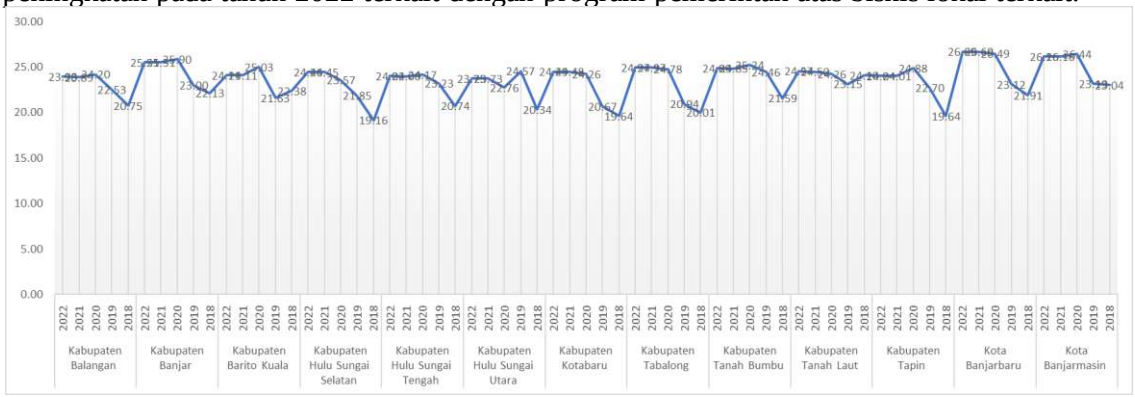

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan,2022 (diolah)

Gambar 5. Perkembangan Omzet UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022

Dari data pada gambar 5 tersebut, omzet UMKM menunjukkan variasi dalam kontribusi ekonomi di berbagai daerah. Seperti pada Kabupaten Balangan mengalami peningkatan omzet pada tahun 2020 dapat diartikan sebagai hasil positif dari kebijakan pemerintah atau adaptasi UMKM terhadap perubahan permintaan pasar. Sebaliknya, penurunan yang cukup signifikan di Kabupaten Banjar pada tahun yang dipengaruhi oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19, *lockdown*, atau ketidakpastian ekonomi. Disisi lainnya, pada tingkat kota yaitu Banjarbaru mencatat peningkatan pada tahun 2022 yang diakibatkan oleh program pemerintah atas bisnis lokal. Berbeda dengan Banjarmasin yang menghadapi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi, pembatasan dan kondisi ekonomi yang sulit. Sebagai bagian dari upaya ini, sektor UMKM dan koperasi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Kabupaten/Kota utamanya di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi fokus

penelitian ini karena memiliki potensi ekonomi yang besar namun dihadapkan pada tantangan pengangguran yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi volume usaha koperasi dan omzet UMKM melibatkan aspek internal dan eksternal. Faktor internal mencakup manajemen, keuangan, dan keterampilan SDM. Sementara faktor eksternal melibatkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah dan dukungan infrastruktur.

Peningkatan volume usaha koperasi dalam konteks ini berarti volume usaha dapat mencerminkan seberapa besar koperasi berkontribusi terhadap perekonomian, baik dari segi produksi barang dan jasa, maupun dari segi pendapatan yang dihasilkan. Disisi lainnya, omzet UMKM dapat mencakup penjualan berbagai produk atau jasa, baik itu di pasar lokal, nasional, atau internasional yang memiliki dampak terhadap pengangguran. Koperasi dan UMKM dapat menjadi sumber daya ekonomi lokal yang berpotensi menyerap tenaga kerja, terutama di daerah-daerah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kontribusi volume usaha koperasi dan omzet UMKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran utamanya tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB.

Meskipun Koperasi dan UMKM memiliki peran besar yang dapat dimainkan, tetapi masih sedikit penelitian yang menyeluruh tentang kontribusi mereka terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB di Kalimantan Selatan. Dengan memahami pengaruh antara volume usaha koperasi, omzet UMKM, TPT, dan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana Analisis Volume Usaha Koperasi dan Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada uraian di atas sebagai dasar untuk karya ilmiah.

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah disebutkan di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan pertama apakah volume usaha koperasi dan omzet UMKM berpengaruh secara langsung baik secara simultan maupun parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. kedua, apakah volume usaha koperasi dan omzet UMKM berpengaruh secara tidak langsung (melalui Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tahap pertama yang penting dalam proses penelitian adalah tinjauan literatur untuk membangun dasar teoritis yang kokoh dan merinci kerangka kerja suatu penelitian. Pada bagian awal, penelitian ini melibatkan teori pertumbuhan ekonomi oleh Mankiw dalam tulisan Lastrapes (1993) yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara konsumsi, investasi, pengeluaran dari pemerintah, dan selisih antara ekspor-impor. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menjadi katalisator untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan PDRB, dan dukungan terhadap volume usaha koperasi serta omzet UMKM. Seiring konsumsi masyarakat yang meningkat, investasi yang berkelanjutan, serta peran aktif pemerintah dalam pengeluaran, diharapkan muncul dampak positif pada sektor-sektor ekonomi tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran ialah masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang sering kali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,

2006). Beberapa teori merespons isu pengangguran, dan teori Keynes menyajikan perspektif yang berbeda dari teori klasik. Keynes menyarankan keterlibatan pemerintah dalam menjaga tingkat permintaan agregat agar sektor usaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tugas pemerintah terutama terfokus pada pemeliharaan tingkat permintaan agregat, sementara sektor usaha bertanggung jawab untuk menciptakan peluang pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjaga pendapatan masyarakat agar daya beli tetap stabil, mencegah resesi tambahan, dan berupaya mengatasi masalah pengangguran yang muncul akibat resesi (Soesastro, 2005).

Pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan kondisi pemicunya (Sukirno & Sadono, 2004). Pertama, pengangguran fraksional, yang terjadi ketika seseorang keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan harapannya. Kedua, pengangguran struktural, terjadi akibat perubahan dalam struktur ekonomi. Ketiga, pengangguran konjungtur, yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran alami sebagai dampak dari penurunan permintaan agregat. Badan Pusat Statistik (2022) juga menyebutnya bahwa pengangguran terbuka merupakan yang melibatkan seorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk mendapatkannya, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak mulai bekerja atau tidak bekerja saat ini. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang mencerminkan jumlah orang yang mengalami pengangguran. Dengan memahami tingkat pengangguran terbuka, pemerintah dapat lebih efektif mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kuncoro, 2017).

Volume Usaha Koperasi

Menurut Billiet et al. (2021), anggota koperasi menganut prinsip etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama, yang membuat koperasi terkait dengan prinsip kekeluargaan. Disisi lainnya, peningkatan pendapatan anggota merupakan salah satu bagian penting dari fungsi koperasi dalam perekonomian. Semakin banyak kontribusi yang diberikan oleh seorang anggota terhadap koperasi, semakin besar penghasilan yang diterima oleh anggota tersebut. Seperti yang dikatakan Nugraha (2022), memberdayakan koperasi juga berarti memberdayakan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi nasional atau regional.

Volume usaha koperasi pada dasarnya diartikan sebagai total nilai penjualan atau pendapatan barang dan atau jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sitio & Halomoan Tamba, (2001), volume usaha juga dapat diartikan sebagai total nilai penjualan atau penerimaan yang berasal dari barang dan atau jasa pada periode tertentu atau pada tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi merupakan total akumulasi nilai yang diperoleh dari penerimaan barang dan atau jasa mulai awal sampai akhir tahun buku (Widiartin et al., 2016). Penelitian Ubaidillah (2016) juga menyebutkan bagaimana pentingnya volume usaha sebagai salah satu faktor yang mendorong kemandirian koperasi, mengukur Kesehatan sebuah koperasi, keberhasilan koperasi melalui komitmennya, serta dapat melihat dampaknya pada keaktifan koperasi.

Menurut Rudianto, (2010), Berdasarkan bidang usaha dan jenis anggota, koperasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu; 1) Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi ini fokus pada pengumpulan simpanan dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada mereka yang memerlukan dana. Kegiatan utama koperasi ini adalah menyediakan layanan penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota. 2) Koperasi Konsumen, Koperasi Konsumen, koperasi ini memiliki anggota yang terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama, seperti koperasi yang mengelola toko serba ada atau minimarket. 3) Koperasi Pemasaran, Koperasi ini terdiri dari produsen atau pemilik barang dan penyedia jasa. Tujuannya adalah membantu anggotanya dalam pemasaran barang-barang yang mereka hasilkan, sehingga anggota dapat fokus pada produksi, sementara koperasi menangani pemasaran. 4) Koperasi Produsen, Koperasi ini melibatkan anggota yang bekerja sama untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi ini adalah menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuannya adalah

menyatukan kemampuan dan modal anggota untuk menghasilkan barang atau jasa melalui badan usaha yang mereka miliki bersama. Dari koperasi yang ada tersebut maka didapatkan volume usaha sesuai dengan jenis yang ada. Volume usaha tersebut berasal dari total nilai pendapatan/ penjualan produk ataupun jasa yang ditawarkan maupun didapat setiap koperasi melalui kontribusi anggota dalam mendukung kesejahteraan mereka yang mana dapat berpengaruh pada perekonomian daerah.

Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Omzet atau hasil penjualan dapat diformulasikan sebagai berikut (Tambunan, 2012):

Omzet = Jumlah Produk x Harga Jual

Jadi dapat dikatakan bahwa omzet adalah laba kotor atau pendapatan kotor yang dihasilkan sebuah usaha dihitung dengan mengalikan harga dan kuantitas produk yang dijual dalam harian /mingguan/bulanan/tahunan. Omzet usaha adalah rata-rata pendapatan debitur per bulan ditambah *joint income* diperoleh dari pendapatan usaha (Tambunan, 2012). Manfaat memahami omzet dan bisnis sebagai berikut; memberitahu tentang masalah kualitas atau produksi, membantu persiapan laporan laba rugi, memberikan kesempatan untuk berinvestasi saat omzet tinggi, dan memberikan kesempatan untuk menyesuaikan pengeluaran saat omzet rendah.

Dapat dikatakan juga, bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi penyedia lapangan kerja utama, UMKM juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB/PDRB. Karena pasar yang luas, ketersediaan bahan baku, dan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan bisnis melalui hasil penjualan dan modal yang ada, mereka memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Menurut Mankiw (2006), untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) riil, yang dihitung berdasarkan harga tetap, bukan PDB nominal, yang dihitung berdasarkan harga saat ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut situs web Badan Pusat Statistik (2023) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit ekonomi atau seluruh unit usaha di dalam suatu wilayah. PDRB juga dapat digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu dengan menggunakan harga saat ini atau harga tetap. PDRB berdasarkan harga saat ini mengukur nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga tahun berjalan untuk perhitungannya, sedangkan PDRB berdasarkan harga tetap dihitung dengan menggunakan harga tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar.

Adapun menurut Sukirno & Sadono (2004) ada tiga pendekatan dalam menghitung PDRB, yaitu; 1) PDRB berdasarkan Produksi, PDRB yang berdasarkan total nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. 2) PDRB berdasarkan Pendapatan, PDRB yang berdasarkan pembayaran balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. 3) PDRB berdasarkan Pengeluaran, PDRB dikalkulasikan berdasarkan seluruh elemen permintaan akhir, yang meliputi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta, dan saldo ekspor netto (yaitu, ekspor dikurangi impor).

Hubungannya dapat dilihat dari PDRB yang diukur dalam 2 versi penilaian, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (riil), menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Volume Usaha Koperasi, yang mencerminkan total nilai penjualan/ pendapatan barang & jasa dari koperasi, dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi PDB atau PDRB sering digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi (Perwira & Laila, 2020).

Dalam RPJM oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan (2022), menyebutkan bahwa salah satu pendukung ekonomi masyarakat mikro adalah koperasi, yang merupakan suatu *platform* kegiatan produktif bagi Masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam situasi tersebut, koperasi dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kontribusinya pada PDRB dan pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan seperti yang dikatakan Kabid. Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Selatan, Sirpan mengatakan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang kuat untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi tantangan pandemi. Meskipun demikian, pemulihan yang mulai terjadi saat pandemi terus berlangsung dapat menjadi peluang untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional (Pemerintah Kalimantan Selatan, 2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Hamza & Agustien (2019), UMKM dapat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara/daerah. Kemajuan UMKM dapat menciptakan peluang pekerjaan dan penghasilan serta kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tulisannya dalam penelitian tentang UMKM, Muzdalifah (2021) juga mengatakan bahwa pandemi telah meningkatkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2020, tercatat sebanyak 103.600 orang menganggur dengan sekitar 26,74% mengalami pengangguran akibat dampak COVID-19. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah memberlakukan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) karena data dari KemenKop dan UKM menunjukkan bahwa UMKM mencakup 99% pelaku usaha di Indonesia, program ini memberikan prioritas pada UMKM. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57% dan penyerapan tenaga kerja 97%.

Teori Keynes menyoroti pentingnya menjaga tingkat permintaan agregat untuk mencegah pengangguran, dan hal ini dapat menciptakan lingkaran keterkaitan antara PDRB, Volume Usaha Koperasi, Omzet UMKM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Peningkatan Volume Usaha Koperasi dan Omzet UMKM dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga tingkat permintaan agregat dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi dan UMKM dalam meningkatkan volume usaha dan omzet dapat menjadi faktor dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti dalam kajian Yunani (2018) menyebutkan bahwa perekonomian daerah dilihat dari sektor UMKM dapat meningkatkan PAD, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang mana ini dapat menjadi penekan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

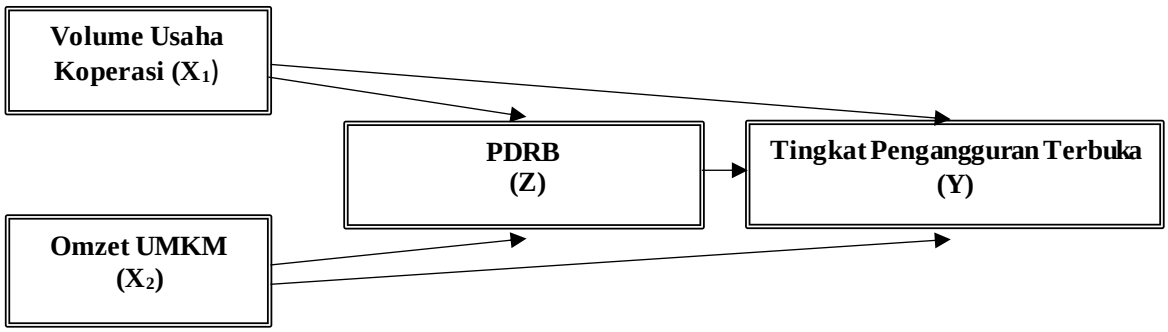

Gambar 6. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan tujuan penelitian, masing-masing variabel dalam kerangka penelitian ini dijelaskan dengan definisi operasional yang lebih spesifik, yaitu: 1) Volume Usaha Koperasi merupakan variabel independen (X_1), adalah nilai penjualan dari barang dan atau jasa yang tercantum pada tahun berkenaan dan dinyatakan dalam satuan Rupiah pada usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Omzet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan variabel independen (X_2), adalah hasil penjualan kotor suatu UMKM pada tahun berkenaan dan dinyatakan dalam satuan Rupiah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel intervening (Z), adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, yang diambil dari data tahun dasar (harga konstan), dan dinyatakan dalam satuan Milyar Rupiah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan variabel dependen (Y), adalah rasio antara

jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan dengan dinyatakan dalam satuan persen.

METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik. Data diolah menggunakan metode kuantitatif analisis *path* (jalur) dengan persamaan regresi data panel. Rentang waktu data penelitian selama 5 tahun yaitu dari 2018 sampai dengan 2022 di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun output dari olah data dengan berdasarkan pemilihan model terbaik terhadap persamaan regresi yang telah didapatkan sebelumnya disesuaikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Volume Usaha Koperasi Dan Omzet UMKM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 1. Hasil Uji Persamaan 1

Variabel	*Koefisien*	*Std. Error*	*t-Statistik*	*Prob.*
C	29,84684	0,242394	123,1335	0,0000
X1	-0,013217	0,006157	-2,146531	0,0358**
X2	0,011890	0,002644	4,496572	0,0000*
R-squared	0,355935	*Mean dependent var*		0,741615
Prob(F-statistic)	0,000001			

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 10 (2024)
**Sig pada α 1%; **Sig pada α 5%; ***Sig pada α 10%*

Hasil Persamaan dari tabel diatas yaitu dengan model terbaik yaitu *Random Effect Model*:

$$\mathbf{Z = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e} \quad \textit{(1)}$$

$$\mathbf{LogZ = 29,85\text{-}0,01\ LogX1 + 0,12\ LogX2}$$

Keterangan:
LogZ = PDRB dalam bentuk transformasi Logaritma
α = Konstanta
β_1 = Koefisien Variabel
LogX1 = Volume Usaha Koperasi dalam bentuk transformasi Logaritma
LogX2 = Omzet UMKM dalam bentuk transformasi Logaritma
ε = *Error Term*.

Pada hasil output eviews 10 pada tabel 1, nilai *R-Square* 0,3559. Angka ini, menunjukkan bahwa kontribusi variabel penjelas terhadap variabel terikat sebesar 35,59%, sementara sekitar 64,41% tidak dapat dijelaskan oleh variabel terikat pada model ketika diterapkan pada variabel bebas. Variabilitas yang tersisa ini diasumsikan dipengaruhi, oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian yang tidak, terdeteksi atau dimasukkan ke dalam model. Adapun dari persamaan yang didapatkan tersebut dapat dikatakan bahwa mengungkapkan hubungan kompleks antara PDRB (Z), Volume Usaha Koperasi ($X1$), Omzet UMKM ($X2$), dan faktor ketidakpastian (ε). Konstanta 29,85% menandakan nilai PDRB ketika aktivitas koperasi dan UMKM sama-sama

nol. Koefisien negatif (−0,01%) pada Volume Usaha Koperasi menunjukkan adanya dampak negatif pada PDRB dengan peningkatan aktivitas koperasi. Di sisi lain, koefisien positif (0,12%) pada Omzet UMKM menunjukkan bahwa pertumbuhan omzet UMKM dapat memberikan kontribusi positif pada PDRB.

Disisi lainnya, variabel volume usaha koperasi dan omzet UMKM berpengaruh secara simultan terhadap PDRB dengan nilai prob (*f—statistic*) 0,000001 kurang dari nilai signifikansi alpha 5% (0,05), ini berarti bahwa secara bersama-sama, volume usaha koperasi dan omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh terhadap PDRB di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, ketika kedua variabel ini meningkat, PDRB cenderung meningkat juga. sedangkan X1 berpengaruh secara parsial dengan nilai probabilitas 0,0358 lebih kecil dari 0,05, Ini berarti bahwa jika variabel ini berubah, maka ada pengaruh langsung yang dapat diidentifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan X2 memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05. Artinya, jika variabel X2 berubah, ada pengaruh langsung yang dapat diidentifikasi terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari segi lapangannya, dengan adanya hasil akan pengaruh secara kuantitatif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dari SKPD terkait memang memiliki kontribusi besar kecilnya terhadap PDRB dalam wilayah tersebut. Akan tetapi, kontribusi itu lebih besar jika antara SKPD terkait dapat bersinergi dalam melaksanakan kebijakan ataupun programnya masing-masing dengan melakukan konsolidasi antar SKPD sehingga hasil yang didapatkan lebih baik untuk kemajuan sektor usaha maupun PDRB dalam cangkup wilayah yang bersangkutan. Salah satu yang dapat dilakukan SKPD terkait adalah seperti dalam tulisannya oleh Zada & Sopiana (2021) dimana UMKM contohnya dapat berkembang dengan baik di era digitalisasi menggunakan *e-wallet* sebagai pengganti uang tunai. Disisi sektor lainnya, seperti sektor kehutanan yang dapat bekerja sama dalam Pembangunan daerah dapat bekerja sama dengan baik jika konsolidasi antar SKPD terkait pengembangannya dapat memberikan dampak yang baik terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dijelaskan lebih dalam oleh Anshar Nur et al., (2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung untuk volume usaha koperasi sendiri mampu berkontribusi pada PDRB. Begitupun juga untuk omzet UMKM sendiri secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB. Secara bersama-sama baik volume usaha koperasi dan omzet UMKM sejalan langsung dapat memberikan pengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan data lampiran terkait perkembangan volume usaha dan UMKM sendiri menyiratkan bahwa di sebagian besar kabupaten/kota sangatlah berfluktuatif. Ada wilayah yang mengalami penurunan dimasa krisis ekonomi utamanya pada masa covid19 dan ada juga yang masih bertahan dengan menanggulanginya melalui kerja sama maupun kebijakan baru dalam pengelolaan ataupun pelaksanaannya sehingga keduanya bersama-sama dapat saling mendukung/ bersinergi maupun secara mandiri dalam kontribusinya pada PDRB diwilayah tersebut. Meskipun fokus utama koperasi memang bisa membantu menyejahterakan anggotanya dalam melalui krisis keuangan ataupun kebutuhan tapi juga bisa berdampak langsung dalam PDRB diwilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Perwira & Laila (2020) secara nasional dan Karmini et al., (2021) secara lingkup pulau Kalimantan yaitu menjelaskan bahwa koperasi memiliki kemampuan dalam kontribusi terhadap PDRB dan menghasilkan pendapatan yang dapat menyumbang PDB Nasional. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada lingkup periode waktunya saja. Disisi lainnya, Ubaidillah (2016)

menekankan bahwa peranan volume usaha koperasi dalam membangun kemandirian dan mempertahankan aktivitas terutama dari segi keuangan juga diperkuat oleh Billiet et al., (2021) bahwa koperasi dapat mampu bertahan dalam masa pandemi covid 19 dalam mendukung kebutuhan anggota seperti juga yang dikatakan McKillop et al., (2020) dimana dalam masa tersebut koperasi utamanya sektor keuangannya/ jasa tetap memberikan kredit kepada anggota mereka sehingga mampu mendorong secara langsung terhadap PDRB di beberapa wilayah. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Hermanto (2021) yang memaparkan bahwa koperasi memiliki dampak positif terhadap PDRB di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Ini menunjukkan bahwa kemandirian dan perkembangan koperasi dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PDRB di suatu daerah.

Hasil penelitian terkait UMKM juga sejalan dengan Hermanto, (2021) dan Salim et al., (2022) bahwa UMKM memiliki dampak atau pengaruh signifikan terhadap PDB utamanya dalam membantu meningkatkan pendapatan nasional. Disisi lainnya, walaupun dalam penelitian ini volume koperasi dan omzet UMKM dapat berpengaruh langsung terhadap PDRB tetapi juga dapat memberikan peluang satu sama lainnya dengan sering bekerja secara sinergi, saling mendukung sehingga dapat menjadi sektor utama dalam perekonomian daerah. Dengan adanya koperasi yang kuat dan aktif dapat menjadi saluran distribusi yang efisien bagi produk UMKM dan membantu meningkatkan omzet serta keberlanjutan UMKM yang mana akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bersama-sama terhadap PDRB.

Tabel 2. Hasil Uji Persamaan 2

Variabel	*Koefisien*	*Std. Error*	*t-Statistik*	*Prob.*
C	-55,75402	62,92572	-0,886029	0,3799
X1	-0,083370	0,096085	-0,867675	0,3898
X2	0,085060	0,046586	1,825875	0,0740***
Z	2,012510	2,105830	0,955685	0,3439
R-squared	0,930401	Mean dependent var		4,248000
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 10 (2024)
**Sig pada α 1%; **Sig pada α 5%; ***Sig pada α 10%*

Hasil output e-views 10 pada tabel 2, nilai *R Square* adalah 0,93. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 93%, sementara sekitar 7% dari variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model. Variabilitas yang tersisa ini diasumsikan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dil uar lingkup penelitian yang tidak terdeteksi atau dimasukkan ke dalam model.

Hasil Persamaan dari tabel di atas dengan model terbaik yaitu *Fixed Effect Model,* yaitu:

$$\mathbf{Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b2Z + e} \quad \textit{(2)}$$

$$\mathbf{Y = -55,75 - 0,08\ LogX1 + 0,08\ LogX2 + 2,01LogZ}$$

Keterangan:
Y = Tingkat Pengangguran Terbuka
α = Konstanta
β_1 = Koefisien Variabel
LogX1 = Volume Usaha Koperasi dalam bentuk transformasi Logaritma
LogX2 = Omzet UMKM dalam bentuk transformasi Logaritma
LogZ = PDRB dalam bentuk transformasi Logaritma
ε = *Error Term*

Adapun dari persamaan yang didapatkan tersebut dapat dikatakan menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (*Y*), Volume Usaha Koperasi (*X*1), Omzet UMKM (*X*2), PDRB (*Z*), dan faktor ketidakpastian (ε). Konstanta negatif (-55,75%) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka ketika semua variabel independen berada pada nilai nol. Koefisien negatif (−0,08%) pada Volume Usaha Koperasi menandakan bahwa peningkatan aktivitas koperasi dapat memiliki dampak negatif pada tingkat pengangguran terbuka dalam artian lainnya dapat dikatakan pada daerah tersebut koperasi masih memiliki kualitas yang mayoritas tidak sehat atau memiliki kualitas yang kurang. Koefisien positif (0,08%) pada Omzet UMKM menunjukkan bahwa pertumbuhan omzet UMKM dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Koefisien positif yang lebih besar (2,01%) pada PDRB menunjukkan bahwa PDRB yang tinggi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Disisi lainnya pada persamaan kedua tersebut, variabel volume usaha koperasi, omzet UMKM, PDRB berpengaruh langsung secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan nilai prob (*f-statistic*) sebesar 0,0000 kurang dari 0,10. Artinya, kenaikan atau penurunan dalam ketiga variabel tersebut dapat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama. Sedangkan volume usaha koperasi tidak berpengaruh secara parsial dengan nilai probabilitas 0,3898 lebih dari 0,10, Ini berarti bahwa perubahan dalam volume usaha koperasi tidak secara langsung mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. dan omzet UMKM memiliki pengaruh secara parsial dengan nilai 0,0740 kurang dari 0,10. Artinya, perubahan dalam variabel X2 dapat memiliki dampak langsung pada tingkat pengangguran terbuka dalam daerah tersebut. Serta Z yaitu PDRB tidak mempunyai dampak nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka secara langsung dengan nilai 0,3439 lebih besar dari 0,10. Ini berarti bahwa, meskipun ketiga variabel dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan, akan tetapi pengaruh ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada tingkat parsial kecuali pada omzet UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil tersebut jika dikaitkan dengan lapangan atau kontribusi SKPD terkait, maka dapat dikatakan bahwa perlunya konsolidasi antar SKPD dalam melakukan kebijakan atas program-program yang masing-masing dimiliki dan bersinergi serta kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, antar SKPD bisa lebih maksimal dalam menekan tingkat pengangguran terbuka baik antar wilayah maupun se-provinsi. Karena, jika dilakukan dengan kinerja mandiri tanpa adanya keterikatan dalam pelaksanaannya, ini menghasilkan output yang jauh dari kata optimal bahkan sangat tidak bisa memberikan kontribusinya dalam penekanan TPT dan keberlangsungan ekonomi berkelanjutan. Seperti yang disebutkan oleh Maulida & Yunani (2017), UMKM dapat didorong dengan beberapa kebijakan baik dari pemerintah serta Lembaga keuangan lainnya disertai dengan memperkuat SDM yang ada seperti memaksimalkan peran Wanita serta memaksimalkan implementasi kebijakan UMKM. Hal ini diperkuat dengan kajian Yunani (2018) yang menyebutkan bahwa UMKM dapat memberikan peluang akan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat, hal tersebut jika dikaitkan dapat menekan TPT yang ada didaerah terkait.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mujiyanti (2023) yang mana menyebutkan bahwa koperasi memiliki kontribusi yang minim terhadap PDB dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Maka, jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini utamanya dalam pengaruh langsung menanggulangi tingkat pengangguran terbuka masih jauh dari kata optimal, walaupun dari segi mendorong kesejahteraan atas kemandirian koperasi dan anggotanya sendiri sudah tergolong baik sama seperti yang dikatakan Ubaidillah (2016). Sedangkan, keterkaitan akan UMKM dalam hasil penelitian ini sejalan dengan tulisan oleh Muzdalifah, (2021), Juanda et al., (2023), Salim et al.,

(2022), dan Supandi et al., (2022) dimana UMKM dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dengan peningkatan omzet UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran yang ada dengan kebutuhan kerja yang tersedia.

Hasil penelitian ini juga secara langsung sejalan dengan Ardina & Wihastuti, (2021) tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak terlalu dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Sementara itu, Wahab (2022) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Namun, semuanya itu bisa diperbaiki dengan kinerja secara bersamaan antara volume usaha koperasi, omzet UMKM dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka yang memiliki pengaruh secara bersama-sama. Ini dapat dijadikan bukti bahwa, jika dengan kekuatan atas keaktifan koperasi dan UMKM serta kontribusi PDRB daerah yang baik dapat menjadi mesin pencipta lapangan kerja secara bersinergi. Dengan koperasi dan UMKM yang terus berkembang dapat mengurangi tingkat pengangguran karena meningkatkan permintaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi dan layanan. Keberlanjutan ini dapat diperkuat dengan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi dan UMKM serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan harapan dapat menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja, yang kontribusinya pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaruh Volume Usaha Koperasi Dan Omzet UMKM Melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Dari data yang diperoleh untuk uji *Sobel* pada volume usaha koperasi terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB dengan data dari persamaan regresi yang ada kemudian dilakukan uji *Sobel*, yaitu:

Tabel 3. Hasil Uji Sobel Test 1

	Input	***Test Statistic:***		***Std.Error:***	***p-value:***
a.	-0,083370	*Sobel Test*	-0,64240293	0,26118025	0,5206116
b.	2,012510	*Arolan Test*	-0,50783651	0,33038775	0,611568
S_a	0,096085	*Goodman Test*	-1,01594915	0,16514897	0,3096536
S_b	2,105830	*Reset all*	*Calculate*		

Sumber: Data diolah dengan website https://quantpsy.org/sobel/sobel.htm,2024

Berdasarkan data yang diperoleh untuk uji *Sobel* pada omzet UMKM terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB dengan data dari persamaan 2 pada uji sobel yaitu:

Tabel 4. Hasil Uji Sobel Test 2

	Input	***Test Statistic:***		***Std.Error:***	***p-value:***
a.	0,085060	*Sobel Test*	0,84671369	0,20217472	0,39715473
b.	2,012510	*Arolan Test*	0,76176938	0,22471906	0,44619766
S_a	0,046586	*Goodman Test*	0,9683546	0,17677832	0,3328673
S_b	2,105830	*Reset all*		*Calculate*	

Sumber: Data diolah dengan website https://quantpsy.org/sobel/sobel.htm,2024

Berdasarkan kedua pengujian Sobel tersebut dapat didapatkan bahwa variabel volume usaha koperasi dan omzet UMKM melalui PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka berdasarkan hasil persamaan regresi dua dengan model terbaiknya yaitu FEM. Maka, dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan nilai *P-value* 0,5206 lebih dari 0,05 dan tes *statistic sobel* -0,6424 untuk volume usaha koperasi dan nilai *P-value* 0,3971 lebih dari 0,05 dan tes *statistic sobel* 0,8467 untuk omzet UMKM. Dengan kata lain,

PDRB tidak berperan sebagai pemediasi yang efektif dalam hubungan antara Volume Usaha Koperasi dan Omzet UMKM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian Wahab (2022) dalam hal variabel pemediasi, dalam penelitiannya, secara tidak langsung terhadap variabel independen yaitu Pertumbuhan Penduduk, Upah dan Inflasi walaupun berbeda, akan tetapi sama-sama tidak memiliki pengaruh melalui variabel intervening yang sama yaitu PDRB terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran itu sendiri. Disisi lainnya, dengan hasil sebelumnya juga memperjelas dan mempertegas bahwa PDRB dan tingkat pengangguran hanya berpengaruh secara langsung dan bersama-sama atas dorongan variabel utama lainnya yaitu volume usaha koperasi dan omzet UMKM bersinergi untuk saling membantu tapi masih belum bisa menekan tingkat pengangguran terbuka secara tersendiri pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan terkecuali pada omzet UMKM. Maka dari semua rangkaian hasil dan pembahasan di atas didapatkanlah kerangka hubungan antar variabel sebagai berikut:

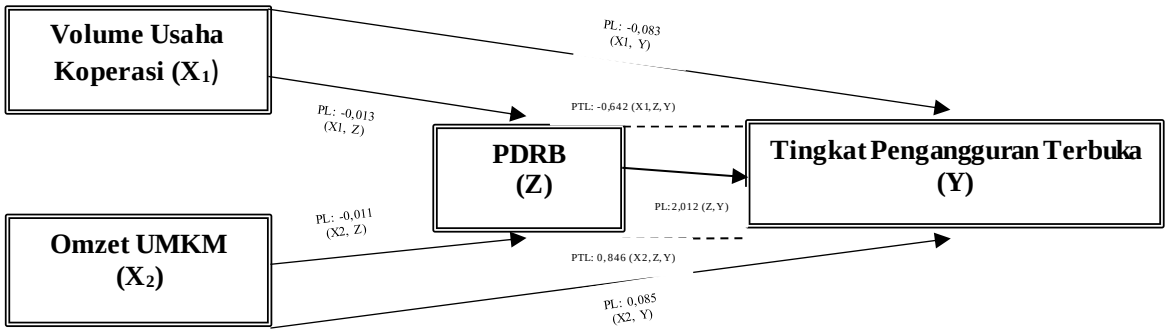

PL : Pengaruh Langsung
PTL: Pengaruh Tidak Langsung

Gambar 7. Koefisien Hubungan antar Variabel

Dilihat dari output koefisien negatif pada Koperasi terhadap PDRB ataupun TPT dapat memberikan penjelasan seperti penelitian Mujiyanti (2023), dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa koperasi memiliki tantangan yang berat dalam perkembangannya di Indonesia apalagi daerah. Fokus utamanya adalah pada sumber daya manusia, modal, kesadaran anggota, persepsi masyarakat, dan tingkat persaingan. Persaingan ini jika dikaitkan dengan variabel bebas lainnya yaitu UMKM, kontribusinya terhadap PDB serta tingkat penyerapan tenaga kerja masih minim sekali. Disisi lainnya, peneliti sudah berusaha melakukan proxi pengganti dengan menggunakan variabel bebas seperti SHU, Modal dan Aset tapi hasil yang sama dalam perkoperasian maupun UMKM tetap mengeluarkan output yang masih sama.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat adanya pengaruh langsung pada volume usaha koperasi, omzet UMKM, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka secara simultan. Namun, secara parsial hanya omzet UMKM yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan, volume usaha koperasi, omzet UMKM berpengaruh langsung terhadap PDRB baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh secara tidak langsung (melalui Produk Domestik Regional Bruto) pada Volume Usaha Koperasi ataupun Omzet UMKM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun saran yang peneliti harapkan untuk bisa ditindak lanjuti, yaitu seperti adanya peningkatan kerja sama antara koperasi dan UMKM melalui dukungan antar SKPD terkait, peningkatan dukungan terhadap UMKM dari segala aspek pendukung, penguatan

peran koperasi dalam PDRB, evaluasi kebijakan program pertumbuhan ekonomi dan program-program yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dari sektor-sektor lainnya, penguatan kebijakan pendidikan dan pelatihan dalam usaha meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja, dan penelitian lebih lanjut dengan memperdalam faktor lainnya yang dapat berkontribusi terhadap PDRB secara tidak langsung dan terkait penyebab kurangnya kontribusi koperasi pada TPT dan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

Anshar Nur, M., Mutmainah Zulfaridatul Yaqin, S., Yunani, A., Brigjen Hasan Basri, J., & Kalimantan Selatan, B. (2018). The Contribution Of The Forestry Sector To Regional Development Of South Kalimantan Province (Green Grdp Calculation Approach). *Jurnal Ecoplan*, *1*(2).

Ardina, T., & Wihastuti, L. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Umk, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2022*. Https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/202575

Badan Pusat Statistik. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2022*. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2022/05/09/1915/Februari-2022-Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Sebesar-5-83-Persen-Dan-Rata-Rata-Upah-Buruh-Sebesar-2-89-Juta-Rupiah-Per-Bulan.Html

Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/52/Produk-Domestik-Regional-Bruto--Lapangan-Usaha-.Html#Subjekviewtab1

Billiet, A., Dufays, F., Friedel, S., & Staessens, M. (2021). The Resilience Of The Cooperative Model: How Do Cooperatives Deal With The Covid-19 Crisis? *Strategic Change*, *30*(2), 99–108. Https://Doi.Org/10.1002/Jsc.2393

Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *8*(2), 127–135. Https://Doi.Org/10.23960/Jep.V8i2.45

Hermanto, B. (2021). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Koperasi Dan Umkm Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Pengangguran Se-Jabodetabek. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 23, Issue 3). Https://Ejournal.Borobudur.Ac.Id/Index.Php/1/Article/Download/872/806

Juanda, R., Risky, M., & Ilham, R. N. (2023). *The Influence Of Growth Of Micro Small And Medium Enterprises (Umkm) And Unemployment On Growth Indonesian Economy*. *3*. Https://Radjapublika.Com/Index.Php/Ijebas/Article/View/675/551

Karmini, K., Karyati, K., & Saroyo, S. (2021). Analisis Kemampuan Koperasi Di Kalimantan, Indonesia Dalam Menghasilkan Pendapatan. *Jurnal Riset Pembangunan*, *3*(2), 55–65. Https://Doi.Org/10.36087/Jrp.V3i2.75

Kuncoro, M. (2017). *Indikator Ekonomi*. Upp Stim Ykpn Yogyakarta.

Lastrapes, W. D. (1993). New Keynesian Economics, Volume 2 : Edited By N. Gregory Mankiw And David Romer, Mit Press, 1991, 450 Pp. *International Review Of Economics & Finance*, *2*(4), 425–427. Https://Doi.Org/10.1016/1059-0560(93)90015-I

Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro* (3rd Ed.). Salemba Empat.

Maulida, S., & Yunani, A. (2017). *Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Berbagai Aspek Ekonomi*. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=Jsgkofuaaaaj&Citation_For_View=Jsgkofuaaaaj:4topqqg69kyc

Mckillop, D., French, D., Quinn, B., Sobiech, A. L., & Wilson, J. O. S. (2020). Cooperative Financial Institutions: A Review Of The Literature. *International Review Of Financial Analysis*, *71*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Irfa.2020.101520

Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia Dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1026–1029. Https://Doi.Org/10.37034/Infeb.V5i3.653

Muzdalifah. (2021). Umkm Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Di Kalimantan Selatan. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*. Https://Lkepd.Ulm.Ac.Id/Umkm-Dan-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Di-Kalimantan-Selatan/

Nugraha, G. (2022). Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Keuangan Bisnis*. Https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Peran-Koperasi-Dalam-Perekonomian-Di-Indonesia/

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. (2022). *Rpjmd Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Perda*.

Pemerintah Kalimantan Selatan. (2022, July 11). *Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan*. Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan.

Perwira, A., & Laila, Y. (2020). Kontribusi Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1), 14–21. Https://Doi.Org/10.36269/.V3i1.289

Rudianto. (2010). *"Akuntasi Koperasi" (Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)* (2nd Ed.). Erlangga.

Salim, M. N., Eri, M., Ismail, S., Abd Rahman, N. H., Harniyati, H., Darwati, S., & Murti, W. (2022). Determinants Of Msmes Growth And Its Impact On Income And Unemployment: Cases Of Indonesia And Malaysia. *International Journal Of Academic Research In Economics And Management Sciences*, *11*(1). Https://Doi.Org/10.6007/Ijarems/V11-I1/12305

Sitio, A., & Halomoan Tamba. (2001). *Koperasi Teori Dan Praktek*. Erlangga.

Soesastro, H. (2005). *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Kanisius.

Sukirno, & Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd Ed.). Pt.Raja Grafindo Persada.

Supandi, A., Astuty, P., & Murti, W. (2022, August 16). *The Effect Of Msmes Growth On The Open Unemployment Rate In West Java Province*. Https://Doi.Org/10.4108/Eai.16-4-2022.2320070

Tambunan. (2012). *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Lp3es.

Ubaidillah. (2016). Peranan Volume Usaha Dalam Mencapai Keberhasilan Koperasi. *Jurnal Khasanah Ilmu No.1*, *7*(Cooperative, Business Volume, The Independence Of Cooperative), 1–6. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31294/Khi.V7i1.481

Wahab, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Upah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *8*. Https://Doi.Org/10.35906/Jep.V8i2.1149

Widiartin, P. I., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Modal Pinjaman Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jmi/Article/View/6737

Yunani, A. (2018). Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Mikro Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Ecoplan*, *1*(1). Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=Jsgkofuaaaaj&Cstart=20&Pagesize=80&Citation_For_View=Jsgkofuaaaaj:Tyk-4ss8fvuc

Zada, C., & Sopiana, Y. (2021). Penggunaan E- Wallet Atau Dompet Digital Sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi Umkm Di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *4*(1), 251–268. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=Blcmsuwaaaaj&Citation_For_View=Blcmsuwaaaaj:Tyk-4ss8fvuc

Inklusivitas Perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022: Pendekatan Model Miyazawa

Ahmadi Murjani[1)*], Akhmad Rifani[2)], Muhammad Febrian Rizky Ramadhan[3)],
[1) 2) 3)] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

[*] E-mail corresponding author: amurjani@bps.go.id

Ecoplan

Submitted: Feb 24, 2024
Accepted: Apr 1, 2024
Published: Apr 30, 2024

Abstract *- One of the goals and missions of achieving sustainable development is implementing economic development that adheres to the principle of inclusivity. Therefore, policymakers in a region must identify whether the economic development undertaken is already inclusive. Following these results, it is essential for policymakers to also conduct evaluations to determine the effectiveness of the policies made in realizing inclusive economic development. These two aspects can be addressed by applying the Miyazawa Input-Output Table. Meanwhile, over the past three years, Hulu Sungai Utara Regency has experienced a range of economic and social phenomena that necessitate further study of economic inclusivity. As a result of these conditions, the Regency has been selected as the locus for this research. The findings on the economic inclusivity in this Regency are expected to serve as a reference for policy in developing the economy of Hulu Sungai Utara. Based on the results, it is known that the economy in Hulu Sungai Utara Regency has not yet been fully inclusive. Investments in sector code E (Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling), sector code A (Agriculture, Forestry, and Fishery), sector code C (Manufacturing Industry), and sector code J (Information and Communication) have the potential to increase the welfare of low-income communities, which would then yield an inclusive economic development in the area.*

Keywords: ***Input Output Table; Miyazawa; Inclusive; South Kalimantan; Hulu Sungai Utara.***

Abstrak - Salah satu target serta misi agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan pembangunan ekonomi yang memperhatikan asas inklusivitas. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan di suatu wilayah untuk dapat mengidentifikasi apakah pembangunan ekonomi yang telah dilakukan sudah inklusif. Kemudian dari hasil tersebut, tentunya pengambil kebijakan juga perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah dibuat dalam mewujudkan terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif. Dua hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pemodelan Tabel Input-Output model Miyazawa. Di sisi lain, Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir mengalami serangkaian fenomena ekonomi dan sosial yang memerlukan pengkajian inklusivitas ekonomi yang lebih lanjut. Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, Kabupaten ini dipilih sebagai lokus penelitian. Hasil pengkajian inklusivitas ekonomi terhadap Kabupaten ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi kebijakan dalam membangun perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan temuan yang didapatkan, diketahui bahwa perekonomian di Hulu Sungai Utara belum bisa dikatakan sepenuhnya inklusif. Investasi di sektor kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), sektor kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), sektor kode C (Industri Pengolahan), dan sektor kode J (Informasi dan Komunikasi) berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan rendah di Hulu Sungai Utara, yang kemudian mewujudkan terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Tabel Input Output; Miyazawa; Inklusif; Kalimantan Selatan; Hulu Sungai Utara.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan dalam bidang ekonomi akan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi modal utama bagi penciptaan lapangan kerja yang baru dan membuka kesempatan untuk menciptakan peluang ekonomi di masa yang akan datang. Kemajuan sektor ekonomi suatu daerah, tentunya akan berhubungan dengan aspek lain seperti kesempatan kerja, tingkat pengangguran, laju inflasi, kemiskinan, hingga pembangunan manusia di suatu daerah (Murjani, 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup penting di Kalimantan Selatan, karena tenaga kerja yang terserap pada sektor ini terbilang besar, yakni sekitar 30,13 persen. Ini berarti hampir sepertiga penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan ditampung pada sektor pertanian (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023b). Dilihat dari sisi PDRBnya, sektor pertanian memberikan sumbangsih sebesar 11,40 persen (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023b). Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Kalimantan Selatan setelah sektor Pertambangan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki pola perekonomian yang sedikit berbeda di Kalimantan Selatan. Sektor Pertanian menjadi sektor utama penyumbang perekonomian Hulu Sungai Utara yakni sekitar 15,99 persen (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023c). Dilihat menurut sumbangannya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan *share* sebesar 2,29 persen bagi perekonomian Kalimantan Selatan (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023b).

Dilihat dari kacamata sosial, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki keunikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, yakni pada posisi 4,80 persen pada Agustus 2021, menjadi 3,85 persen pada Agustus 2023. Dilihat menurut angka kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu sungai Utara merupakan yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Meskipun terus mengalami *trend* penurunan setiap tahunnya, namun angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menyentuh angka di atas 6 persen pada bulan Maret 2023 (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023b).

Satu indikator lain yang bisa dilihat pada aspek sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu Kabupaten terendah di Kalimantan Selatan dalam pengukuran IPM. Pada tahun 2023, IPM di Hulu Sungai Utara berada pada angka 71,12, yang menempatkan Kabupaten tersebut sebagai Kabupaten dengan angka IPM terendah kedua di Provinsi Kalimantan Selatan (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023a). Dilihat dari fenomena ekonomi dan sosial yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menimbulkan suatu pertanyaan, apakah dinamika ekonomi di Hulu Sungai Utara sudah dinikmati oleh semua masyarakat luas. Dengan kata lain bagaimana dampak pembangunan ekonomi di Hulu Sungai Utara terhadap distribusi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyentuh pada bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah gerakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memenuhi syarat-syarat pembangunan ekonomi yang inklusif, serta dapat menerapkan pemerataan pembangunan sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Inklusivitas menurut Klasifikasi Bank Dunia

Klasifikasi tingkat inklusivitas ekonomi akibat dari dampak peningkatan permintaan akhir mengacu pada pengklasifikasian Bank Dunia dalam pengkategorian tingkat kesenjangan pendapatan, di mana tingkat ketimpangan diklasifikasikan sebagai ketimpangan tinggi jika *share* kelompok 40 persen bawah bernilai di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika bernilai di antara 12 – 17 persen, dan ketimpangan rendah apabila bernilai di atas 17 persen. Berdasarkan klasifikasi tersebut, apabila dampak dari peningkatan permintaan akhir terhadap sektor-sektor penopang perekonomian menghasilkan distribusi pendapatan dengan ketimpangan yang rendah,

maka pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut dapat dinyatakan sudah inklusif (BPS, 2023).

Tabel Input-Output

Tabel Input-Output merupakan tabel yang berisikan informasi mengenai transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi yang ditampilkan dalam bentuk matriks baris dan kolom. Setiap baris menampilkan alokasi output, sedangkan setiap kolom merepresentasikan pemakaian input dalam suatu proses produksi. Setiap sel dari baris dan kolom tersebut menunjukkan nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi. Nilai yang tertera dalam sel menunjukkan jumlah atau nilai dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu sektor (baris) dan digunakan oleh sektor lain (kolom) dalam proses produksi.

Dalam pembuatan tabel input-output, terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi pertama adalah asumsi homogenitas, di mana setiap sektor hanya memproduksi satu jenis barang atau jasa dengan susunan input yang seragam dan tidak ada substitusi terhadap input dari output sektor lain. Asumsi kedua adalah proporsionalitas, yang berarti kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input sektor itu sendiri. Asumsi yang ketiga adalah additivitas, yaitu total efek dari kegiatan produksi di berbagai sektor adalah hasil penjumlahan dari efek kegiatan masing-masing sektor yang terpisah (BPS, 2021).

Tabel Input-Output Model Miyazawa

Tabel Input-Output model Miyazawa yang diperkenalkan pada tahun 1968 adalah hasil pengembangan dari konsep tabel input-output standar. Dalam model Miyazawa, elemen-elemen seperti upah atau gaji, surplus dari kegiatan usaha, dan pola konsumsi rumah tangga dapat dilihat berdasarkan masing-masing tingkatan pendapatan. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana pendapatan didistribusikan pada berbagai sektor ekonomi. Hal tersebut memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak yang dihasilkan oleh perubahan permintaan akhir terhadap distribusi pendapatan.

Lebih lanjut, model Miyazawa memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif bagaimana perubahan dalam konsumsi, investasi, ekspor, atau kebijakan belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang bervariasi pada berbagai kelompok pendapatan. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, model Miyazawa dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat menengah ke bawah (Miyazawa, 1968). Dengan memberikan investasi secara spesifik pada sektor-sektor tersebut, diharapkan pendapatan masyarakat yang tercakup di strata ekonomi menengah ke bawah dapat meningkat dan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara strata sosial, atau dengan kata lain, penerapan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek inklusivitas menjadi terpenuhi.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pentingnya menciptakan ekonomi yang inklusif telah secara komprehensif dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu. Perekonomian yang inklusif bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi dalam mengekspansi perekonomian di suatu wilayah. Perekonomian yang inklusif juga berperan besar dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menghentikan ketidaksetaraan berkepanjangan (Sternfels, 2021). Jawaban dari pentingnya ekonomi yang inklusif secara garis besar telah terjawab di penelitian-penelitian terdahulu. Adapun topik lanjutan yang menarik untuk dibahas lebih dalam pada tema inklusivitas ekonomi adalah bagaimana cara mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif itu sendiri.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, ditemukan bahwa pada umumnya kajian-kajian terdahulu cenderung berupaya mengetahui pengaruh suatu sektor ekonomi terhadap distribusi pendapatan, yang kemudian sektor ekonomi tersebut digunakan peneliti sebagai instrumen atau media kebijakan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Contohnya, analisis untuk mengetahui pengaruh investasi dan pembangunan sektor Perkebunan (Hardiwan et al., 2019), Industri Pengolahan (Dimas dan Neli, 2022), sektor Pariwisata (Adyaharjanti dan Hartono, 2020), sektor Informasi dan Komunikasi (Imansyah et al., 2023) dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Selain itu, terdapat pula kajian yang melibatkan lebih dari satu sektor berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya peran sektor-sektor

ekonomi yang bersifat *labour-intensive* (sektor ekonomi yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar) dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga yang berpendapatan rendah (Alberti et al., 2023).

Di sisi lain, ditemukan pula kajian-kajian terdahulu yang menggunakan pendekatan metode analisis selain pemodelan Tabel Input Output model Miyazawa dalam menjelaskan peran sektor ekonomi terhadap pendapatan masyarakat maupun sebaliknya (Edinak et al., 2022; Saari et al., 2014). Terdapat pula ditemukan penelitian-penelitian yang berupaya mengidentifikasi pengaruh dari beberapa variabel sosial dan ekonomi terhadap inklusivitas ekonomi dengan pendekatan analisis deret waktu. Adapun variabel-variabel yang memiliki andil dalam membantu terciptanya ekonomi yang inklusif adalah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan (Afriliana dan Wahyudi, 2022; Doumbia, 2019; Iskandar, 2016; Purwanti dan Rahmawati, 2021; Sri Hartati, 2021), Penanaman Modal Asing (Afriliana dan Wahyudi, 2022; Hidayat et al., 2020; Nehemia dan Prasetyia, 2023), Penanaman Modal Dalam Negeri (Hidayat et al., 2020; Nehemia dan Prasetyia, 2023), Angka Partisipasi Sekolah (Dyah Hapsari et al., 2018), Lama Sekolah (Hidayat et al., 2020), Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (Alekhina dan Ganelli, 2023), Redistribusi Fiskal (Alekhina dan Ganelli, 2023), Ekspor Barang/Jasa (Hidayat et al., 2020), Pembangunan sektor Finansial (Doumbia, 2019), dan Infrastruktur (Afriyana et al., 2023; Dimas dan Neli, 2022; Doumbia, 2019).

Dari telaah pustaka juga ditemukan bahwa terdapat berbagai kebijakan yang relevan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif. Contohnya kebijakan pasar kerja, program perlindungan sosial, dan inklusi finansial dapat membantu terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif (Agénor, 2017). Selain itu, kebijakan yang mendukung anak muda dalam berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dalam bidang penyediaan barang dan jasa juga memberikan pengaruh yang signifikan (Varsha Pramod dan Ramachandran, 2023).

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih cenderung berfokus pada pengaruh suatu sektor ekonomi tertentu terhadap distribusi pendapatan, seperti Perkebunan, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan sektor Informasi dan Komunikasi. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak memilih secara spesifik suatu sektor ekonomi dan menganalisis keterkaitannya terhadap inklusivitas ekonomi atau pada pendekatan penelitian ini menganalisis pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat 40 persen bawah, melainkan dengan menggunakan keterkaitan antar sektor ekonomi yang tertuang di tabel input-output untuk mengetahui sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap pendapatan 40 persen bawah. Dengan kata lain, sektor tersebut tidak dipilih berdasarkan preferensi dalam bentuk apapun, melainkan dengan proses analisis pada tabel input-output dari lokus penelitian yang digunakan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini berperan penting dalam memahami bagaimana dampak dari dinamika ekonomi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Pendekatan analisis ini tidak hanya menampilkan sektor kunci ekonomi dan interaksi di antara mereka, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana peningkatan permintaan akhir pada perekonomian mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan memfokuskan pada aspek distribusi pendapatan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan terlaksananya aspek inklusivitas dalam pembangunan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Terdapat tiga jenis data yang digunakan dalam melakukan pemodelan tabel input-output model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022. Tiga jenis data tersebut yaitu data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 dan tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2016 versi 17 lapangan usaha (dengan satuan nilai yang digunakan adalah miliar rupiah).

Tahapan pertama dalam pengolahan data dimulai dengan melakukan pemutakhiran (*updating*) terhadap tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 agar diubah menjadi tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, dengan memanfaatkan metode RAS (Miller dan Blair, 2009). Setelah tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 didapatkan, maka dilakukan regionalisasi terhadap tabel tersebut untuk mendapatkan tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Adapun metode yang digunakan dalam tahapan regionalisasi adalah metode SLQ (*Simple Location-Quotient*). Metode SLQ digunakan untuk mengestimasi koefisien input regional berdasarkan nilai-nilai LQ (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Berikut merupakan persamaan Metode SLQ:

$$LQ_i = \frac{x_i/x_t}{X_i/X_t} \quad (1)$$

di mana x_i adalah nilai output sektor i untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dan x_t adalah nilai total output Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan pada bagian penimbang, X_i adalah nilai output sektor i Provinsi Kalimantan Selatan dan x_t adalah nilai output total Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai output Kabupaten Hulu Sungai Utara diestimasi menggunakan rasio produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku tahun 2022 terhadap total PDRB lapangan usaha Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2022. Untuk pembuatan komponen permintaan akhir (*final demand*) Kabupaten Hulu Sungai Utara, digunakan data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Setelah nilai LQ diketahui, maka besaran koefisien input Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditentukan, yaitu dengan persamaan sebagai berikut:

$$a_{ij}^{HSU} = a_{ij}^{KALSEL}.LQ_i \quad \text{untuk } LQ_i < 1 \quad (2)$$

$$a_{ij}^{HSU} = a_{ij}^{KALSEL} \quad \text{untuk } LQ_i \geq 1 \quad (3)$$

di mana a adalah koefisien input, HSU adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, $KALSEL$ adalah Provinsi Kalimantan Selatan, serta i, j adalah sektor i dan j. Estimasi koefisien teknis tersebut dapat dilakukan terhadap komponen lainnya di dalam tabel input-output, tidak terbatas pada komponen input antara saja (Miller dan Blair, 2009). Setelah mencapai tahap ini, analisis sektor kunci dapat dilakukan terhadap tabel yang terbentuk, yaitu terhadap tabel input-output yang sudah mengalami regionalisasi menjadi tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022.

Dengan adanya tabel tersebut pula, maka pemodelan tabel input-output model Miyazawa sudah dapat dilakukan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa, salah satu keunggulan tabel input-output model Miyazawa dibandingkan dengan tabel input-output standar adalah kemampuan model tersebut dalam menggambarkan dampak distribusional terhadap kelompok pengeluaran, ketika terdapat perubahan pada permintaan akhir. Hal ini dapat digunakan untuk melihat simulasi dampak dari investasi yang dilakukan pada sektor-sektor tertentu terhadap kenaikan pendapatan (upah/gaji) pada setiap kelompok pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kelompok pendapatan pada komponen input primer upah/gaji dan kelompok pengeluaran komponen konsumsi pada permintaan akhir. Setelah didapatkan perluasan kelompok pengeluaran dan pendapatan pada konsumsi dan upah/gaji, maka konsumsi dan upah/gaji tersebut dimasukkan ke dalam matriks input antara.

Perluasan kelompok pengeluaran menggunakan data SUSENAS Provinsi Kalimantan Selatan, yang disaring menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dilakukan pemetaan terhadap konsumsi makanan dan bukan makanan berdasarkan kategori lapangan usaha dengan bantuan tabel pemetaan *The Classification of Individual Consumption According to Purpose* (*COICOP*) ke dalam *Classification of Products by Activity* (*CPA*). Setelah dilakukan pemetaan konsumsi rumah tangga ke dalam 17 lapangan usaha, maka selanjutnya dilakukan pengelompokkan kelompok pengeluaran perkapita pada data SUSENAS ke dalam klasifikasi Bank Dunia, yaitu 40 persen terendah (*Bottom 40%*), 40% persen menengah (*Middle 40%*), dan 20 persen teratas (*Top*

20%) di setiap lapangan usaha. Rasio setiap kelompok pengeluaran per lapangan usaha terhadap total per lapangan usaha akan dikalikan dengan total konsumsi per lapangan usaha dengan maksud memecah pengeluaran per sektor menjadi tiga kelompok pengeluaran.

Pengelompokkan ini juga dilakukan pada data SAKERNAS 2022, yaitu dengan menggunakan variabel upah/gaji dan lapangan usaha. Di dalam proses penggabungan kelompok pengeluaran dan upah/gaji ke dalam tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022, dilakukan proses penyeimbangan baris dan kolom (*balancing*). Hal ini dikarenakan perbedaan total konsumsi dan upah/gaji dari tiga pengeluaran tersebut yang berasal dari dua survei yang berbeda, yakni SUSENAS dan SAKERNAS. Setelah tabel input-output Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022 sudah seimbang, maka bisa dilakukan analisis dampak terhadap distribusi pengeluaran.

Analisis Sektor Kunci dengan Model Input-Output Standar

Analisis sektor kunci memerlukan dua indeks penting, yaitu Indeks *Forward Linkage* (IFL) dan Indeks *Backward Linkage* (IBL). Suatu sektor akan diidentifikasi sebagai sektor kunci apabila memiliki IFL dan IBL lebih besar dari 1 (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Untuk mendapatkan nilai IFL dan IBL melalui tabel input-output standar, digunakan operasi matriks yang dapat diuraikan sebagai berikut:

$$X = (I - A)^{-1}F \tag{4}$$

di mana X matriks total output (berukuran n sektor × 1), I adalah matriks identitas (berukuran n × n sektor), F adalah matriks permintaan akhir (berukuran n sektor × 1), dan A adalah matriks koefisien input/teknis (berukuran n × n) yang didapatkan dari rasio input antara dengan total input. Komponen $(I - A)^{-1}$ merupakan Matriks Kebalikan Leontief yang biasa disebut matriks pengganda output (*output multiplier matrix*). Pada penelitian ini, Matriks Kebalikan Leontief yang digunakan adalah tipe terbuka, di mana fokus sektor yang dianalisis adalah 17 sektor lapangan usaha yang ditujukan untuk mendapatkan nilai IBL dan IFL dari 17 sektor lapangan usaha tersebut.

Jika $G = (I - A)^{-1}$, maka IFL dan IBL dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:

$$IFL_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} g_{ij}}{1/n \sum_i \sum_j g_{ij}}, \tag{5}$$

dan

$$IBL_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_{ij}}{1/n \sum_i \sum_j g_{ij}} \tag{6}$$

di mana IBL_j merupakan Indeks *Backward-Linkage* sektor ke j (posisi kolom pada tabel input-output), IFL_i merupakan Indeks *Forward-Linkage* sektor ke i (posisi baris pada tabel input-output), dan g_{ij} merupakan komponen/isi dari matriks G. Suatu sektor yang memiliki nilai IBL dan IFL lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu merangsang sekaligus memenuhi permintaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektor lainnya, yang dalam hal ini disebut dengan sektor kunci (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Selain itu, sektor yang memiliki nilai IBL lebih dari 1 cenderung lebih banyak membeli output dari sektor lain sebagai inputnya, sektor tersebut disebut sebagai sektor yang berorientasi hulu pada penelitian ini. Sebaliknya, jika nilai IFL dari suatu sektor lebih dari 1, maka sektor ini akan lebih cenderung menjual output ke sektor lain sebagai input sektor lain tersebut, dimaknai sebagai sektor hilir. Identifikasi sektor kunci, hulu maupun hilir bisa digambarkan sebagai grafik 4 kuadran dengan sumbu persinggungan 1 pada IFL dan IBL. Sektor yang bukan sektor kunci, hulu, dan hilir

diklasifikasikan sebagai sektor yang tidak berpengaruh signifikan pada perekonomian suatu wilayah (memiliki nilai IFL dan IBL kurang dari 1).

Model Input-Output Miyazawa

Pemodelan tabel input-output model Miyazawa mengasumsikan bahwa komponen pendapatan (upah/gaji) dan konsumsi merupakan bagian dari komponen input antara (*endogenous*), sehingga pada proses pemodelannya, dilakukan pemindahan kolom konsumsi dan baris upah/gaji ke dalam matriks input antara. Perbedaan lainnya dengan tabel input-output standar adalah dilakukannya pemisahan konsumsi dan upah gaji menurut kelompok tertentu (pada penelitian ini menggunakan klasifikasi Bank Dunia, yaitu pengelompokkan 40 persen terendah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas). Berikut merupakan model input-output Miyazawa (1968) dalam pendekatan matriks:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A_{n\times n} & C_{n\times q} \\ V_{q\times n} & 0_{q\times q} \end{bmatrix} \tag{7}$$

di mana $\bar{A}$ merupakan Matriks Koefisien Augmentasi Miyazawa, A adalah Matriks Koefisien Teknis berdimensi $n \times n$ sektor, C merupakan Matriks Koefisien Konsumsi Rumah Tangga berdimensi $n \times q$ (sektor × kelompok distribusi pengeluaran), V menunjukkan Matriks Koefisien Pendapatan Rumah Tangga berdimensi $q \times n$ (kelompok pendapatan × sektor), dan 0 adalah matriks berisi nilai 0 berdimensi $q \times q$. Matriks kebalikan Leontief dibutuhkan untuk merepresentasikan efek dari dampak perubahan permintaan akhir terhadap kelompok pendapatan pada sektor-sektor perekonomian. Matriks ini bertindak sebagai pengganda terhadap pendapatan sektoral dan rumah tangga. Bentuk matriks kebalikan Leontief untuk Matriks Koefisien Augmentasi Miyazawa pada Persamaan (7) adalah sebagai berikut:

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} (I - A) & -C \\ -V & I \end{bmatrix}^{-1} \tag{8}$$

jika $B = (I - A)^{-1}$, $L = VBC$, dan $K = (I - L)^{-1}$ maka $\bar{B}$ bisa dituliskan

$$\bar{B} = (I - \bar{A})^{-1} = \begin{bmatrix} B(I + CKVB)_{n\times n} & BCK_{n\times q} \\ KVB_{q\times n} & K_{q\times q} \end{bmatrix} \tag{9}$$

di mana KVB bertindak sebagai *Multi-sector Income Multiplier Matrix* atau dengan sebutan lain, yaitu Matriks *Multiplier of Income Formation* (yang disingkat menjadi matriks MIF). Matriks MIF digunakan untuk menjelaskan dampak kenaikan setiap unit permintaan akhir pada suatu sektor terhadap pendapatan pada masing-masing kelompok, baik berupa dampak langsung maupun tidak langsung. Dari matriks tersebut, maka analisis untuk menjelaskan dampak permintaan akhir sektor-sektor perekonomian terhadap distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dapat dilakukan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, berikut ditampilkan kerangka kerja analisis tabel input-output model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022.

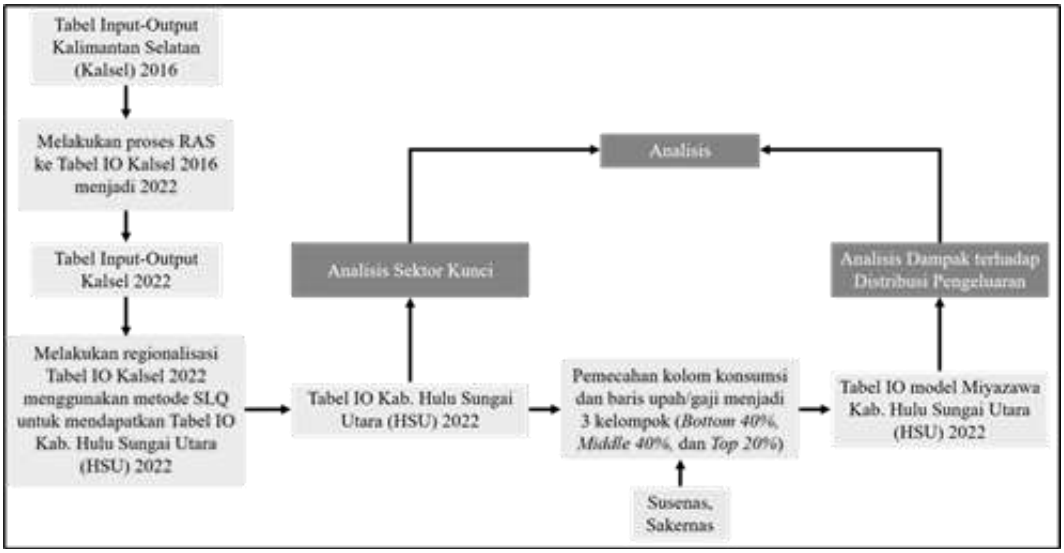

Sumber: Ilustrasi penulis.

Gambar 1. Kerangka Kerja Analisis Tabel Input-Output Model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (2023c), perekonomian di Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang besarannya mencapai 15,99 persen dari total PDRB Hulu Sungai Utara. Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi sektor ini cenderung mengalami penurunan. Contohnya jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai proporsi sebesar 17,35 persen, *share* sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan sekitar 1,36 persen poin. Hal ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya *share* sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2022 mencapai 15,57 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 14,70 persen. Dengan selisih kontribusi yang semakin tidak berbeda jauh, menunjukkan adanya potensi perubahan struktur perekonomian khususnya sektor penopang utama di Hulu Sungai Utara pada masa yang akan datang.

Jika dilihat berdasarkan peringkat *share* PDRB tahun 2022, perekonomian Hulu Sungai Utara ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,99 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,57 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,57 persen), dan Konstruksi (10,84 persen). Yang mana sektor-sektor di atas memiliki peranan setidaknya 10 persen dari total perekonomian dan jika digabungkan memiliki total sebesar 53,97 persen atau melebihi setengah dari perekonomian di Hulu Sungai Utara. Selain itu ada pula sektor-sektor yang memiliki *share* mendekati 10 persen yaitu sektor Jasa Pendidikan (9,48 persen) dan sektor Industri Pengolahan (9,22 persen) (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023a). Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di Hulu Sungai Utara sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor tersebut atau di sini disebut dengan sektor penopang.

Sektor Kunci di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Meskipun sektor-sektor penopang sangat mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah, sektor-sektor lain juga perlu untuk diperhatikan terutama sektor-sektor yang memiliki dampak multiplier yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Suatu sektor dikatakan merupakan sektor kunci apabila memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam menarik dan mendorong sektor lainnya dalam hal peningkatan output sektoral. Kemampuan ini tergambar dalam besaran Indeks Keterkaitan ke Belakang (Indeks *Backward Linkage* atau IBL) dan Indeks Keterkaitan ke Depan (Indeks *Forward Linkage* atau IFL) (Daryanto & Hafizrianda, 2010). Besaran nilai IBL dan IFL

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 bisa diilustrasikan dalam bentuk sebuah grafik 4 kuadran yang bisa dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sektor-sektor kunci pada perekonomian di Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah sektor dengan kode C (Industri), kode D (Pengadaan Listrik dan Gas), kode F (Konstruksi), serta kode J (Informasi dan Komunikasi). Dari semua sektor kunci tersebut, terdapat sektor yang merupakan sektor penopang perekonomian di Hulu Sungai Utara yaitu sektor Konstruksi (dengan *share* 10,84 persen) serta sektor Industri yang memiliki *share* cukup besar pada tahun 2022 yaitu 9,22 persen (peringkat 6 *share* terbesar). Artinya, peningkatan permintaan akhir pada sektor Konstruksi dan Industri di Hulu Sungai Utara selain bisa menggerakkan perekonomian, juga mampu menarik dan mendorong sektor-sektor lain dalam hal peningkatan output di dalam perekonomian.

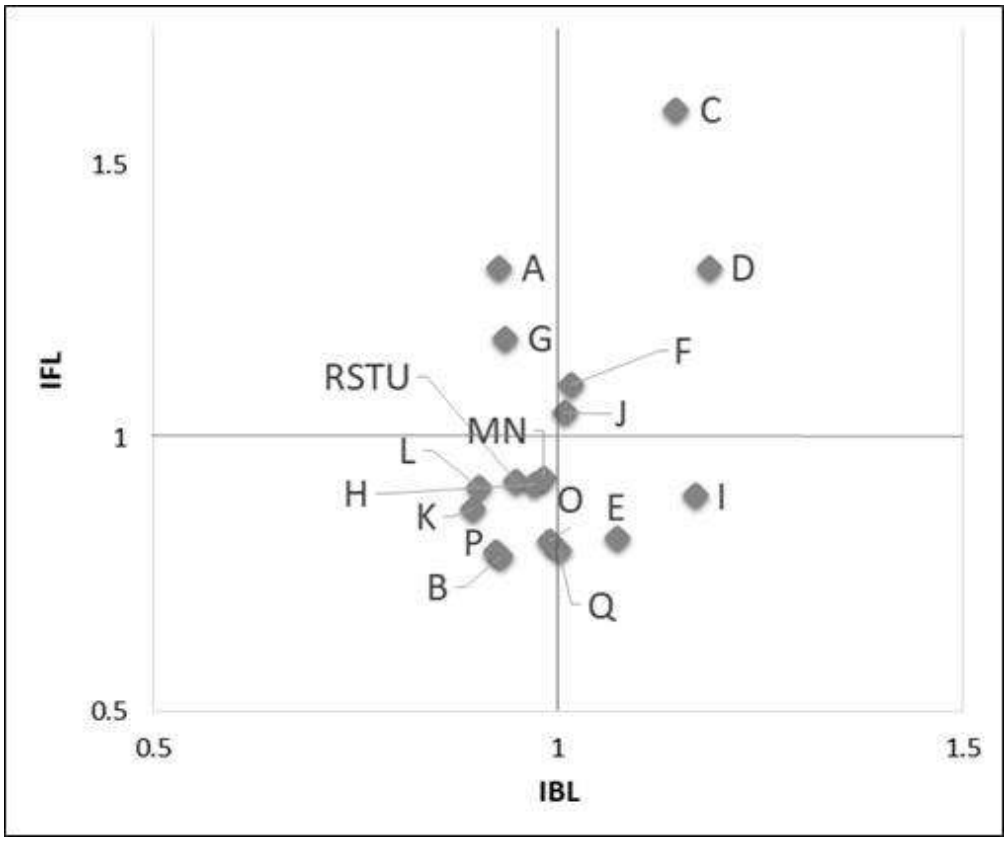

Sumber: Penghitungan penulis.

Gambar 2. IFL dan IBL 17 Sektor Perekonomian di Hulu Sungai Utara, 2022

Selain sektor kunci, perekonomian di Hulu Sungai Utara juga memiliki sektor-sektor yang berorientasi hulu (hanya IBL bernilai lebih dari 1) yaitu sektor dengan kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), kode I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kode Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial). Selain itu juga ada sektor-sektor berorientasi hilir (hanya IFL bernilai lebih dari 1) yaitu sektor dengan kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dan kode G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sisanya merupakan sektor-sektor yang memiliki nilai IBL dan IFL di bawah rata-rata sehingga tidak memiliki efek *multiplier* cukup signifikan.

Dampak Permintaan Akhir Terhadap Distribusi Pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peningkatan output maupun terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan akhir pada sektor penopang maupun sektor kunci merupakan cerminan meningkatnya kinerja perekonomian di suatu wilayah. Akan tetapi manfaat pertumbuhan

ekonomi yang tercermin salah satunya dari peningkatan pendapatan masih belum terjelaskan melalui analisis tabel input-output sederhana. Alat analisis yang bisa menggambarkan distribusi pendapatan akibat dari peningkatan permintaan akhir adalah tabel input-output Miyazawa. Gambaran distribusi pendapatan akibat dari peningkatan permintaan akhir di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dijelaskan oleh matriks *Multiplier of Income Formation* atau matriks MIF yang merupakan matriks pada salah satu kuadran tabel input-output Miyazawa Hulu Sungai Utara tahun 2022. Adapun *share* komponen matriks MIF terhadap total kelompok pengeluaran (yang telah ditranspose) bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. *Share* Matriks MIF Hulu Sungai Utara Tahun 2022 yang Ditranspose

Sektor	Kelompok 40% Bawah	Kelompok 40% Menengah	Kelompok 20% Atas
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,89	5,81	5,46
B. Pertambangan dan Penggalian	4,07	4,67	4,48
C. Industri Pengolahan	7,95	5,46	5,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	4,33	7,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,71	7,47	3,51
F. Konstruksi	5,42	6,97	6,10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	7,27	7,65
H. Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,49	5,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	5,63	5,61
J. Informasi dan Komunikasi	8,20	7,97	3,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	4,16	5,64
L. Real Estat	4,99	5,58	6,23
MN. Jasa Perusahaan	3,90	10,64	5,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,29	4,15	8,24
P. Jasa Pendidikan	4,34	4,15	8,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,95	3,08	6,38
RSTU. Jasa lainnya	7,05	7,17	4,58
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**
***Share* Kelompok**	**12,83**	**38,63**	**48,54**

Sumber: Penghitungan penulis (2023)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jika terjadi kenaikan permintaan akhir di perekonomian Hulu Sungai Utara, maka masyarakat yang paling banyak menerima dampak pada peningkatan pendapatannya adalah golongan 20 persen atas, disusul 40 persen menengah, dan 40 persen bawah. Secara proporsi, 20 persen teratas menerima 48,54 persen, 40 persen menengah menerima 38,63 persen, dan 40 persen bawah menerima 12,83 persen manfaat. Jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia pada (BPS, 2023), proporsi ini menggambarkan tingkat ketimpangan sedang dimana golongan 40 persen terbawah menerima kisaran manfaat pada kisaran 12 - 17 persen. Jadi secara umum, perekonomian di Hulu Sungai Utara belum bisa dikatakan sepenuhnya inklusif jika perekonomian diintervensi secara merata di semua sektor pada permintaan akhirnya. Selain itu, pada golongan 40 persen bawah, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang memiliki *share* tertinggi (13,71 persen) diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,89 persen) yang berarti bahwa sektor-sektor ini yang menyumbangkan efek distribusional tertinggi dibanding sektor lainnya jika terjadi peningkatan permintaan akhir secara merata di golongan pendapatan 40 persen bawah. Untuk golongan 40 persen menengah, sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan *share* terbesar penerima pembentukan pendapatan yaitu 10,64 persen. Sedangkan untuk golongan 20 persen atas, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor Jasa Pendidikan yang memiliki *share* terbesar masing-masing sebesar 8,24 dan 8,31 persen.

Analisis pada tabel input-output Miyazawa adalah analisis dampak kenaikan permintaan akhir sektoral pada distribusi pendapatan, artinya dalam menginterpretasi matriks MIF, selain mengamati *share* terhadap total golongan juga bisa dilakukan analisis *share* terhadap total tiap sektor. Jika digambarkan dalam bentuk grafik dan diurutkan besaran *share* per baris/sektornya, maka bisa dilihat dampak sektoral terhadap distribusi pendapatan yang bisa dilihat pada Gambar 3.

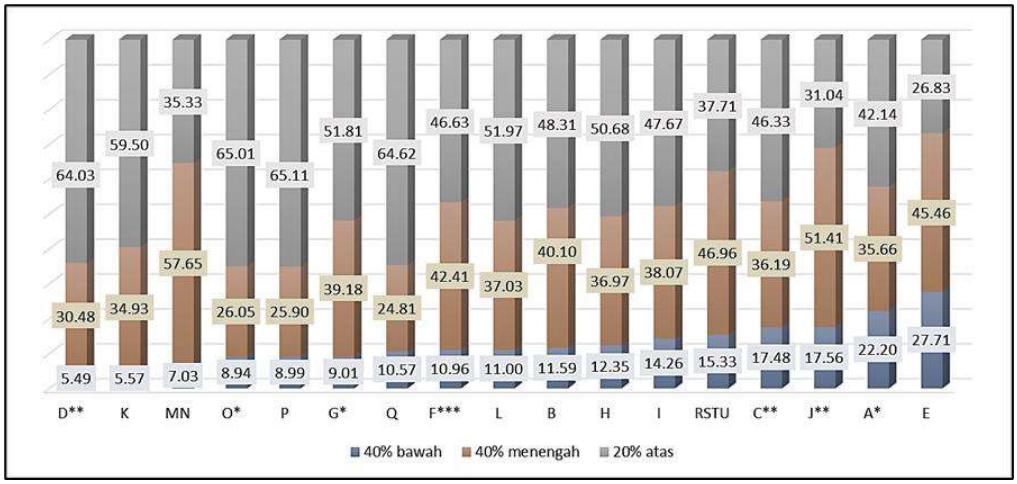

Sumber: Penghitungan penulis (2023

Keterangan: * sektor penopang, ** sektor kunci, *** sektor penopang sekaligus kunci

Gambar 3. *Share* Sektoral Elemen Matriks MIF Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022 (Persen)

Jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia, Gambar 3 menunjukkan bahwa distribusi dampak peningkatan pendapatan akan menghasilkan ketimpangan rendah (golongan 40% bawah menerima manfaat di atas 17 persen) jika permintaan akhir ditingkatkan pada sektor dengan kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), sektor penopang dengan kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), sektor kunci dengan kode J (Informasi dan Komunikasi), dan sektor kunci dengan kode C (Industri Pengolahan). Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Hulu Sungai Utara bisa dilakukan dengan meningkatkan (misalnya) investasi pada sektor-sektor tersebut. Terlebih lagi, terdapat sektor A yang merupakan sektor penopang perekonomian serta sektor C dan J yang merupakan sektor kunci di Hulu Sungai Utara (sektor-sektor dengan dampak pertumbuhan dan efek berantai yang tinggi). Beberapa hal yang bisa diusahakan dalam rangka peningkatan permintaan akhir terkait sektor-sektor dengan dampak inklusif diantaranya adalah: pengembangan bank sampah atau usaha daur ulang, subsidi pupuk, kredit pertanian, perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan, peningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi untuk bisnis, dan terus mendukung dalam pengembangan inovasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penopang perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun

kontribusi sektor-sektor ini terhadap perekonomian menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran struktural dalam ekonomi daerah atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut dalam menghadapi persaingan dan keberlanjutan sektor itu sendiri.

Adapun sektor yang berperan sebagai sektor kunci adalah sektor Industri, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini menandakan bahwa terdapat diversifikasi ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diversifikasi ini penting sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi di pasar domestik, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, dapat diketahui pula bahwa ketika terjadi kenaikan permintaan akhir, manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung lebih banyak dirasakan oleh kelompok 20 persen teratas, diikuti oleh kelompok 40 persen menengah, dan terakhir kelompok 40 persen terendah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya inklusif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hal tersebut berupa pengembangan dan pembangunan sektor-sektor ekonomi yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; dan Industri Pengolahan yang mampu mendorong terwujudnya perekonomian yang inklusif di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adyaharjanti, A., & Hartono, D. (2020). Dampak Pengeluaran Wisatawan Mancanegara terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 33. https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i01.p02

Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi antar Provinsi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies, 1*(1).

Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *5*(1), 1–12.

Agénor, P. (2017). Caught in The Middle? The Economics of Middle-Income Traps. *Journal of Economic Surveys*, *31*(3), 771–791. https://doi.org/10.1111/joes.12175

Alberti, T. M., de Souza, K., & Porsse, A. (2023). Poverty and The Functional Distribution of Income In The Input–Output Framework: In Pursuit of Strategies for Inclusive Growth. *Economic Systems Research*, *35*(4), 614–633. https://doi.org/10.1080/09535314.2022.2067029

Alekhina, V., & Ganelli, G. (2023). Determinants of inclusive growth in ASEAN. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *28*(3), 1196–1228.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Input - Output Indonesia 2016*. https://www.bps.go.id/id/publication/2021/03/31/081f6b0af2c15c524d72b660/tabel-input---output-indonesia-2016.html

Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023a). *Distribusi PDRB Harga Berlaku, 2010-2022*. https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/indicator/52/201/1/distribusi-pdrb-harga-berlaku.html

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022* (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ed.). BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023c). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022* (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ed.). BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2023a). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2021-2023.* https://kalsel.bps.go.id/indicator/26/356/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022* (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Ed.). BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix.* IPB (Bogor Agricultural University).

Dimas, P. A., & Neli, A. (2022). Inclusive Growth Analysis in Central Sulawesi, The Eastern Province of Indonesia 2015-2019. *Asian Journal of Business Environment*, *12*(2), 1–12. https://doi.org/10.13106/AJBE.2022.VOL12.NO2.1

Doumbia, D. (2019). The Quest for Pro-Poor and Inclusive Growth: The Role of Governance. *Applied Economics*, *51*(16), 1762–1783. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1529392

Dyah Hapsari, S. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *2*(2), 85–112. https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.2013.85-112

Edinak, E. A., Sayapova, A. R., & Shirov, A. A. (2022). Endogenization of Household Consumption in The Expanded Input–Output Model. *Studies on Russian Economic Development*, *33*(1), 1–10. https://doi.org/10.1134/S1075700722010063

Hardiwan, D., Amir, A., Junaidi, J., & Delis, A. (2019). The Linkages and Impact of Plantation-Based Sectors on Economy and Poverty in Jambi Province, Indonesia: Miyazawa's Input-Output Model. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, *5*(3), 5–19. https://doi.org/10.51599/are.2019.05.03.01

Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The determinants of inclusive economic growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, *16*(2), 200–210.

Imansyah, M. H., Hartono, D., & Putranti, T. (2023). The Impacts of Digital Economy on Green Economy: The Indonesian Miyazawa Model. *Polish Journal of Environmental Studies*, *32*(2).

Iskandar, A. (2016). Pertumbuhan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal BPPK*, *9*.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions.* Cambridge university press.

Miyazawa, K. (1968). Input-Output Analysis and Interrelational Income Multiplier as a Matrix. *Hitotsubashi Journal of Economics*, *8*(2), 39–58. https://EconPapers.repec.org/RePEc:hit:hitjec:v:8:y:1968:i:2:p:39-58

Murjani, A. (2019). Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *2*(1), 15–29. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29

Nehemia, S. D., & Prasetyia, F. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *2*(1), 26–37.

Purwanti, S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, *4*(1), 32–44. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231

Saari, M. Y., Dietzenbacher, E., & Los, B. (2014). Income Distribution across Ethnic Groups in Malaysia: Results from a New Social Accounting Matrix. *Asian Economic Journal*, *28*(3), 259–278.

Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 79–92. https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74

Sternfels, B. (2021). *The Case for Inclusive Growth*. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Varsha Pramod, P., & Ramachandran, R. (2023). Youth employment for inclusive growth: a review and research agenda in global perspective with special reference to India. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *13*(1), 9. https://doi.org/10.1007/s40497-023-00354-4

Ecoplan Vol. 7 No. 1, April 2024, p. 81-91
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

The Impact of Indonesia Capital City's Relocation to East Kalimantan on the Agricultural Sector of South Kalimantan: IRIO Analysis

Abdil Fadhil Ridho[1)*], M. Handry Imansyah[2)], Muzdalifah[3)]
Development Economic Department, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*E-mail Coresponding Author: Abdiel_banjary@outlook.com

Ecoplan

Submitted: Feb 29, 2024
Accepted: Apr 24, 2024
Published: Apr 29, 2024

Kata Kunci: ***Ibu Kota Negara; Pertambahan Penduduk; Bahan Pangan; Inter-Regional Input-Output (IRIO); Sektor Pertanian Bahan Pangan***

Abstrak *- Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur terhadap sektor pertanian Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu Inter – Regional Input-Output Table (IRIO) tahun 2016 untuk 52 sektor. Dari 34 provinsi di Indonesia, tabel IRIO merangkumnya menjadi 3 wilayah, yaitu Wilayah Kalimantan Selatan, Wilayah Kalimantan Timur, dan Wilayah Lainnya. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui proyeksi kenaikan permintaan akhir bahan pangan di Kalimantan Timur, dengan menggunakan data sekunder berupa proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2020 – 2050, proyeksi jumlah penduduk Ibu Kota Negara RI tahap I (2022 – 2024), dan rata-rata pengeluaran per kapita menurut sub kelompok pangan di provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang bermigrasi ke Kalimantan Timur sekitar 12 persen dari total proyeksi penduduk pada tahun 2024. Kenaikan ini akan meningkatkan konsumsi pangan pada sektor pertanian tanaman pangan sebesar 779,67 miliar (14,88 persen). Khususnya, peningkatan konsumsi produksi pertanian tanaman pangan sebesar 14,88 persen di Kalimantan Timur akan berdampak pada impor sektor pertanian tanaman pangan Kalimantan Timur dari Kalimantan Selatan sebesar 8,83 miliar rupiah dari sektor pertanian tanaman pangan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, sektor pertanian tanaman pangan Kalimantan Selatan merespon permintaan impor tersebut dengan meningkatkan produksinya sebesar 9,07 miliar.*

Abstract - This study aims to measure the import impact of Indonesia Capital City's relocation to East Kalimantan on the agricultural sector of South Kalimantan. The study employed secondary data, namely Inter – Regional Input-Output Table (IRIO) 2016 for 52 sectors. Of the 34 provinces in Indonesia in IRIO table, these provinces are categorized into 3 regions: South Kalimantan Region, East Kalimantan Region and Other Regions. In addition, it tried to determine the projected increase in final demand for foodstuffs in East Kalimantan using secondary data, such as the projections of Indonesian population 2020 – 2050, the population of the Indonesian Capital City in phase I (2022 – 2024), and average expenditures per capita according to sub-food groups in East Kalimantan province. The results showed that the increasing number of people migrating to East Kalimantan Province was around 12 percent from the total population projection in 2024. This increase will raise food consumption in the agricultural food crop sector of East Kalimantan by 779.67 billion (14.88 percent). The increasing consumption of food crop agricultural production by 14.88 percent in East Kalimantan will have an impact on imports from the food crop agricultural sector of East Kalimantan from food crop agricultural sector of South Kalimantan equal 8.83 billion. Next, food crop agricultural sector of South Kalimantan responded that demand by increasing their production to 9.07 billion.

Keywords: Capital City; Population Increase; Foodstuffs; Inter-Regional Input-Output (IRIO); Food Crop Agricultural Sector

INTRODUCTION

In order to increase economic growth in Indonesia, the government is making various efforts and endeavors to accelerate national projects that are considered strategic and have a high level of urgency, such as the National Strategic Project (PSN). PSN is an Indonesian strategic infrastructure project under the leadership of President Joko Widodo to increase economic growth, equitable development, community welfare, and regional development (Perpres RI, 2016). It is regulated through presidential regulations, while the implementation is carried out by the central government, regional governments, and/or business entities, as well as Government-Enterprise Cooperation (KPBU), prioritizing the use of domestic components.

One of the PSN's priority activities is moving the national capital from Jakarta to Penajam North Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan, also included in RPJMN 2020 – 2024. The basis for moving the national capital is to change the national development focus, which mainly remains Java-centric to Indonesia-centric. Thus, the development is hoped to represent national identity and diversity. Besides, moving the capital city from Java Island to Kalimantan Island is an effort to promote equal and better delivery of social welfare between regions in Indonesia.

Based on Presidential Regulation of 2022 No 63, the relocation of the capital city will be undertaken in five phases. Phase 1 is the initial stage of development and relocation, carried out in 2022 – 2024. In this first phase, the development focuses on the movement of civil servants (ASN), the national army (TNI), the national police (POLRI), and other residents, such as their family members and workers. The transfer of representation from the executive, legislative, judiciary, ASN, and TNI/POLRI will be carried out in 2024. To prepare for this transfer, government offices and housing for ASN, TNI, and POLRI are currently constructed, paired with all environmental infrastructure as well as public and social facilities. Accommodation infrastructure and other facilities, such as food and beverage, are also prepared for construction workers, defense forces, and security elements to secure the site. The total population of the capital city and its existing residents in 2024 is projected to be around 488,409 people. Details of the projected population of the Indonesian Capital City in Phase 1 are provided in the following table:

Table 1. Projected Capital City Population in Phase I (2022 – 2024) (In Person)

No	Population	2022	2023	2024
1	**Total manpower**	**15,713**	**16,313**	**77,398**
1.1	State Civil Servants (ASN)	-	-	
1.2	Ministry of Defense/TNI, Polri, BIN, BSSN, and Bakamla	-	-	60,000
1.3	Employees of independent state institutions/public bodies	-	-	485
1.4	Industry workers in the capital city	-	-	-
1.5	Workers in the supporting service sector who are induced by industry in the capital city	-	-	-
1.6	Construction workers during the construction of the Indonesian capital city	15,713	16,313	16,913
2	**Dependent Population**	**16,354**	**16,979**	**257,675**
2.1	ASN family members	-	-	
2.2	Family members of the Ministry of Defense/TNI, Polri, BIN, BSSN, and Bakamla	-	-	240,000
2.3	Family members of employees of independent state institutions/public bodies	-	-	72
2.4	University students	-	-	-

2.5	Families of industry workers in the Indonesian capital city	-	-	-
2.6	Family of workers in the supporting service sector working for industries in the capital city	-	-	-
2.7	Families of construction workers during the construction of the Indonesian capital city	16,354	16,979	17,603
3	**Number of Existing Populations within the delineation of Capital City**	**150,612**	**151,968**	**153,336**
	Total Population	**182,679**	**185,260**	**488,409**

With the appointment of East Kalimantan as Indonesia's capital city, the population in the province is projected to increase following people's migration into that area. This migration will surely have some impacts, such as the increasing food demand in the province. However, the land topography of East Kalimantan poses a challenge in increasing food production in the region. As presented in Picture 1, the land topography consists of slopes above 15 percent. In fact, the development of food crops is only possible in flat and sloping areas with a slope of 0 and 15 percent (0 - 15%) (Regional Regulation Concerning the RPJMD of East Kalimantan Province, 2019). Therefore, East Kalimantan needs to import food from other provinces to meet the food demand in that region.

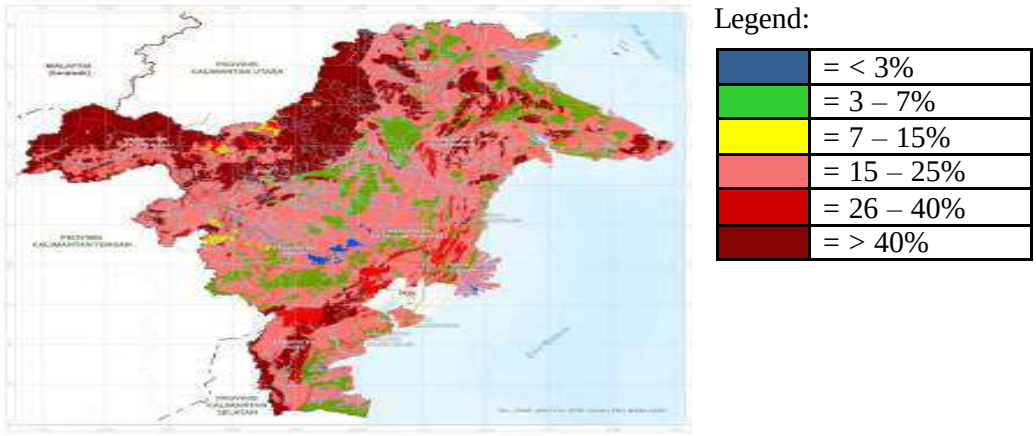

Picture 1. Topographic Map of East Kalimantan

One of the provinces that is more likely to supply food is South Kalimantan Province. With an area of 3.7 million hectares, this province has the largest rice fields compared to other provinces in Kalimantan. Therefore, South Kalimantan has strong food security and is likely to become a national rice granary. Based on the Food Security Index (IKP) issued by the National Food Agency, South Kalimantan's score on the food security index is 81.05, ranking fourth best from all provinces in Indonesia behind Bali (85.19), Central Java (82.95), and South Sulawesi (81.38) (Badan Pangan Nasional, 2022). This score emphasizes South Kalimantan's capacity to meet food conditions as reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality.

Moreover, based on the role of the GRDP of South Kalimantan Province in the last five years, the agricultural sector of South Kalimantan Province is the second largest sector that supports the province's economy after the mining and quarrying sector. In 2022, the agriculture, forestry, and fisheries sectors contributed 11.4 percent to South Kalimantan's GRDP (BPS Kalimantan Selatan, 2023). This indicates that the agricultural sector has a very important role in the economy of South Kalimantan.

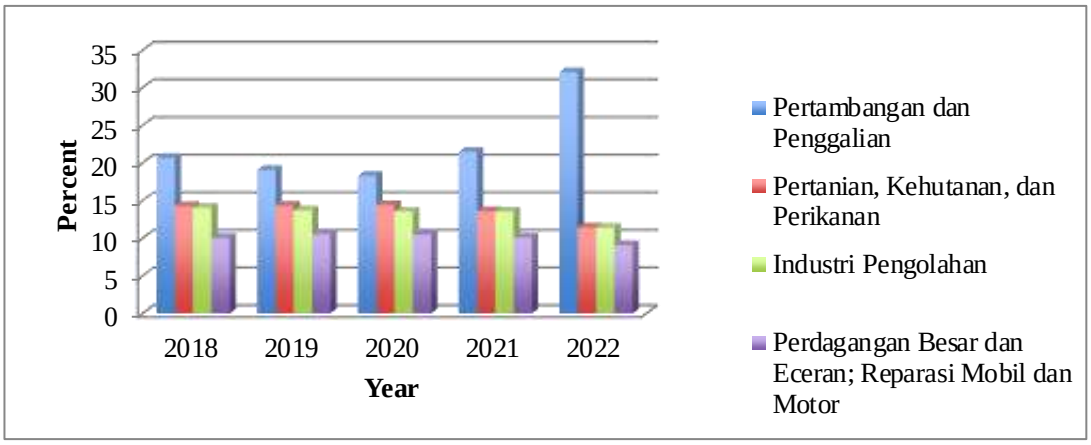

Figure 2. GRDP of South Kalimantan Province based on Current Prices According to Business Fields (Percent) 2018 – 2022

As the gateway to the new national capital, South Kalimantan is projected to not only meet regional food needs not only in South Kalimantan but also in the new national capital. It is certain that providing food for the new national capital will be a challenge for the South Kalimantan Province in the future. They need to increase food crop production capacity; thus, a structured agricultural development roadmap is needed.

A good economic structure development planning, which is still partial, is certainly required to avoid the failure of planning implementation. To achieve that, this research conducts an analytical model that can unify regional development planning. Of several analytical tools, one tool that is considered suitable for studying the overall relationship of sectors between regions is Inter-Regional input-output (IRIO) analysis. Therefore, in this research, the author attempts to measure the import impact of moving the country's capital from Jakarta to East Kalimantan, particularly on the agricultural sector of South Kalimantan based on IRIO analysis.

LITERATURE REVIEW

Economic development must be viewed as a process in which the interrelationships and mutual influences of economic development factors are interrelated. Todaro and Smith (2003) argued that development must be conceived of as a multidimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes, and national institutions. Quality development can promote the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of economic growth. In addition, it must represent the whole gamut of change by which an entire social system is tuned to the diverse basic needs and desires of individuals and social groups within that system. It moves away from a condition of life widely perceived as unsatisfactory toward a situation or condition of life regarded as materially and spiritually better. It is necessary to note, however, that economic development not only promotes benefits but also poses some issues.

On a national scale, the development process so far has apparently made quite large and complex development problems. A development approach that greatly emphasizes macroeconomic growth tends to ignore large development gaps between regions (Rustiadi et al., 2009). Investment and resources are absorbed and concentrated in certain cities and growth centers, while hinterland areas experience excessive resource depletion. For this reason, the concept of regional development is linked to aspects of spatial management, which has become a model for regional economic growth with regional development theory. This concept emphasizes the existence of economic growth centers in regional entities (growth poles). Growth poles can be interpreted in two ways, namely functionally and geographically. Functionally, a growth pole is a concentrated location of business groups or industrial branches, which have elements of

dynamism due to the nature of their relationships. These business groups typically can stimulate economic life inside and outside the hinterland (Tarigan, 2005). However, the development of an area usually affects the area's population growth and density (Rustiadi et al., 2009). As the population increases, the food demand also rises. The relationship between food and population was discussed systematically by R.T. Malthus around the end of the 18th century until the beginning of the 19th century (Rusli, 2012). Malthus (1798) argued that population tends to grow much faster than food.

Regional development cannot be separated from sectoral, partial integration, and integration between development actors (institutions) within and between regions. Sectoral integration requires synergistic functional linkages between development sectors. Thus, every development activity in sectoral institutions is carried out within the framework of regional development (Rustiadi et al., 2009). Sectoral integration means the integration of efficient and synergistic industrial input and output systems. Developing regions show a link between regional economic sectors in the sense that the transfer of input and output of goods and services between sectors is very dynamic. The characteristics of the regional economic structure, which are indicated by the distribution of sectoral contributions and the sectoral linkages of the regional economy, can technically be explained using the Input-Output (IO) Analysis. Baumol, as cited in Nazara (2005), explains that the Input-Output Analysis is an attempt to include a general balance between consumption and production.

Indonesia's effort to move its capital city is not the first in the world. Muluk and Suprayitno (2020) observed six capital relocations in other countries. Some reasons for previous relocations in other countries are to balance the development, to reduce population density, or to maintain military reasons. Rachmawati et al. (2021) stated that there are various backgrounds and driving factors of capital relocation. The driving factors include environmental pressure, pollution, urban heat islands, housing, and disaster. The relocations of Myanmar's Yangon to Naypyidaw and Malaysia's Kuala Lumpur to Putrajaya are the best practices in capital city development that boost new activities and urban extension. In Indonesia, these success stories are expected to repeat. Farida (2021) studied the capital relocation plan from the perspective of regional planning. Based on her research, North Penajam Paser has the potential for spatial and infrastructure development because of its vast land banks and low risks of earthquakes. However, she stated that the consequence of being a capital city is the eventual migration of citizens. Thus, spatial planning must consider sustainability principles with all external impacts on physical environmental changes. Another study was conducted by Amila et al. (2023), who analyzed the impacts and risks of IKN relocation on the economy of Indonesia. Their research showed that IKN relocation has the potential to increase national economic development with a low inflation rate. Further, the growth of industrial areas with downstream value chains will increase people's income, which in turn will reduce economic inequality between Java Island and outside Java Island.

Scholars have used different methods to investigate the effect of capital city relocation. For example, Yusuf et al. (2023) investigated how the capital city relocation may affect the destination region's economic structure using an inter-regional computable general equilibrium modeling. The model considers not only how different economic sectors are interconnected but also how sectors within one province are interconnected with sectors in other provinces. In addition to that, Inter-Regional Input-Output (IRIO) analysis can be considered as a method to measure economic structure within one province and also across provinces. For instance, Mukhyi (2007) researched the role of agricultural sub-sectors and leading sectors in developing the economic area of West Java Province. The research employed the IRIO approach and found the sector margin contribution level in West Java Province, including the processing industry, trade sector, hotels and restaurants, and the agricultural sector (agriculture, livestock, forestry, and fisheries). These sectors accounted for more than 20% of the total GRDP of West Java. This method has also been used in other countries, as demonstrated by Yamada (2015), who constructed a multi-region IO table for the Nagoya metropolitan area in Japan. He explained the characteristics of the economic structure in Nagoya metropolitan city. Meanwhile, Anagnostou

and Gajewski (2021) developed a multi-region IO table for the Polish region, which was then used for macroeconomic simulations, including assessing the response of internal policy impulses or testing the resilience of regional economies to external shocks.

In a much broader sense, Imansyah et al. (2014) researched the global financial crisis in the Indonesian economy using IO analysis simulations. Based on the simulation, if Indonesia decreases exports to the USA, economic growth will decrease by 0.20%. Meanwhile, if they cut off their exports to European Union countries, economic growth will decrease more significantly by 1.06%. The crisis that occurred in the US and the European Union has reduced demand for exports from these countries and several regions of Asian countries. Meanwhile, the impact on employment appears minimal, namely only -0.47% of the total *labor force*. After that, Muchdie et al. (2018) analyzed the trade balance in the Indonesian economy using IO tables for several years: 2000, 2005, 2010, and 2014. The results show that Indonesia's exports have increased significantly during the years they studied. Then, Indonesia's imports also increased significantly. Important sectors, export and import trade partners of the country have been suggested by this research. Third, they also found that the trade balance in the Indonesian economy was a surplus in all years of the study.

METHOD

This research aimed to measure the import impact of Indonesia's capital city's relocation on the agricultural sector of South Kalimantan. This research employed secondary data, such as the Inter-Regional Input-Output Table (IRIO) 2016, for 52 sectors. Of the 34 provinces in Indonesia in IRIO table, these provinces are categorized into 3 regions, namely South Kalimantan Region, East Kalimantan Region, and other regions. In addition, this research tried to determine the projected increase in final demand for foodstuffs in East Kalimantan using secondary data, such as the projections of the Indonesian population in 2020 – 2050, the population of the Indonesian capital city in Phase I (2022 - 2024), and the average expenditures per capita according to subgroups food in East Kalimantan province. The limitations of this research were static comparisons, in which the results of simulations were applied with and without policies without including the element of time.

The analysis technique employed in this research was the Inter-Regional Input-Output (IRIO) analysis. It is used to explain the objectives of the research. The objectives were processed using descriptive analysis and impact analysis. Descriptive analysis is an analysis that explains the structure and roles (contributions) in the IRIO table. On the other hand, impact analysis explains the impacts influenced by changes in final demand in the IRIO table. The impact analysis in this research included the impact of output and import requirements. Output impact analysis shows the formation of sector output, which is influenced by final demand. Using the formula $X = (IA)^{-1} F$, the analysis can clarify the relationship between final demand in each region. Meanwhile, the analysis of the import impact measures the impact of final demand on sectoral import needs in each region. The formula used to calculate the impact of import needs was:

$$M = m^{\wedge} BYx$$

M	=	necessary imports due to final changes
$m^{\wedge}$	=	diagonal of the import coefficient matrix
B	=	inverse matrix / Leontif matrix
Yx	=	changes in food consumption

RESULT AND DISCUSSION

By making East Kalimantan Indonesia's capital, it is certain that the population in the province will increase. With this increase, East Kalimantan's consumption or expenditure will increase, especially in terms of food. According to data from Statistics Indonesia (BPS) of East Kalimantan

2023, the average monthly expenditure per capita according to food sub-groups in East Kalimantan Province is as follows:

Table 2. Average of monthly expenditures per capita according to food sub-groups in East Kalimantan province in 2022

Food Groups	Average Per Capita Expenditure (Rupiah)	Per Capita Expenditure Percentage
(1)	**(2)**	**(3)**
A. Grains	73,149	8.99
B. Tubers	7,190	0.88
C. Fish/meat/squid/shellfish	95,645	11.76
D. Meat	47,589	5.85
E. Eggs and milk	51,114	6.28
F. Vegetables	66,923	8.23
G. Nuts	15,990	1.97
H. Fruits	35,846	4.41
I. Oil and coconut	25,651	3.15
J. Beverage ingredients	22,348	2.75
K. Spices	19,539	2.40
L. Other consumption	18,758	2.31
M. Fast food and beverage	251,135	30.87
N. Cigarette	82,570	10.15
Total Food	**813,447**	**100.00**

Source: Statistics Indonesia (BPS) of East Kalimantan (2022)

The classification of food commodity groups above shows that people's consumption patterns have shifted. Practical and fast foods are now more widely consumed. Table 2 shows that the expenditure per capita of East Kalimantan's people is spent more on ready-made food and beverage products (30.87%), fish/meat/squid/shellfish products (11.76%), and cigarettes (10.15%). For agricultural products, they spend food crops consisting of the grain group by Rp 73,149, the tubers group by Rp. 7,190, and the nuts group by Rp. 15,990. It means that, on average, the East Kalimantan people spend Rp. 96,329 (11.84%) per capita for a month to consume agricultural food products or as much as Rp. 1,155,948 per capita for one year. That number is more or less equivalent to the rice allowance received by civil servants in East Kalimantan. Based on the Regulation of the Director General of the Treasury No. Per/03/PB/2015, the amount of rice allowance given to civil servants every month is 10 kilograms (kg). If the rice allowance is converted to cash, the amount is set at IDR 7,242 per kg or around IDR 72,400 per month.

Meanwhile, the projection of the total population in East Kalimantan province according to Statistics Indonesia of East Kalimantan in 2024 can be seen in the following table:

Table 3. Population projections per regency/city of East Kalimantan province in 2024

No	Regency/City	Population Data
1	Paser	286,990
2	Kutai Kertanegara	789,770
3	Berau	261,830
4	West Kutai	178,740
5	East Kutai	462,990
6	North Sharpener Paser	267,690
7	Mahakam Ulu	34,250
8	Balikpapan City	717,230

No	Regency/City	Population Data
9	Samarinda City	858,080
10	Bontang City	188,290
Total		**4,045,860**
Projection of new residents (migrants) to KIKN based on Presidential Decree 2022 no 63 (Table 1)		**488,409**
Total		**4,534,269**

Source: BPS East Kalimantan (Processed)

Table 3 indicates that the increase in the number of people migrating to East Kalimantan Province is 488,409, or percent from the total population projection in 2024. Based on the data above, it is assumed that consumption of food crops or agricultural products will increase by 779.67 billion (14.88 percent). The basic assumptions can be seen in Table 4 below.

Table 4. Projection of increase in final demand for food crops of agricultural sector products of East Kalimantan province in 2024

Information	Year	
	2022	2024
Per capita expenditures for food crops or agricultural Products in a Year	1,155,948	1,155,948
Population of East Kalimantan	3,859,783	4,534,269
Total Consumption Expenditures for Food Crops Agriculture Sector	4.46 trillion	5.24 trillion
Increase in final demand for food crops or agricultural sector		**779.67 billion (14.88%)**

Source: Data processed by BPS East Kalimantan (2023)

Table 4 illustrates that the annual consumption expenditure per capita of East Kalimantan's people for food crops is Rp. 1,144,948. Meanwhile, consumption expenditure for all the people of East Kalimantan in 2022 is 4.46 trillion rupiah. If the projected population of East Kalimantan in 2024 is 4,534,269 people, the consumption expenditure of East Kalimantan for food crops is estimated at around 5.24 trillion rupiah. Thus, the food demand from the food crops will be 779.67 billion rupiah, increasing 14.88 percent. This estimation can be used as a basis for the shocking simulation of the final demand for the East Kalimantan agricultural food crop sector in the IRIO Table 2016.

The impact of population growth in IKN on the agriculture sector in East Kalimantan

The simulation process in this research was carried out to measure the impact of the capital city relocation on South Kalimantan since the relocation would increase the food demand, especially for products from the agriculture sector in the capital city in East Kalimantan.

Based on this research simulation, the food crop consumption (shocking) goes up to 779.67 billion rupiahs or 14.88 percent in East Kalimantan. This rise will encourage East Kalimantan to import food crops from South Kalimantan by 9.07 billion. In particular, the imports from South Kalimantan are related to the food crops of the agriculture sector (I-01), amounting to 8.83 billion rupiahs, chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industry sectors (I-19), by 129.97 million rupiahs, and the food and beverage industry sector (I-13) with 27.31 million rupiahs.

Table 5. Impact on the import value of the East Kalimantan food crop from South Kalimantan

Sector Code	Sector	Import Value (Million Rupiah)	Percentage
I-01	Food crop agriculture	8,834.79	97.5%

Sector Code	Sector	Import Value (Million Rupiah)	Percentage
I-19	Chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industries	129.97	1.4%
I-13	Food and beverage industry	27.31	0.3%
I-52	Other services	20,21	0.2%

Source: IRIO 2016 table (processed)

To meet the increasing food demand, East Kalimantan needs production materials imported from neighboring provinces, including South Kalimantan Province. Table 5 above shows that East Kalimantan should import food crops from South Kalimantan of 8.83 billion rupiah that will be used as production material for the agricultural sector. The imported goods may be in grain or paddy itself. This import is necessary to meet the additional food demand in that province. Apart from that, the East Kalimantan food crop agriculture sector also needs to import other products, such as fertilizers, pesticides, and herbicides, from the chemical, pharmaceutical, and traditional medicine sectors in South Kalimantan. The import value for these products can reach 129.97 million rupiah.

Based on Table 5, the food crops of East Kalimantan require additional stock from South Kalimantan by 8.83 billion rupiahs. This means South Kalimantan needs to increase its agricultural production by 8.83 billion rupiahs to be exported to East Kalimantan Province. The significant increase in output demand for the South Kalimantan food crop sector has shocked their economic sectors. The results of the shocking simulation that occurred in South Kalimantan can be seen in the following table:

Table 6. The impact of increasing demand for the agricultural sector for food crops in East Kalimantan on the output of South Kalimantan's economic sectors

Sector Code	Sector	Import Value (Million Rupiah)	Percentage
I-01	Food crop agriculture	9.327,3	94,1%
I-05	Hunting and agriculture service	321,16	3,2%
I-33	Wholesale and retail trade, non-cars, and motorbikes	64,78	0,7%
I-19	Chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industries	27,37	0,3%

Source: IRIO 2016 table (processed)

Based on the simulation results, the export demand of South Kalimantan has an impact on the province's economy, such as the increasing production in the agricultural sectors. Table 6 indicates that the food crop agriculture sector responds significantly to East Kalimantan's import demand by increasing its production output by 9.33 billion rupiah (94%). The increasing food crop production influences the output of other sectors, such as increasing the land processing services, fertilization utilizations, post-harvest services, other agricultural support services, hunting sector, paddy trade, rice trade, other agricultural product trade in the wholesale and retail trade sectors, and non-cars and motorbikes. This research estimated that output from the agricultural and hunting services sector increased by 321.16 million rupiahs (3.2%). Meanwhile, the non-car and motorbike wholesale and retail trade sector experienced a slight increase of 64.78 million rupiahs (0.7%). This increase was also followed by the chemical, pharmaceutical, and traditional medicine sectors by 27.37 million rupiah (0.3%). These sectors contribute to producing fertilizer products, planting media, and pesticides.

CONCLUSION

In conclusion, this research estimated that the relocation of the capital city to East Kalimantan would increase population migration to the province by 488,409, or 12 percent higher than the total population projection in 2024. This increase, in turn, raised food consumption in the agricultural sector by 779.67 billion (14.88 percent). It then forced East Kalimantan to import food crops from South Kalimantan to maintain its productivity, which was as much as 9.07 billion. They will import various food crops from South Kalimantan (I-01), reaching 8.83 billion rupiah, such as grains and paddies. In addition, they are more likely to import non-crop products from the chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industries (I-19), such as fertilizers, pesticides, or other chemical products to support planting.

With the demand for importing food crops in East Kalimantan, South Kalimantan responded to it by increasing their production. From the simulation above, the food crop agriculture sector increased its production output by 9.33 billion rupiahs (94%). In addition, other sectors also increased, as demonstrated by the agricultural and hunting services sector growing by 321.16 million rupiahs (3.2%), non-car and motorbike wholesale and retail trade sector boosting their production by 64.78 million rupiahs (0.7%), and chemical, pharmaceutical, and traditional medicine sectors which increased by 27.37 million rupiahs (0.3%). Thus, it is clear that the relocation of the capital city from Jakarta to East Kalimantan will impact the economic structure of South Kalimantan, especially regarding food security. From the simulation above, South Kalimantan can fulfill the demand for imports from East Kalimantan.

Based on the above simulation, this research provides several recommendations. First, the South Kalimantan government is expected to maintain and even increase its agricultural production to keep the stock stable. By so doing, this province can always support food for the new capital city. One of the ways to maintain their agricultural stock is by issuing policies that support farming, such as providing fertilizer, pesticide, and seed subsidies to farmers. In addition, the government can provide business capital in the form of contract farming or known by selling-buying *salam* in Islamic economic. Second, the East Kalimantan government should continue to maintain and increase trade cooperation with South Kalimantan, especially in the food crops or agricultural sector, because South Kalimantan has made a key contribution to supporting food availability for the capital city. Policies that can be considered include creating economic agglomeration through concentrating economic activities to produce mutual benefits and shorten the economic chain. In this way, the trading can be more efficient. Finally, this research suggests that future researchers should develop a study regarding the impact of the relocation of IKN on other sectors. The impact on other provinces that directly border East Kalimantan can also become an interesting issue to discuss.

REFERENCES

Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya*, *2*(1), 10–18.

Anagnostou, A., & Gajewski, P. (2021). Multi-Regional Input–Output Tables for Macroeconomic Simulations in Poland's Regions. *Economies*, *9*(6 Oktober 2021), 1–19. https://doi.org/10.3390/economies9040143

Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan*.

Badan Pusat Statistik Provinsi kalimantan Selatan. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022*. https://doi.org/9302001.63

BPS Kalimantan Timur. (2022). *Statistik Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur*. https://doi.org/3201032.64

Farida, F. (2021). Indonesia's capital city relocation: A perspective of regional planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *9*(3), 221–234. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.12013

Imansyah, M. H., Suryani, Siregar, S., Muzdalifah, & Muttaqin, H. (2014). Impact of Global Financial Crises on the Indonesian Economy: An Input-Output Analysis. *China-USA*

Business Review, 13 No. 9(September 2014), 573–591. https://doi.org/10.17265/1537-1514-2014.09.003

Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. electronic Scholarly Publishing Project.

Muchdie, M., Ulza, E., & Setiawan, E. (2018). Sector and Country Balance of Trade Analysis Based on World Input-Output Database Indonesian Economy. *Ekuilibrium, 13 No. 2*, 109–129.

Mukhyi, M. A. (2007). Analisis Peranan Sub Sektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Provinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO. *Simposium Nasional RAPI*, *VI*, I-8-I18.

Muluk, A., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation. *Journal of Infrastructure and Facility Asset Management*, *2*(March), 73–90.

Nazara, S. (2005). *Analisis Input Output* (P. Rahardja (ed.); Edisi Kedu). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Peraturan Daerah Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Pub. L. No. No 2 Tahun 2019, 423 (2019).

Peraturan Presiden Tahun 2022 No 63, Pub. L. No. 63, 301 (2022).

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pub. L. No. Pepres RI no 3 Tahun 2016, 40 (2016).

Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura Dan Uang, Pub. L. No. PER-03/PB/2015 (2015).

Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., & Permatasari, F. D. (2021). Best Practices of Capital City Relocation in Various Countries : Literature Review. *ICST*, *07004*.

Rusli, S. (2012). *Pengantar Ilmu Penduduk* (Ke Delapan). LP3ES.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah* (A. E. Pravitasari (ed.); Pertama). Yayasan Obor Indonesia.

Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Pertama). Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development* (Eight Edit). Pearson Education Limited.

Yamada, M. (2015). Construction of a multi-regional input-output table for Nagoya metropolitan area, Japan. *Journal of Economic Structures, 4 (11)*, 1–18. https://doi.org/10.1186/s40008-015-0022-7

Yusuf, A. A., Roos, E. L., Horridge, J. M., & Hartono, D. (2023). Indonesian capital city relocation and regional economy's transition toward less carbon-intensive economy: An inter-regional CGE analysis. *Japan and World Economy*, *68*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0922142523000385

Ecoplan Vol. 7 No. 1, April 2024, p. 92-107
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Pemodelan Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Hadi Sutrisno [1)]*, Muhammad Rusmin Nuryadin[2)]
1) Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum, Jombang, Indonesia
2) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*E-mail corresponding author: Hadiundar775@gmail.com

Ecoplan

Submitted: Mar 21, 2024
Accepted: May 07, 2024
Published: May 08, 2024

Keywords: ***Financial Sector; Economic Growth; BVAR; Linear Regression; PPML***

Abstract - *The financial sector has a major influence on economic growth in Indonesia. Good modeling influences the accuracy of economic growth predictions and has an impact on the financial sector. Several models have been introduced to analyze the relationship between the two, but it is necessary to test which of these models is most appropriate. This research aims to find the best model of the financial sector's influence on economic growth in Indonesia. Three models were compared so that the best model was selected, namely the Bayesian Vector Autocorrelation (BVAR), Linear Regression, and Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML) models. The comparison method was carried out to determine the best model from the third model using various criteria, and then an in-depth study of the best model was carried out by considering various diagnostic tests and stability tests. The analysis results show that the BVAR (2) model is the best model among the three existing models. However, some specific analysis results in the regression analysis model (such as the negative impact on CPS) and the PPML model (such as the high R-square) can be taken into consideration by policyholders in the financial sector in determining policies related to these areas for economic growth.*

Abstrak- Sektor keuangan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemodelan yang baik berpengaruh pada akurasi prediksi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari sektor keuangan. Beberapa pemodelan telah diperkenalkan dalam menganalisis hubungan antara keduanya, namun perlu diuji mana di antara pemodelan tersebut yang paling sesuai. Penelitian ini bertujuan mencari model terbaik pengaruh sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penggunaan tiga model dikomparasi sehingga dipilih model terbaik, yaitu model *Bayesian Vector Autocorelation (BVAR), Linear Regression* dan *Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML)*. Metode komparasi dilakukan untuk menentukan model terbaik dari ketiga model tersebut dengan berbagai kriterianya, kemudian dilakukan pendalaman terhadap model terbaik dengan mempertimbangkan berbagai uji diagnostik dan uji stabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa model BVAR (2) adalah sebagai model terbaik di antara ketiga model yang ada. Meskipun demikian beberapa hasil analisis secara spesifik pada model analisis regresi (seperti dampak negatif pada CPS) dan model PPML (seperti tingginya *R-square*) dapat dijadikan pertimbangan bagi pemegang kebijakan di sektor keuangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan bidang- bidang tersebut untuk pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Sektor Keuangan; Pertumbuhan Ekonomi; BVAR; Regresi Linear; PPML

PENDAHULUAN

Sektor keuangan suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya (King & Levine, 1993; Levine, 1991; Pagano, 1993; Schumpeter, 1934). Mengingat sektor keuangan mempunya peranan yang sangat besar dalam perekonomian tidak terkecuali di Indonesia, maka pengelolaan sektor keuangan ini menjadi sangat penting dan diperlukan kehati- hatian.

Pemegang kebijakan harus melakukan kebijakan harus didasari dengan kajian yang cermat, termasuk adanya studi empiris yang mendukung kebijakan tersebut. Beberapa studi empiris terkait sektor keuangan hubungannya dengan perekonomian, dengan berbagai macam hasilnya seperti Demetriades & Hussein (1996) menganalisis hubungan perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di 16 negara, yang menyatakan adanya hubungan *bidirectional* antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ditemukan adanya pola yang berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik institusi, kebijakan maupun implementasinya.

Model pendekatan yang digunakan pada penelitian memungkinkan hasil penelitian yang berbeda, dengan akurasi serta kelebihan dan kekurangan masing- masing. Penelitian dengan data dan variabel yang sama memungkinkan hasil kesimpulan yang berbeda karena pendekatannya berbeda, oleh karena itu diperlukan adanya studi komparasi untuk menganalisis mana model yang lebih sesuai, sehingga meminimalkan error dan meningkatkan akurasi estimasi dan prediksi.

Beberapa model yang biasanya dipakai antara lain pendekatan yang dilakukan oleh Beck et al. (2000) menganalisis hubungan antara sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan *Dynamic Panel* dan *Instrumental Variable* yang melibatkan 63 negara, yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan *financial intermediaries* terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan modal fisik dan tingkat tabungan swasta. Dularif (2010) menggunakan metode VAR dan Kausalitas Granger untuk melihat hubungan kausalitas di antara keduanya, dimana hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Beberapa inidikasi penyebab tidak adanya pengaruh yang signifikan antara lain karena tingkat kredibilitas Bank Sentral yang rendah, rendahnya supervisi dan regulasi, sistem hukum serta kurangnya *good corporat egovernance* di sektor keuangan.

Variabel yang digunakan antara penelitian satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil atau kesimpulan penelitian. Seperti studi yang dilakukan oleh Ang & McKibbin (2007) meneliti perkembangan sektor keuangan berkaitan dengan liberalisasi keuangan di Malaysia periode 1960–2001 dengan menggunakan variabel pada perkembangan sektor keuangan adalah rasio M2 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio kredit sektor swasta terhadap PDB, rasio aset bank komersial terhadap total aset bank, sedangkan variabel Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB per kapita riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang reformasi di sektor finansial tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya perkembangan sektor keuangan karena adanya pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Adu et al. (2013) pada perekonomian Ghana 1960 – 2010, dengan tujuan melihat apakah perbedaan pemilihan variabel dalam pengukuran perkembangan sektor keuangan berpengaruh terhadap hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan variabel perkembangan sektor keuangan sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi Kyophilavong et al. (2014) pada perekonomian di Laos periode 1984 – 2012, dengan memasukkan variabel kontrol *capital stock* perkapita, dimana variabel perkembangan sektor keuangan adalah M2/PDB, menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun sebaliknya.

Pendekatan yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Sehrawat & Giri (2018) pada perekonomian India tahun 1982 – 2014, dimana variabel pertumbuhan ekonomi didasarkan pada PDB perkapita sedangkan variabel perkembangan sektor keuangan didasarkan pada indeks dari indikator perkembangan sektor keuangan. Untuk melihat hubungan jangka pendek dan panjang menggunakan uji *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), sedangkan untuk melihat hubungan kausalitasnya dengan uji kausalitas Toda–Yamamoto. Hasil penelitian menunjukkan adanya

hubungan positif antara perkembangan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Uji kausalitas Toda–Yamamoto memperlihatkan unidirectional dari arah perkembangan sektor keuangan menuju pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan lain yang lazim digunakan yaitu dengan Regresi Linear Berganda seperti studi yang dilakukan oleh Saudah & Nuryadin (2022) dengan memasukkan Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit dan Investasi sebagai komponen dalam variabel sektor keuangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara simultan. Periode data digunakan pada rentang waktu 13 tahun (13 observasi). Pada penggunaan observasi yang sangat besar biasanya metode ini menjadi kurang cocok, di samping itu juga sering terjadi masalah kolinearitas, demikian juga penambahan prediktor yang seringkali justru merugikan karena berpotensi menaikkan *error prediction,* disamping model yang semakin kompleks. Multikolenieritas sering menjadi masalah akibat adanya korelasi antar variabel penjelas sehingga berakibat tingginya *standard error*.

Penggunaan analisis regresi yang juga dimungkinkan adalah Model *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator),* dimana sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah bias yang mungkin terjadi pada regresi poisson menyangkut penaksir parameter yang bias (Silva & Tenreyro, 2015). Pada regresi poisson adalah regresi dimana variabel responnya non-negatif. Biasanya model ini cocok jika regresi linear yang diterapkan pada variabel respon yang ditransformasikan log, namun jika datanya mempunyai nilai 0 maka penggunaan log-linear menghasilkan estimasi yang bias. Untuk mengatasi masalah tersebut PPML menyajikan cara alami sehingga terhindar dari bias.

Penggunaan metode lain yaitu *VAR (Vector Auto Regression),* seperti yang dilakukan oleh Gunawan (2019) yang melihat hubungan kausalitas antara sektor keuangan dengan sektor riil di Indonesia, dimana model ini sebagai salah satu model runtut waktu multivariat yang bisa menangkap hubungan dinamis antar variabel. Beberapa masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan model VAR adalah parameter yang harus diduga terlalu banyak (*over-parameterization*) yang berdampak pada derajat bebas banyak yang hilang. Kelemahan lain dari model VAR yang kompleks adalah munculnya kolinieritas.Untuk menghindari masalah tersebut bisa digunakan model *Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)*. Pendekatan ini relatif baru, dimana runtut waktu, data panel, dan teknik analisis faktor untuk mengatasi serangkaian masalah ekonomi dan keuangan, yang sangat bermanfaat untuk analisis kebijakan maupun manajemen risiko. Namun demikian untuk melihat kehandalan model ini perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

Untuk melihat kehandalan beberapa model tersebut perlu diuji dengan melakukan komparasi, dengan memperhatikan model yang lazim digunakan (yaitu model regresi linear berganda *(Multiple Linear Regression Model),* model yang mampu mengatasi bias pada regressi poisson (yaitu *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator),* dan model yang relatif baru (yaitu *Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mana diantara model tersebut yang mempunyai kehandalan paling baik.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sektor keuangan merupakan seperangkat institusi, instrumen, dan pasar. Adanya alat ukur pembangunan sektor keuangan yang baik sangat penting untuk melihat sekaligus mengevaluasi kemajuan pembangunan sektor keuangan serta melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataanya pengukuran perkembangan sektor keuangan sulit diukur karena adanya kompleksitas dan dimensi yang terdapat didalamnya, sehingga secara empiris sejauh ini biasanya hanya didasarkan pada indikator kuantitatif dalam jangka panjang, seperti rasio simpanan terhadap PDB, rasio kewajiban likuid terhadap PDB, rasio aset lembaga keuangan terhadap PDB.

Dalam praktiknya, sulit untuk mengukur perkembangan keuangan mengingat kompleksitas dan dimensi yang tercakup di dalamnya. Pekerjaan empiris yang dilakukan sejauh ini biasanya didasarkan pada indikator kuantitatif standar yang tersedia untuk jangka waktu lebih lama di

berbagai negara. Misalnya saja rasio aset lembaga keuangan terhadap PDB, rasio kewajiban likuid terhadap PDB, dan rasio simpanan terhadap PDB. (World Bank, 2014).

Pengukuran yang lebih komprehensif seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan *The World Bank's Global Financial Development Database (GFDD)* dengan mengidentifikasi empat variabel proksi yaitu: kedalaman keuangan, akses, efisiensi, dan stabilitas. Dari keempat variabel tersebut terbagi atas dua komponen besar sektor keuangan, yakni pasar keuangan dan lembaga keuangan. (World Bank GFDR Report, 2013).

Studi yang dilakukan oleh Sutrisno et al. (2021, 2022); Sutrisno & Nuryadin (2023) melakukan pengukuran pada sektor keuangan menjadi delapan bagian yaitu: *M1 and M2 growth, M2 money multiplier, Ratio of domestic credit to GDP, Excess real M1 balance, Domestic real interest rate, Lending and deposit rate spread, Commercial bank deposits dan Ratio of bank reserves to bank assets.*

Pada penelitian ini digunakan tiga komponen dalam sektor keuangan yang biasanya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: *M2 growth* (Disingkat M2), *Ratio of domestic credit to GDP* (disingkat RCG) dan *Domestic real interest rate.* (disingkat IR). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju pertumbuhan GDP dari waktu ke waktu.

Perbandingan Model Analisis

Hubungan fungsional antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi digunakan pemodelan *Bayesian Vector Autogressive Model (BVAR)*, Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linear Regression Model*) dan *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator).* Setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing- masing, dimana pemilihan metode akan sangat tergantung pada masalah dan spesifikasi data.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Model Regresi Linier Berganda mempunyai kelebihan dalam memodelkan hubungan yang kompleks, mampu menggunakan beberapa variabel independen sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif hubungan antar variabel independen dan dependen. Jika asumsi terpenuhi maka regresilinear mampu menghasilkan akurasi yang tinggi, serta penerapannya yang relatif mudah terutama terkait dengan perangkat lunak. Beberapa kelemahan Model Regresi Linier Berganda bahwa adanya beberapa persyaratan asumsi, seperti linearitas dan independensi error, keterbatasan dalam menangani data yang hilang, overfitting, dan bisa jadi hasil tidak dapat diinterpretasikan.

Model BVAR pada prinsipnya sama dengan model VAR, yakni sebagai salah satu model multivariat time series yang mampu menjelaskan hubungan dinamis antar variabel. Penggunaan model VAR pada studi makroekonomi biasanya memunculkan masalah pada terlalu banyaknya parameter yang harus diduga, yang berdampak pada semakin banyaknya derajat bebas yang hilang. Masalah lain adalah adanya kolinearitas pada model VAR yang kompleks. Untuk mengatasi itu maka digunakan metode BVAR. Jika VAR biasanya diestimasi dengan OLS, maka pada BVAR lebih menitikberatkan pada aljabar dan kekuatan perhitungan. Koefisien yang diperoleh dari penduga seperti OLS didasarkan pada konsep distribusi sampling, dan koefisien diasumsikan sebagai distribusi sendiri (Kennedy, 2008). Penduga Bayesian model VAR linear dapat diimplementasikan dengan Gibbs Sampler sebagai bagian dari metode Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) (Box & Tjao, 1973).

Penggunaan model BVAR oleh Kennedy (2008), selanjutnya dijelaskan secara mendalam oleh Koop & Korobilis (2010). Pemodelan menggunakan BVAR seperti yang dilakukan oleh Israel et al. (2023) yang membandingkannya dengan model VAR, yang memodelkan hubungan antara uang kuasi dengan banyaknya jumlah uang beredar menggunakan data bulanan periode 8 tahun pada bank sentral Nigeria (CBN). Hasil komparasi kedua model menunjukkan BVAR lebih unggul dibandingkan VAR, hal ini terlihat dari nilai R^2 yang dihasilkan model BVAR lebih tinggi dibandingkan VAR, yang berarti BVAR mempunyai kemampuannya lebih unggul dalam menjelaskan varian data.

Model *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator)* sebagai solusi atas permasalahan bias yang dimungkinkan oleh model regresi Poisson. Pada regresi poisson variabel respon bernilai non negatif, sehingga memungkinkan bernilai nol. Secara umum model

yang cocok dengan regresi ini apabila ditransformasikan log. Ketika variabel respon mengandung nilai nol dan ditransformasikan log maka akan menghasilkan bias. Demikian juga regresi log-linear yang dihasilkan akan menghasilkan bias. Model PPML mengatasi bias tersebut dengan menggunakan cara alami.

METODE PENELITIAN

Data diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) Bank Indonesia dari tahun 2010(1) sampai tahun 2023(12) (Dalam triwulan) yang terdiri dari M2, *domestic credit, GDP,* dan *Domestic real interest rate.* Metode penelitian dengan melakukan pengujian terhadap model *Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)*, selanjutnya dilakukan komparasi terhadap model Regresi Linear Berganda *(Multiple Linear Regression Model)* yang diestimasi dengan menggunakan metode Kuadrat Terkecil Biasa *(Ordinary Least Square),* selanjutnya membandingkan lagi dengan model *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator)*.

Kriteria pemilihan model yang paling sesuai didasarkan pada besarnya nilai koefisien determinasi ($R^{2)}$, *Akaike Information Criteria* (AIC) dan *Bayesian Information Criteria (BIC)* di antara model tersebut. Suatu model dikatakan paling sesuai apabila mempunyai nilai *AIC* ataupun *BIC* terkecil dibandingkan dengan model yang lain, ataupun mempunyai besarnya nilai R^2 terbesar dibandingkan model yang lain.

Unit Root Test

Pengujian alternatif digunakan untuk melihat stasioneritas data time series dengan menggunakan *Test Augmented Dickey-fuller (ADF-test)* (Dickey & Fuller, 1979). *ADF Unit Root Test*, menguji apakah hipotesis nol yang bararti bahwa time series tersebut tidak stasioner dimana hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak tergantung pada rasio t dari suku tersisa x(E-1) terhadap nilai yang ditabulasikan. Jika rasio t lebih kecil dari nilai kritis, hipotesis nol (yaitu deret tersebut tidak stasioner) diterima. Sebabaliknya apabila hasil evaluasi selisih pertama deret tersebut ternyata hipotesis nol ditolak maka deret tersebut dianggap stasioner dan diasumsikan sebagai deret terintegrasi orde satu I(1). Test regresi *ADF* dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta x_t = \lambda_0 + \lambda_1 x_{t-1} + \lambda_2 T + \sum_{i=1}^{n} \Psi_i \Delta x_{t-1} + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana: x = Logaritma natural dari *series,* T = Trend, λ dan Ψ = parameter yang diestimasi, dan ε= *error term*

Pemilihan Model

Penentuan lag yang optimal dengan harapan menghasilkan estimasi terbaik. Kirchgässner & Wolters (2007), dalam melakukan estimasi, lag maksimal (p) harus ditentukan. Pada analisis multivariat dengan k variabel, T observasi, suku konstan dan lag maksimal (p), mempunyai kriteria sebagai berikut:

Final prediction error (FPE):

$$FPE(P) = \left[\frac{T + kp + 1}{T - kp - 1}\right]^k / \sum \hat{u}\hat{u}(p)/ \quad (2)$$

Akaike information criterion (AIC):

$$AIC(p) = In\ / \sum \hat{u}\hat{u}(p)/ + (k + pk^2)\frac{2}{T} \quad (3)$$

Hannan – Quinn criterion (HQ):

$$HQ(p) = In/ \sum \hat{u}\hat{u}(p)/ + (k + pk^2)\frac{2In(In(T))}{T} \quad (4)$$

Schwarz criterion (SC):

$$SC(p) = In/\sum \hat{u}\hat{u}(p)/+(k+pk^2)\frac{In(T)}{T} \quad (5)$$

Bayesian Vector Autoregressive Model (BVAR)

Pada prinsipnya model BVAR secara matematis sama dengan model VAR, yakni:

$$y_t = c + \sum_{i=1}^{p} A_i y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (6)$$

Dimana: y_t = variabel endogenous Kx1 vektor pada periode *t*, A_i= matrik koefisien sehubungan dengan lag ke *I* dari y_t , c= bentuk deterministik konstanta dan ϵ= *erro term* dengan mean nol dan varian-covarian Σ.

Pada penelitian ini, model BVAR orde k ditentukan berdasarkan model VAR(k) (persamaan 7) hingga persamaan 10 dengan perincian sebagai berikut:

$$GDP_t = \alpha_1 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i GDP_{t-i} + \sum_{m=1}^{k} \varphi_m M2_{t-m} + \sum_{n=1}^{k} \vartheta_n RCG_{t-n} + \sum_{p=1}^{k} \varsigma_p IR_{t-p} + u_{1t} \quad (7)$$

$$M12_t = \alpha_2 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i GDP_{t-i} + \sum_{m=1}^{k} \varphi_m M2_{t-m} + \sum_{n=1}^{k} \vartheta_n RCG_{t-n} + \sum_{p=1}^{k} \varsigma_p IR_{t-p} + u_{2t} \quad (8)$$

$$RCG_t = \alpha_3 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i GDP_{t-i} + \sum_{m=1}^{k} \varphi_m M2_{t-m} + \sum_{n=1}^{k} \vartheta_n RCG_{t-n} + \sum_{p=1}^{k} \varsigma_p IR_{t-p} + u_{3t} \quad (9)$$

$$IR_t = \alpha_4 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i GDP_{t-i} + \sum_{m=1}^{k} \varphi_m M2_{t-m} + \sum_{n=1}^{k} \vartheta_n RCG_{t-n} + \sum_{p=1}^{k} \varsigma_p IR_{t-p} + u_{4t} \quad (10)$$

Dimana: GDP_t = Nominal Gross Domestic Product, *M2= M2 growth, RCG= Ratio of domestic credit to GDP, IR = Domestic real interest rate,* α_{1-5} = Konstanta dari lima variabel secara berurutan, u_{1t-5t} = *stochastic error terms* dari lima variabel secara berurutan.

Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression Model)

Regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi GDP menggunakan variabel *M2 growth (M2), Ratio of domestic credit to GDP(RCG)* dan *Domestic real interest rate (IR),* yang secara matematis bisa dimodelkan sebagai berikut:

$$GDP = \beta_0 + \beta_1 M2 + \beta_2 RCG + \beta_3 IR + \varepsilon \quad (11)$$

Dimana: *GDP= Nominal Gross Domestic Product*, M2= *M2 growth, RCG= Ratio of domestic credit to GDP*, *IR = Domestic real interest rate,* β_0, β_1, β_2, β_3,= koefisien regresi, ε = *error term or residual*.

Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator)

PPML Estimator sangat bermanfaat untuk menghasilkan estimator yang lebih efisien tanpa harus menggunakan regresi regresi non-parametrik, yaitu dengan mengestimasi parameter yang diinginkan dengan menggunakan estimator kemungkinan maksimum semu, dengan beberapa asumsi bentuk fungsional Var(yi|xi) (Motta, 2019). Asumsi varian bersyarat demikian halnya

dengan mean bersyarat $E[y_i|x_i] = e^{x_i'\beta_i}$ and $Var[y_i|x_i]$, sedangkan nila β bisa diestimasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{n}\left[y_i - e^{x_i'\beta_i}\right] = 0 \tag{12}$$

Estimator berikut ini pada prinsipnya sama dengan *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator),* dimana persamaannya menyiratkan conditional mean yang benar, $[y_i|x_i] = e^{x_i'\beta_i}$. Dengan demikian data tidak harus berdistribusi Poisson dan y_i tidah harus sebagai bilangan *integer,* agar estimator berdasarkan *Poisson likelihood function* menjadi konsisten. Oleh karena itu, data tidak harus berdistribusi Poisson (data hitungan) dan yi tidak harus berupa bilangan bulat agar penduga berdasarkan fungsi kemungkinan Poisson konsisten (Gourieroux et al., 1984). Model regresi Poisson didefinisikan sebagai:

$$\Pr(y_i = j|x_i) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!}, j=0,1,2,\ldots \tag{13}$$

Dimana: $\lambda = e^{x_i'\beta_i} = e^{\beta_0+\beta_1 x_{1i}+\cdots}$. Vektor parameter β dapat diestimasi dengan memaksimalkan fungsi log-likelihood sebagai berikut:

$$\ln L(\beta) = \sum_{i=1}^{n}\left[-e^{x_i'\beta} + (x_i'\beta)y_i - \ln y_i!\right] \tag{14}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data dan Uji Stasionaritas

Data dari beberapa variabel disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Statistik Deskriptif Semua Variabel

Statistics	GDP	M2	RCG	IR
Mean	27429,14	8527550,	23431775	26167623
Median	26328,70	8235123,	22347623	24123217
Maximum	56690,57	19534571	42348711	51500490
Minimum	12789,40	3980624,	9345324,	10804776
Std. Dev.	11365,50	3956345,	8012985,	13312323
Skewness	0,674397	1,209153	0,723285	0,529932
Kurtosis	2,630622	3,346582	2,852235	2,253224
Jarque-Bera	4,157350	3,06745	3,524885	2,752560
Probability	0,146313	0,226956	0,282234	0,240006
Sum	1783781,	4,67E+09	1,67E+10	1,38E+10
Sum Sq. Dev.	6,67E+10		3,56E+16	7,67E+15
Observations	56		56	56

Sumber: SEKI Bank Indonesia (2010-2023) (data diolah dengan Eviews 10.0)

Stationarity Test

Untuk menguji stasioneritas setiap *series* data maka diuji dengan *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* dengan mendasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

Ho: Variabel mengandung unit root, sehingga tidak stasioner

H_1: Variabel tidak mengandung unit root, sehingga stasioner

Hasil pengujian *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* dengan menggunakan critical value sebesar 5%, semua variabel telah tercapai stasioneritas setelah dilakukan differencing I(1), dengan indikasi

hasil dari ADF test Statistic bernilai kurang dari 5%. Hal ini sebagai dasar untuk melakukan estimasi model selanjutnya. Hasil selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. ADF Unit Root Test

Variabel	*ADF Test Statistic*	*5% Critical Value*	*Order of Integration*
GDP	-28,98744	-2,915140	Stationer pada *differencing* I (1)
M2	-21,76226	-2,915145	Stationer pada *differencing* I (1)
RCG	-13,35648	-2,905176	Stationer pada *differencing* I (1)
IR	-3,352656	-2,916625	Stationer pada *differencing* I (1)

Sumber: SEKI Bank Indonesia (2010-2023) (data diolah dengan Eviews 10.0)

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi, yaitu dengan menggunakan Johansen Cointegration Test, yaitu untuk menganalisis hubungan jangka panjang hubungan antar variabel dalam deret waktu. Hasil Johansen Cointegration Test seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Johansen Cointegration Test

Hypothesized No. of CE(s)	*Eigenvalue*	*Trace Statistic*	*0.05 Critical Value*	*Prob.***
None *	0,5326457	72,09454	46,85573	0,0001
At most 1 *	0,389178	36,09453	28,78607	0,0103
At most 2	0,183768	12,64592	16,49501	0,1528
At most 3	0,050880	2,785836	3,821456	0,0785

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa dengan menggunakan *critical value* 5%, adanya hubungan kointergasi antar variabel sebanyak satu, atau dengan kata lain hubungan dalam jangka panjang antar variabel paling banyak satu. Hal ini ditandai dengan nilai *Trace Statistic* (36,09453) lebih besar dari *critical value* 5% (28,78607).

BVAR Modeling

Estimasi Model

Hasil estimasi model dengan menggunakan BVAR Model seperti terlihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. R Lag Order Selection for BVAR Model

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-2589,678	NA	1,83e+46	117,5866	114,7239	115,6231
1	-2434,244	235,7667	1,14e+46	112,4353	112,2232	111,7446
2	-2336,857	58,92341*	1,69e+45*	109,3038*	111,9672*	108,3344*
3	-2467,356	17,81867	5,36e+45	110,6634	112,7476	111,4342
4	-2445,627	59,63459	4,46e+45	123,5367	112,0334	111,0767

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pemilihan model yang paling sesuai bisa dilihat dari besarnya nilai *AIC* yang paling kecil, yakni pada AIC sebesar 109,3038, yang didukung oleh besarnya nilai *Schwarz information criterion (SC)* dan *Hannan-Quinn information criterion (HQ)* yang terkecil, yakni *SC* = 111,9672 dan *HC* = 108,3344, dimana *R lag order selection* berada pada lag 2. Atas dasar *R lag order selection* di atas maka model BVAR bisa ditentukan seperti pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Model BVAR Memperlihatkan Pengaruh M2, RCG, IR Terhadap GDP

	D(GDP)	**D(M2)**	**D(RCG)**	**D(IR)**
D(GDP(-1))	0,240561	145,8357	-33,97543	165,1251
	(0,22234)	(118,134)	(247,4453	(297,543)
	[0,99234]	[1,24566]	[-0,13345]	[0,52430]
D(GDP(-2))	-0,917453	614,4548	1036,187	1175,354
	(0,16320)	(97,4567)	(206,469)	(243,521)
	[-4,97234]	[6,16743]	[4,97460]	[4,75438]
D(M2(-1))	2,34E-05	-0,525605	-0,475630	-0,837256
	(0,00066)	(0,19801)	(0,44564)	(0,48423)
	[0,07653]	[-2,71760]	[-1,15901]	[-1,71500]
D(M2(-2))	0,000543	-0,105689	-0,219645	0,022346
	(0,00056)	(0,25628)	(0,45435)	(0,55340)
	[1,51370]	[-0,46454]	[-0,48123]	[0,03277]
D(RCG(-1))	-0,001292	0,053035	-0,093482	0,153548
	(0,00056)	(0,16565)	(0,34421)	(0,41912)
	[-0,87490]	[0,32134]	[-0,03472]	[0,36348]
D(RCG(-2))	0,000175	0,023453	-0,080745	-0,002325
	(0,00045)	(0,16014)	(0,33534)	(0,40146)
	[0,47569]	[0,14345]	[-0,242386]	[-0,00435]
D(IR(-1))	0,000545	0,028321	-0,304652	-0,311284
	(0,00055)	(0,13420)	(0,27940)	(0,33374)
	[2,52386]	[0,21345]	[-1,08123]	[-0,93229]
D(IR(-2))	-0,000452	0,329213	0,433451	0,302723
	(0,00034)	(0,11564)	(0,24654)	(0,23829)
	[-1,63451]	[2,775282	[1,74847]	[1,02364]
C	932,5547	-372354,0	60431,35	5498,461
	(472,587)	(254876,)	(543551,)	(632816,)
	[1,95465]	[-1,46242]	[0,113235]	[0,00765]
R-squared	0,981923	0,921374	0,960345	0,973471
Adj. R-squared	0,979345	0,905534	0,952432	0,965343
Sum sq. resids	71764137	3,71E+14	9,35E+14	1,24E+15
S.E. equation	1374,169	986384,7	1563455,	1824534,
F-statistic	273,2314	56,08645	115,9209	163,1431
Log likelihood	-401,3119	-710,3654	-732,0876	-739,2867
Akaike AIC	17,45345	30,61543	31,54764	31,84546
Schwarz SC	17,82530	30,96654	31,88572	32,13540
Mean dependent	27345,47	8056323	20826546	25585543
S.D. dependent	9554,175	3219871	7167563	9855496

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Dari Tabel 5 di atas maka bisa ditentukan modelnya dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta M2_t = 145{,}8357*\Delta GDP_{t-1} + 614{,}4548*\Delta GDP_{t-2} - 0{,}525605*\Delta M2_{t-1} - 0{,}105689*\Delta M2_{t-2} + 0{,}053035*\Delta RCG_{t-1} + 0{,}023453*\Delta RCG_{t-2} + 0{,}028321*\Delta IR_{t-1} + 0{,}329213*\Delta IR_{t-2} - 372354{,}0 \quad (16)$$

$$\Delta RCG_t = -33{,}97543*\Delta GDP_{t-1} + 1036{,}187*\Delta GDP_{t-2} - 0{,}475630*\Delta M2_{t-1} - 0{,}219645*\Delta M2_{t-2} - 0{,}093482*\Delta RCG_{t-1} - 0{,}080745*\Delta RCG_{t-2} - 0{,}304652*\Delta IR_{t-1} + 0{,}433451*\Delta IR_{t-2} + 60431{,}35 \quad (17)$$

$$\Delta IR_t = 165{,}1251*\Delta GDP_{t-1} + 1175{,}354*\Delta GDP_{t-2} - 0{,}837256*\Delta M2_{t-1} + 0{,}022346*\Delta M2_{t-2} + 0{,}153548*\Delta RCG_{t-1} - 0{,}002325*\Delta RCG_{t-2} - 0{,}311284*\Delta IR_{t-1} + 0{,}302723*\Delta IR_{t-2} + 5498{,}461 \quad (18)$$

Residual Diagnostics

Hasil analisis stability test model BVAR ingin melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu seperti terlihat pada tabel 6 di bawah.

Tabel 6: BVAR Model Stability Test

Diagnostic Test	***Test Statistics***	***df***	***Test Statistic Value***	***prob***	***Remarks***
VAR Residual Heteroscedasticity Test	*Chi-square*	160	134,8341	0,9356	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Pada tabel terlihat bahwa Test Statistic Value dari nilai Chi-square sebesar 134,8341 dengan probabilitas sebesar 0,9356 (lebih besar dari critical value=5%) sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil analisis impuls response seperti terlihat pada gambar di bawah:

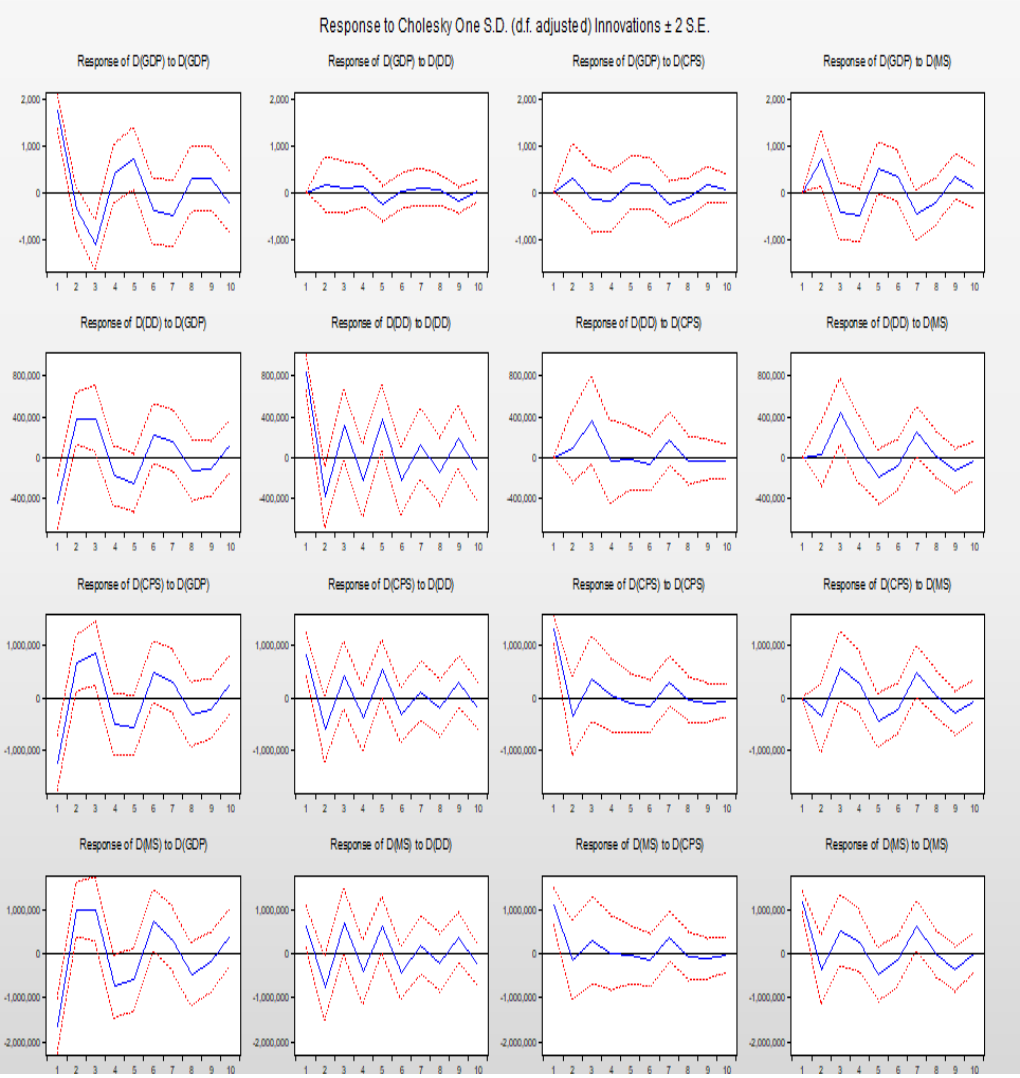

Gambar 1. *Plots of Impulse Response*

Pemodelan Regresi Linear Berganda

Pemodelan regresi linear berganda dimana variabel GDP sebagai variabel independen diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi berganda dengan GDP sebagai *dependent variable*

Variabel	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
D(M2)	0,000162	0,000287	0,527478	0.6170
D(RCG)	-0,000536	0,000250	-2,103099	0.0453
D(IR)	-0,000265	0,000190	-1,365659	0.1780
C	1192,571	239,3923	4,977696	0.0000

Adjusted R-squared	0,582651	*S,D, dependent var*	2491,271
S.E. of regression	1616,005	*Akaike info criterion*	17,65455
Sum squared resid	1,14E+07	*Schwarz criterion*	17,84349
Log likelihood	-424,2121	*Hannan-Quinn criter,*	17,72948

F-statistic	21,91757	*Durbin-Watson stat*	1,927626
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Dari tabel di atas maka persamaan regresinya bisa dituliskan sebagai berikut:

ΔGDP = 1192,571+0,000162*$\Delta M2$ -0,000536*ΔRCG + -0,000265*ΔIR

Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator)

Hasil analisis menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML Estimator) seperti terlihat pada tabel 8 di bawah:

Tabel 8. Hasil analisis menggunakan PPML Estimator dengan GDP sebagai *dependent variable*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*z-Statistic*	*Prob.*
M2	4,41E-09	4,72E-10	93,30768	0.0000
RCG	-4,05E-08	1,18E-09	-34,57023	0.0000
IR	1,24E-09	7,39E-10	1,635428	0.1031
C	9,325660	0,003547	2730,013	0.0000

R-squared	0,876130	*Mean dependent var*	25732,02
Adjusted R-squared	0,859811	*S,D, dependent var*	8575,001
S.E. of regression	3284,573	*Akaike info criterion*	349,3245
Sum squared resid	4,28E+08	*Schwarz criterion*	349,4845
Log likelihood	-8014,436	*Hannan-Quinn criter,*	349,3831
Restr. log likelihood	-63760,48	*LR statistic*	111676,1
Avg. log likelihood	-175,0732	*Prob(LR statistic)*	0,000000

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Dari tabel di atas maka model PPML bisa dituliskan sebagai berikut:

$$GDP_t = 9{,}325660 + 4{,}41\text{E-}09M2 - 4{,}05\text{E-}08RCG + 1{,}24\text{E-}09IR$$

Berdasarkan dari hasil analisis ketiga model, bisa dibandingkan performance dari ketiga model tersebut:

Tabel 9: Perbandingan *Performance* Ketiga Model

Model	***AIC***	***BIC***	***Adjusted R^2***
BVAR	17,45345	17,8253	0,979345
Linear Regression	17,65455	17,84349	0,582651
PPML	349,3245	349,4845	0,876130

Sumber: Perhitungan Penulis, (2024) (Diolah dengan Eviews 10,0)

Interpretasi Hasil dan Diskusi

Hasil analisis Stationary Test terlihat pada Tabel 2, setelah dilakukan *Unit Root Test* terlihat bahwa baik GDP, M2, RCG maupun IR terjadi stasioneritas pada *differencing* pertama (I(1)). Hal ini ditunjukkan oleh hasil statistik uji *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* yang memperlihatkan hasilnya yang lebih rendah dari nilai kritisnya yakni sebesar 5%. Dengan adanya indikasi stasioneritas pada differencing pertama (I(1) maka selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan analisis pemodelan ekonometrik lanjutan.

Analisis berikutnya menunjukkan penolakan hipotesis nol tidak adanya kointegrasi dan paling banyak satu persamaan kointegrasi, seperti terlihat pada Tabel 3 tentang Uji Kointegrasi

Johansen. Sedangkan hipotesis diterima paling banyak dua, sedangkan persamaan kointegrasi paling banyak tiga, hal ini berarti terdapat dua persamaan kointegrasi pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil analisis ini sangat berguna untuk memahami hubungan antar variabel dalam jangka panjang terkait dengan analisis selanjutnya Besarnya nilai probabilitas bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan statistik uji berdasarkan hipotesis nol.

Hasil analisis pemodelan dengan menggunakan BVAR seperti terlihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari hasil *Lag Order Selection* terlihat model dengan *lag order* 2 adalah yang paling sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai log-likelihood tertinggi, sedangkan nilai FPE, AIC, SC, dan HQ menunjukkan nilai terkecil, walaupun nilai LR pada lag 2 masih lebih besar dari nilai LR pada lag 3, namun secara umum lag 2 mengindikasikan model yang paling sesuai. Secara umum penggunaan model BVAR cukup handal karena mampu menangkap kesesuain walaupun adanya kompleksitas model, dengan demikian model ini bisa digunakan untuk analisis ekonometrik selanjutnya, karena dari beberapa kriteria menunjukkan pilihan optimal.

Hasil estimasi untuk dengan model BVAR seperti terlihat pada tabel 5, dimana setiap variabel series bisa dimodelkan dengan BVAR (2), seperti pada persamaan 15 sampai 18. Untuk menguji stabilitas model BVAR (2) digunakan VAR Residual Heteroscedasticity Test yaitu dengan melihat besarnya nilai statistik Chi-square. Semakin besar nilai probabilitasnya mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas pada residualnya. Hasil analisis terlihat pada Tabel 6 yang memperlihatkan nilai probabilitas yang tinggi yakni sebesar 0,9356, yang berarti tidak adanya heteroskedastisitas pada *residual VAR*, sehingga lebih menegaskan adanya stabilitas model dan kehandalan parameter estimasi.

Untuk memperkuat analisis di atas bisa diperkuat dengan hasil visualisasi seperti terlihat pada Gambar 1, yaitu *Plot Impulse Response* yang menggambarkan bahwa model tersebut mampu menangkap dinamika data secara efektif, sehingga model tersebut tidak diragunak kehandalannya.

Pemodelan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan GDP sebagai *dependent variable* dengan hasil seperti terlihat pada tabel 7. Koefisien D(M2)= 0,000162, t- statistik= 0,527478, probabilitas= 0,6170 menunjukkan bahwa secara parsial tidak adanya hubungan maupun pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Koefisien D(RCG) = -0,000536, t- statistik= -2,103099, probabilitas= 0,0453 menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan dampak yang signifikan antara RGC terhadap GDP, Koefisien D(IR)= -0,000265, t- statistik= -1,365659, probabilitas= 0,1780, menunjukkan secara parsial RGC tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap GDP. Besarnya *Adjusted R-squared* = 0,582651 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model mampu menjelaskan sebesar 58 persen.

Hasil analisis pemodelan dengan dengan *Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator (PPML)* dari variabel- variabel yang berinteraksi dengan GDP terlihat seperti pada Tabel 8. Koefisien M2= 4,41E-09, z-Statistic= 93,30768 dan p-Value= 0,0000, berarti secara parsial menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan variabel M2 terhadap GDP, Koefisien RCG= -4,05E-08, z-Statistic= -34,57023 dan p-Value= 0,0000, berarti secara parsial M2 berdampak negatif terhadap GDP, Koefisien IR= 1,24E-09, z-Statistic= 1,635428 dan p-Value= 0.1780, hal ini menunjukkan secara parsial variabel IR tidak berdampak secara signifikan terhadap GDP. Model secara keseluruhan diperoleh nilai *Adjusted R-squared*= 0,859811, hal ini berarti secara keseluruhan model mampu menjelaskan sebesar 86 persen variasi GDP dijelaskan oleh variabel- variabel yang berinteraksi (M2, RCG dan IR).

Pemilihan mana kriteria terbaik juga bisa didasarkan pada perbandingan besarnya nilai uji statistik yang lain, seperti *Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC)*, dan *Adjusted R-squared*. Dari ketiga kriteria tersebut model BVAR menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kedua model yang lain.

Pemilihan model BVAR sebagai yang paling sesuai pada hubungan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan setiap komponen variabel dengan komponen yang lainnya. Seluruh persamaan yang dihasilkan pada model (persamaan 15 sampai 18) menunjukkan bahwa setiap komponen variabel

dipengaruhi oleh baik komponen itu sendiri maupun komponen lainnya sejak dua triwulan sebelumnya (t-2), dengan pengaruh dan sifat hubungan yang berbeda- beda.

Perubahan GDP (=ΔGDP_t) akibat adanya perubahan GDP mulai dari dua triwulan sebelumnya (ΔGDP_{t-2}) dengan berbanding terbalik, hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien - 0.917453, sedangkan dampak dari komponen lain yakni $\Delta M2_{t-2}$= 0,000543, ΔRCG_{t-2}= 0,000175, ΔIR_{t-2}= - 0,000452.

Perubahan M2 (= $\Delta M2_t$) akibat adanya perubahan M2 mulai dari dua triwulan sebelumnya ($\Delta M2_{t-2}$) dengan dengan berbanding terbalik, hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien - 0,105689, sedangkan dampak dari komponen lain yakni ΔGDP_{t-2} = 614,4548, ΔRCG_{t-2}= 0,023453, ΔIR_{t-2}= 0,329213.

Perubahan RGC (= ΔRCG_t) akibat perubahan RCG mulai dari dua triwulan sebelumnya (ΔRCG_{t-2}) dengan berbanding terbalik, hai ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien - 0,080745, sedangkan dampak dari komponen lain yakni ΔGDP_{t-2} = 1036,187, $\Delta M2_{t-2}$= - 0,219645, ΔIR_{t-2}= 0,433451.

Perubahan IR (ΔIR_t) akibat perubahan IR mulai dua triwulan sebelumnya (ΔIR_{t-2}) dengan hubungan searah, hai ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien 0,302723, sedangkan dampak komponen lain yakni ΔGDP_{t-2} = 1175,354, $\Delta M2_{t-2}$ = 0,022346 ΔRCG_{t-2}= - 0,002325.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengaruh itu mulai ditunjukkan sejak dua triwulan sebelumnya, walaupun setiap komponen variabel mempunyai pengaruh yang berbeda- beda. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya, namun demikian ada hal yang perlu mendapat perhatian seperti pertumbuhan GDP saat ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan GDP dua triwulan sebelumnya. Hal ini bisa dijadikan peringatan kepada pemangku kebijakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi selalu terjaga.

Kesimpulan

Keterkaitan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi bisa dimodelkan dengan beberapa macam metode ekonometrik, diantaranya *Bayesian Vector Autoregression (BVAR), Linear Regression* dan *Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML)*. Model ini bisa dibandingkan satu dengan yang lain untuk melihat model terbaik dengan berdasarkan pada kriteria- kriteria uji statistik yang ada. Sebelum dilakukan pemodelan data terlebih dulu dilakukan uji diagnostik awal sebagai prasyarat agar data tersebut bisa dimodelkan lebih lanjut. Syarat stasioneritas variabel-variabel pada penelitian ini terpenuhi ketika dilakukan differncing pertama (I(1)),

Hasil pemodelan BVAR diperoleh model yang sesuai adalah BVAR(2) dengan menghasilkan kinerja yang unggul dalam menyeimbangkan kesesuaian dan kompleksitas model. Pemodelan dengan *Linear Regression* ternyata kurang efektif menjelaskan variasi GDP, terlihat dari besarnya *Adjusted R-squared* yang relatif rendah. Model PPML menghasilkan model yang memadai, terlihat dengan *Adjusted R-squared* yang relatif tinggi, akan tetapi tidak setinggi pada model BVAR. Hal ini juga didukung dengan uji statistik pendukung seperti AIC dan BIC yang menyiratkan bahwa model BVAR sebagai model yang paling sesuai.

Implikasi pemodelan BVAR menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besarnya perubahan setiap komponen dalam variabel baik sektor keuangan maupun perubahan GDP sejak dua triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh fluktuasi perubahan GDP pada dua triwulan sebelumnya, pertumbuhan M2 yang meningkat pada dua triwulan secara konsisten, fluktuasi pertumbuhan *Ratio of domestic credit to GDP* serta fluktuasi pertumbuhan Tingkat suku bunga *(interest rate)*.

REFERENCES

Adu, G., Marbuah, G., & Mensah, J. T. (2013). Financial Development and Economic Growth in Ghana: Does The Measure of Financial Development Matter? *Review of Development Finance*, *3*(4), 192–203. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.11.001

Ang, J. B., & McKibbin, W. J. (2007). Financial Liberalization, Financial Sector Development and Growth: Evidence From Malaysia. *Journal of Development Economics*, *84*(1), 215–233. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.11.006

Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000). Finance and the Sources of Growth. *Journal of Financial Economics*, *58*(1–2), 261–300. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00072-6

Box, G. E. P., & Tjao, G. C. (1973). *Bayesian Inference in Statistical Analysis*. Addison-Wesley Publishing Company.

Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does Financial Development Cause Economic Growth? Time-Series Evidence From 16 Countries. *Journal of Development Economics*, *51*(2), 387–411. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(96)00421-X

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, *74*(366), 427–431. https://doi.org/10.2307/2286348

Dularif, M. (2010). Financial Development and Economic Growth: An Empirical Analysis of Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, *1*(1), 94–131.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gourieroux, C., Monfort, A., & Trognon, A. (1984). Pseudo Maximum Likelihood Methods: Theory. *Econometrica*, *52*(3), 681–700. https://doi.org/10.2307/1913471

Gunawan, F. B. (2019). Hubungan Kausalitas Antara Sektor Keuangan Dan Sektor Riil di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, *11*(1), 44–60. https://doi.org/10.28932/jam.v11i1.1541

Israel, T. O. M., Kingdom, N., Yvonne, D. A., & Ike, W. A. (2023). Application of Bayesian Vector Autoregressive Models in the Analysis of Quasi Money and Money Supply: A Case Study of Nigeria. *Asian Journal of Probability and Statistics*, *25*(3), 108–117. https://doi.org/10.9734/ajpas/2023/v25i3567

Kennedy, P. (2008). *A Guide to Econometrics*. MIT Press.

King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, *108*(3), 717–737. https://doi.org/10.2307/2118406

Kirchgässner, G., & Wolters, J. (2007). Introduction and Basics. In *Introduction to Modern Time Series Analysis* (pp. 1–25). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73291-4_1

Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. *Foundations and Trends in Econometrics*, *3*(4), 267–358.

Kyophilavong, P., Shahbaz, M., & Salah, U. G. (2014). A Note on Nominal and Real Devaluation in Laos. *MPRA Paper*.

Levine, R. (1991). Stock Markets, Growth, and Tax Policy. *The Journal of Finance*, *46*(4), 1445–1465. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04625.x

Motta, V. (2019). Estimating Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood Rather Than Log-Linear Model of A Log-Transformed Dependent Variable. *RAUSP Management Journal*, *54*(4), 508–518. https://doi.org/10.1108/RAUSP-05-2019-0110

Pagano, M. (1993). Financial Markets and Growth: An Overview. *European Economic Review*, *37*(2–3), 613–622. https://doi.org/10.1016/0014-2921(93)90051-B

Saudah, S., & Nuryadin, M. R. (2022). Pengaruh Indikator Sektor Keuangan (DPK, Kredit dan Investasi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(1), 338–353. https://doi.org/10.20527/jiep.v5i1.5532

Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and The Business Cycle*. Harvard University.

Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2018). The Impact of Financial Development, Economic Growth, Income Inequality on Poverty: Evidence From India. *Empirical Economics*, *55*(4), 1585–1602. https://doi.org/10.1007/s00181-017-1321-7

Silva, J. M. C. S., & Tenreyro, S. (2015). *PPML: Stata Module to Perform Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Estimation*. Statistical Software Components.

Sutrisno, H., & Nuryadin, M. R. (2023). Peranan Contagion Effect pada Krisis Mata Uang di Indonesia. *Ecoplan*, *6*(1), 56–69. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.644

Sutrisno, H., Sari, D. W., & Handoyo, R. D. (2021). Vulnerability Analysis of Macroeconomic Indicators for Early Detection of Currency Crisis: Case Study of Indonesian Economy on 1991–2019. *Journal of International Commerce, Economics and Policy (JICEP)*, *12*(2), 2150006.

Sutrisno, H., Wulansari, D., & Handoyo, R. D. (2022). Macroeconomic Indicators as A Signal of The Currency Crisis in The Indonesian Economy. *International Journal of Economics and Management*, *16*(1), 1–20.